Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara

TAHUN 2022

LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Diponegoro No. 34 Telp. (0541) 661036 Fex 661787 Tenggarong Kode Pos 75514
Email : inspektorat@kukarkab.go.id Website : inspektorat.kukarkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah ini

.

Tenggarong, 24 Maret 2023

Inspektur,

H. Heriansyah, SE. M.Si. CGCAE., CPSp.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790801 200112 1 001

Kata Pengantar

Bupati Kutai Kartanegara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wata'ala Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karuniaya kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada hakekatnya merupakan pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah selama periode 1 (satu) tahun anggaran. Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disampaikan garis besar pelaksanaan, realisasi dan capaian tugas-tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang

dituangan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 dengan tema Pembangunan ialah ***"Memperkuat Landasan Bagi Percepatan (Akselerasi) dan Pembaharuan (Transformasi) Pembangunan Berbasis Potensi Kewilayahan dan Komoditi Unggulan".*** RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sangat strategis yang menjadi langkah awal dalam agenda pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.

Keberhasilan dan kemajuan yang dicapai pada Tahun 2022 merupakan upaya bersama dari seluruh pemangku kebijakan dan kepentingan yang merupakan hasil implementasi kolaborasi dengan semangat *betulungan etam bisa* oleh Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Disadari sepenuhnya akan segala keterbatasan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan tugas berkesinambungan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, saran masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan kinerja dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 kami sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dibuat di : Tenggarong
Pada Tanggal : Maret 2023

Bupati Kutai Kartanegara

Drs. Edi Damansyah, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **I**

DAFTAR ISI ..... **III**

DAFTAR TABEL ..... **VI**

DAFTAR GAMBAR ..... **XIII**

DAFTAR GRAFIK ..... **XIV**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Daerah 1

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah 12

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal 29

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH **33**

2.1. Capaian Kinerja Makro 33

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia 33

2.1.2. Angka Kemiskinan 34

2.1.3. Angka Pengangguran 35

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi 36

2.1.5. Pendapatan Perkapita 38

2.1.6. Ketimpangan Pendapatan 39

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 40

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran 40

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil 75

2.2.3. Indikator Kinerja Kinci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 83

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 85

2.3.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja 85

2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja 87

2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya 183

2.3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai 185

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 191

3.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.....191
3.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....192
3.3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan 193
3.4. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.....194
3.4.1. Target Kinerja.....194
3.4.2. Realisasi.....197
3.5. Permasalahan dan Kendala.....200
3.6. Saran dan Tindaklanjut.....201

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....202

4.1. Urusan Pendidikan 202
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar.....202
4.1.2. Target Pencapaian SPM.....203
4.1.3. Realisasi.....203
4.1.4. Alokasi Anggaran 208
4.1.5. Dukungan Personil.....211
4.1.6. Permasalahan dan Solusi 211
4.2. Urusan Kesehatan.....214
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar.....214
4.2.2. Target Pencapaian SPM.....214
4.2.3. Realisasi.....215
4.2.4. Alokasi Anggaran 235
4.2.5. Dukungan Personil.....236
4.2.6. Permasalahan dan Solusi 238
4.3. Urusan Pekerjaan Umum 246
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar.....246
4.3.2. Target Pencapaian SPM.....246
4.3.3. Realisasi.....246
4.3.4. Alokasi Anggaran 251
4.3.5. Dukungan Personil.....252
4.3.6. Permasalahan dan Solusi 253
4.4. Urusan Perumahan dan Pemukiman 253

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar 253
4.4.2. Target Pencapaian SPM 254
4.4.3. Realisasi 254
4.4.4. Alokasi Anggaran 257
4.4.5. Dukungan Personil 258
4.4.6. Permasalahan dan Solusi 259
4.5. Urusan Trantibum 260
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar 260
4.5.2. Target Pencapaian SPM 261
4.5.3. Realisasi 262
4.5.4. Alokasi Anggaran 268
4.5.5. Dukungan Personil 271
4.5.6. Permasalahan dan Solusi 273
4.6. Urusan Sosial 275
4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar 275
4.6.2. Target Pencapaian SPM 276
4.6.3. Realisasi 276
4.6.4. Alokasi Anggaran 284
4.6.5. Dukungan Personil 285
4.6.6. Permasalahan dan Solusi 287
4.7. Program dan Kegiatan 289
4.7.1. Bidang Pendidikan 289
4.7.2. Bidang Kesehatan 291
4.7.3. Bidang Pekerjaan Umum 292
4.7.4. Bidang Perumahan dan Pemukiman 293
4.7.5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 294
4.7.6. Bidang Sosial 297

BAB V PENUTUP 298

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Semester I Tahun 2022 3
Tabel 2. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Tahun 2022 4
Tabel 3. Daftar Perangkat Daerah 5
Tabel 4. Jumlah PNS Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia 7
Tabel 5. Jumlah PNS Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan Tingkat Pendidikan 10
Tabel 6. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 10
Tabel 7. Target dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 11
Tabel 8. Target dan Realiasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 12
Tabel 9. Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara 15
Tabel 10. Program Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 18
Tabel 11. Sasaran, Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan 29
Tabel 12. Capaian Kinerja Makro Tahun 2022 33
Tabel 13. Indikator Pembentukan IPM Tahun 2018-2022 34
Tabel 14. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2020 - 2022 36
Tabel 15. PDRB Seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 37
Tabel 16. Gini Ratio 2020-2022 39
Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran Tahun 2022 40
Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil Tahun 2022 75
Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Penunjang Tahun 2022 83
Tabel 20. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 86
Tabel 21. Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 89

Tabel 22. Pengkategorian Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 91
Tabel 23. Predikat Nilai Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 92
Tabel 24. Rekapitulasi Capaian IKU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 93
Tabel 25. Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2022 94
Tabel 26. Hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 95
Tabel 27. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 terhadap target RPJMD 95
Tabel 28. Program dan Anggaran Sasaran 1 Tahun 2022 96
Tabel 29. Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2022 98
Tabel 30. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 terhadap target RPJMD 100
Tabel 31. Program dan Anggaran Sasaran 2 Tahun 2022 100
Tabel 32. Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2022 103
Tabel 33. Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik DPM-PTSP Tahun 2022 104
Tabel 34. Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik DISDUKCAPIL Tahun 2022 105
Tabel 35. Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan 107
Tabel 36. Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan 108
Tabel 37. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 terhadap target RPJMD 108
Tabel 38.Program dan Anggaran Sasaran 3 Tahun 2022 108
Tabel 39. Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2022 111
Tabel 40. Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 121
Tabel 41. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 terhadap target RPJMD 122
Tabel 42. Program dan Anggaran Sasaran 4 Tahun 2022 122
Tabel 43. Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2022 124
Tabel 44. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 terhadap target RPJMD 128
Tabel 45. Program dan Anggaran Sasaran 5 Tahun 2022 128
Tabel 46. Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2022 130

Tabel 47. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 terhadap target RPJMD 131
Tabel 48. Program dan Anggaran Sasaran 6 Tahun 2022 132
Tabel 49. Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2022 133
Tabel 50. Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 138
Tabel 51. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 terhadap target RPJMD 139
Tabel 52. Program dan Anggaran Sasaran 7 Tahun 2022 140
Tabel 53. Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2022 142
Tabel 55. Jumlah dan Perubahan Pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara 2017-2021 142
Tabel 56. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 terhadap target RPJMD 147
Tabel 57. Program dan Anggaran Sasaran 8 Tahun 2022 147
Tabel 58. Realisasi Indikator Sasaran 9 Tahun 2022 148
Tabel 59. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9 terhadap target RPJMD 149
Tabel 60. Program dan Anggaran Sasaran 9 Tahun 2022 150
Tabel 61. Realisasi Indikator Sasaran 10 Tahun 2022 152
Tabel 62. Data Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan Tahun 2022.....153
Tabel 63. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 terhadap target RPJMD 155
Tabel 64. Program dan Anggaran Sasaran 10 Tahun 2022 155
Tabel 65. Realisasi Indikator Sasaran 11 Tahun 2022 157
Tabel 66. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11 terhadap target RPJMD 158
Tabel 67. Program dan Anggaran Sasaran 11 Tahun 2022 158
Tabel 68. Realisasi Indikator Sasaran 12 Tahun 2022 159
Tabel 69. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12 terhadap target RPJMD 161
Tabel 70. Program dan Anggaran Sasaran 12 Tahun 2022 161
Tabel 71. Realisasi Indikator Sasaran 13 Tahun 2022 163
Tabel 72. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2022 167
Tabel 73. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13 terhadap target RPJMD 168
Tabel 74. Program dan Anggaran Sasaran 13 Tahun 2022 168
Tabel 75. Realisasi Indikator Sasaran 14 Tahun 2022 170
Tabel 76. Data Desa Terhubung Dan Tidak Terhubung Jalur Darat 171
Tabel 77. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 14 terhadap target RPJMD 173

Tabel 78. Program dan Anggaran Sasaran 14 Tahun 2022 174
Tabel 79. Realisasi Indikator Sasaran 15 Tahun 2022 175
Tabel 80. Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2022.....176
Tabel 81. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15 terhadap target RPJMD.....177
Tabel 82. Program dan Anggaran Sasaran 15 Tahun 2022 177
Tabel 83. Sungai yang nilai parameter Fecal Coli di atas Baku Mutu 179
Tabel 84. Realisasi Indikator Sasaran 16 Tahun 2022 180
Tabel 85. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 16 terhadap target RPJMD.....182
Tabel 86. Program dan Anggaran Sasaran 16 Tahun 2022 182
Tabel 87. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 184
Tabel 88. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022 186
Tabel 89. Anggaran dan Realisasi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa.....188
Tabel 90. Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 188
Tabel 91. Rincian Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....195
Tabel 92. Rincian Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pada Dinas Koperasi dan UMK.....197
Tabel 93. Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan.....199
Tabel 94. Realisasi Capaian Layanan Dasar Bidang Pendidikan 203
Tabel 95. Realisasi Mutu Layanan Dasar Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini 205
Tabel 96. Realisasi Mutu Layanan Dasar Pelayanan Pendidikan Dasar 206
Tabel 97. Realisasi Mutu Layanan Dasar Pelayanan Dasar 206
Tabel 98. Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan 207
Tabel 99. Alokasi dan Realisasi Anggaran Penunjang SPM Bidang Pendidikan 208
Tabel 100. Realisasi Capaian Layanan Dasar Bidang Kesehatan 215
Tabel 101. Realisasi Capaian Mutu Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.....223

Tabel 102. Realisasi Pencapaian Mutu Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 224
Tabel 103. Realisasi Pencapaian Mutu Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 225
Tabel 104. Realisasi Pencapaian Mutu Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Balita 226
Tabel 105. Realisasi Pencapaian Mutu Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar 226
Tabel 106. Realisasi Pencapaian Mutu Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan pada usia produktif 227
Tabel 107. Realisasi Pencapaian Mutu Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 228
Tabel 108. Realisasi Pencapaian Mutu Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi 229
Tabel 109. Realisasi Pencapaian Mutu Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus 230
Tabel 110. Realiasi Pencapaian Mutu Layanan Dasar Pelayanan ODGJ 231
Tabel 111. Realiasi Pencapaian Mutu Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis 231
Tabel 112. Realisasi Pencapaian Mutu Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemah daya tahan tubuh manusia (HIV) 232
Tabel 113. Indeks Pencapaian Mutu Layanan Dasar Bidang Kesehatan 234
Tabel 114. Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Kesehatan pada APBD Tahun 2022 235
Tabel 115. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan 236
Tabel 116. Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Kesehatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 237
Tabel 117. Realisasi Capaian Layanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum 246
Tabel 118. Rekapitulasi Penerima Layanan Pemenuhan Air Minum 247
Tabel 119. Rekapitulasi Penerima Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik 248

Tabel 120. Realisasi Capaian Mutu Layanan Dasar Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari....249
Tabel 121. Realisasi Capaian Mutu Layanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik....249
Tabel 122. Indeks Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum....250
Tabel 123. Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum pada APBD Tahun 2022....251
Tabel 124. . Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Pemukiman Berdasarkan Tingkat Pendidikan....252
Tabel 125. Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum....253
Tabel 126. Realisasi Capaian Layanan Dasar Bidang Perumahan....254
Tabel 127. Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana....255
Tabel 128. Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah....256
Tabel 129. Indeks Pencapaian SPM Bidang Perumahan....256
Tabel 130. Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Perumahan pada APBD Tahun 2022....258
Tabel 131. Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Pemukiman Berdasarkan Tingkat Pendidikan....259
Tabel 132. Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan SPM Urusan Perumahan....259
Tabel 133. Realisasi Capaian Layanan Dasar Sub Urusan Pelayanan Trantibum terhadap penegakan Perda sesuai Mutu Pelayanan Ganti Rugi....262
Tabel 134. Realisasi Capaian Layanan Dasar Bidang Trantibum Sub Urusan Bencana Daerah....262
Tabel 135. Realisasi Capaian Layanan Dasar Bidang Trantibum Sub Urusan Kebakaran....264
Tabel 136. Realisasi Capaian Mutu Layanan Dasar Bidang Trantibum Daerah....264

Tabel 137. Realisasi Capaian Mutu Layanan Dasar Bidang Bencana Daerah 265
Tabel 138. Realisasi Capaian Mutu Layanan Dasar Bidan Trantibum Sub Urusan Kebakaran 266
Tabel 139. Indeks Pencapaian SPM Bidang Bencana Daerah....267
Tabel 140. Indeks Pencapaian SPM Bidang Kebakaran Daerah....268
Tabel 141. Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Trantibum Pada APBD Tahun 2022 269
Tabel 142. Dukungan Pesonil SPM Bidang Trantibum Sub Urusan Trantibum 272
Tabel 143. Jumlah ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan tingkat pendidikan....272
Tabel 144. Jumlah Tenaga Honorer / THL menurut Tingkat Pendidikan....272
Tabel 145. Jumlah Petugas Operasional telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Pemadam Kebakaran dan Bencana 273
Tabel 146. Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran Daerah....273
Tabel 147. Realisasi Capaian Layanan Dasar Bidang Sosial 276
Tabel 148. Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Bidang Sosial 279
Tabel 149. Indeks Pencapaian SPM Bidang Sosial....283
Tabel 150. Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Sosial pada APBD Tahun 2022....284
Tabel 151. Jumlah ASN Dinas Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin....285
Tabel 152. Jumlah ASN Dinas Sosial Berdasakan Tingkat Pendidikan 286

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kabupaten Kutai Kartanegara 2
Gambar 2. Fokus Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 27

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Predikat SAKIP 94
Grafik 2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kabupaten/ Kota se Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 99
Grafik 3. Hasil Survey Penilaian Integritas Kab/Kota di Prov. Kalimantan Timur Tahun 2021-2022 100
Grafik 4. Monitoring Center for Prevention KPK Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2022 102
Grafik 5. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010 - 2022 112
Grafik 6. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2010 dan 2022 113
Grafik 7. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen Pembentuk IPM 2010 dan 2022 114
Grafik 8. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2022 115
Grafik 9. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2022 116
Grafik 10. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur, 2021 117
Grafik 11. Indeks Kesehatan Kabupaten Kutai kartanegara 2010 dan 2022 125
Grafik 12. Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2022 126
Grafik 13. Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun Yang Pernah kawin dan melahirkan hidup berdasarkan penolong persalinan di Kab.Kutai Kartanegara dan Provinsi Kaltim, 2021 127
Grafik 14. Indeks Pembangunan Gender Kab/Kota di Kaltim 131
Grafik 15. Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2022 134

Grafik 16. Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2022 135
Grafik 17. Indeks Desa Membangun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2022 139
Grafik 18. Perkembangan TPT Kab. Kutai Kartanegara dan Prov. Kaltim, 2011-2022 144
Grafik 19. PDRB per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2022 146
Grafik 20. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) 149
Grafik 21. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2022 152
Grafik 22. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2022 157
Grafik 23. Target dan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2022 160
Grafik 24. Perbandingan Kondisi Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2022 172
Grafik 25. Perbandingan Kemantapan Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2022 173

BAB I
Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Daerah

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara sebelumnya bernama Kabupaten Kutai, dibentuk dan ditetapkan sebagai Daerah Tingkat II Kutai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah serta potensi ekonomi guna menjamin perkembangan dan kemajuan diwilayah Provinsi Kalimantan Timur, wilayah Kabupaten Kutai sebagian dimekarkan menjadi daerah otonomi baru berdasarkan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. Untuk membedakan penyebutan Kabupaten-Kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kutai, Kabupaten Kutai berubah nama menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Kondisi Geografis

Kabupaten Kutai Kartanegara terletak antara 1150 13’55” Bujur Timur sampai dengan 1170 41’4” Bujur Timur dan 10 31’52” Lintang Utara sampai

dengan 10 10’23” Lintang Selatan. Berdasarkan validasi perhitungan dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 14 September 2021, luas wilayah daratan Kabupaten Kutai Kartanegara ± 26.867,51 km2 dan luas wilayah laut ± 1.868,356 km2 , dengan total luas wilayah ± 28.735,87 km2.

Gambar 1. Peta Kabupaten Kutai Kartanegara

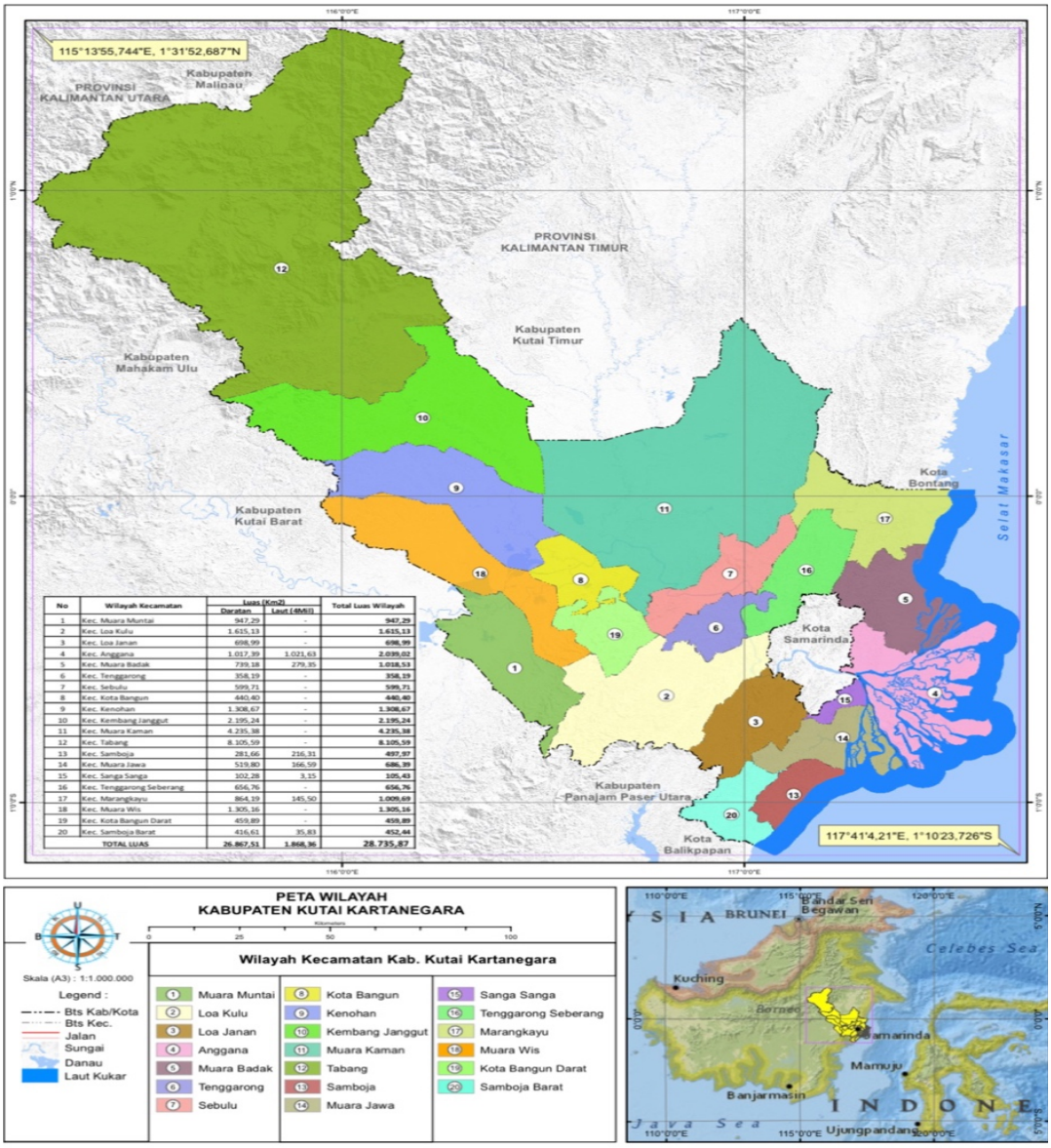

No	Wilayah Kecamatan	Luas (Km2) Daratan	Luas (Km2) Laut (4Mil)	Total Luas Wilayah
1	Kec. Muara Muntai	947,29	-	947,29
2	Kec. Loa Kulu	1.615,13	-	1.615,13
3	Kec. Loa Janan	698,99	-	698,99
4	Kec. Anggana	1.017,39	1.021,63	2.039,02
5	Kec. Muara Badak	739,18	279,35	1.018,53
6	Kec. Tenggarong	358,19	-	358,19
7	Kec. Sebulu	599,71	-	599,71
8	Kec. Kota Bangun	440,40	-	440,40
9	Kec. Kenohan	1.308,67	-	1.308,67
10	Kec. Kembang Janggut	2.195,24	-	2.195,24
11	Kec. Muara Kaman	4.235,38	-	4.235,38
12	Kec. Tabang	8.105,59	-	8.105,59
13	Kec. Samboja	281,66	216,31	497,97
14	Kec. Muara Jawa	519,80	166,59	686,39
15	Kec. Sanga Sanga	102,28	3,15	105,43
16	Kec. Tenggarong Seberang	656,76	-	656,76
17	Kec. Marangkayu	864,19	145,50	1.009,69
18	Kec. Muara Wis	1.305,16	-	1.305,16
19	Kec. Kota Bangun Darat	459,89	-	459,89
20	Kec. Samboja Barat	416,61	35,83	452,44
	TOTAL LUAS	26.867,51	1.868,36	28.735,87

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda, 2022

Kabupaten Kutai Kartanegara secara administratif berbatasan dengan Sebelah Utara Kabupaten Malinau Provinsi Kalimatan Utara, Sebelah Timur berbatasan

dengan Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang dan Selat Makasar, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Barat.

c. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Semester I Tahun 2022 sebesar 765.284 jiwa di 20 (dua puluh) wilayah kecamatan. Komposisi diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Semester I Tahun 2022

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Muara Muntai	10.866	10.019	20.885
2	Loa Kulu	29.126	26.793	55.919
3	Loa Janan	38.566	34.910	73.476
4	Anggana	19.406	17.866	37.272
5	Muara Badak	25.360	23.384	48.744
6	Tenggarong	57.429	54.535	111.964
7	Sebulu	22.273	20.134	42.407
8	Kota Bangun	11.923	11.378	23.301
9	Kenohan	6.371	5.616	11.987
10	Kembang Janggut	13.280	12.010	25.290
11	Muara Kaman	23.654	20.962	44.616
12	Tabang	6.624	5.943	12.567
13	Samboja	20.885	19.352	40.237
14	Muara Jawa	22.435	20.784	43.219
15	Sanga Sanga	10.493	9.999	20.492
16	Tenggarong Seberang	37.025	34.246	71.271
17	Marang Kayu	14.509	13.610	28.119
18	Muara Wis	5.055	4.406	9.461
19	Kota Bangun Darat	7.165	6.694	13.859
20	Samboja Barat	15.972	14.226	30.198
Jumlah Penduduk		**398.417**	**366.867**	**765.284**

Sumber : DKP3A Provinsi Kal-tim, Infoduk Semester I Tahun 2022

d. Jumlah Kecamatan Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Wilayah administrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 20 Kecamatan dan 193 Desa dan 44 Kelurahan, berikut ini ditampilkan tabel

pembagian luas wilayah per kecamatan dan jumlah desa/kelurahan dan gambar peta Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Wilayah Daratan (km^2)	Luas Wilayah Laut (km^2)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Muara Muntai	947,29	-	13	-
2	Loa Kulu	1.615,13	-	15	-
3	Loa Janan	698,99	-	8	-
4	Anggana	1.017,39	1.021,63	8	-
5	Muara Badak	739,18	279,35	13	-
6	Tenggarong	358,19	-	2	12
7	Sebulu	599,71	-	14	-
8	Kota Bangun	440,40	-	11	-
9	Kenohan	1.308,67	-	9	-
10	Kembang Janggut	2.195,24	-	11	-
11	Muara Kaman	4.235,38	-	20	-
12	Tabang	8.105,59	-	19	-
13	Samboja	281,66	216,31	3	10
14	Muara Jawa	519,80	166,59	-	8
15	Sanga-Sanga	102,28	3,15	-	5
16	Tenggarong Seberang	656,76	-	18	-
17	Marangkayu	864,19	145,50	11	-
18	Muara Wis	1.305,16	-	7	-
19	Kota Bangun Darat	459,89	-	10	-
20	Samboja Barat	416,61	-	1	9
Jumlah		**26.968,51**	**1.868,36**	**193**	**44**

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 terdiri dari:

Tabel 3. Daftar Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan
1.	Sekretariat Daerah	Pendukung Urusan Pemerintahan
2.	Sekretariat DPRD	Pendukung Urusan Pemerintahan
3.	Inspektorat	Penunjang
4.	Badan Kepegawaian Dan Pengembagan Sumber Daya Manusia	Penunjang
5.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pemerintahan Umumn
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Trantibum Sub Urusan Bencana
7.	Badan Pendapatan Daerah	Penunjang
8.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Penunjang
9.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Penunjang
10.	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	Penunjang
11.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Kearsipan dan Perpustakaan
12.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan
13.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Kepemudaan dan Olah Raga
14.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.	Dinas Kesehatan	Kesehatan
16.	Dinas Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan
17.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
18.	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
19.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
20.	Dinas Pariwisata	Pariwisata
21.	Dinas Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
23.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
24.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan
25.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pendidikan dan Kebudayaan
26.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
27.	Dinas Perhubungan	Perhubungan
28.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Perindustrian dan Perdanganan
29.	Dinas Perkebunan	Perkebunan
30.	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang	Pertanahan Dan Penataan Ruang
31.	Dinas Pertanian Dan Peternakan	Pertanian dan Peternakan
32.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Perumahan dan Pemukiman
33.	Dinas Sosial	Sosial
34.	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Transmigrasi dan Tenaga Kerja
35.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Trantibum Sub Urusan Kebakaran
36.	Satuan Polisi Pamong Praja	Trantibum Sub Urusan Trantibumlinmas
37.	Kecamatan Anggana	Urusan Kewilayahan
38.	Kecamatan Kembang Janggut	Urusan Kewilayahan
39.	Kecamatan Kenohan	Urusan Kewilayahan
40.	Kecamatan Kota Bangun	Urusan Kewilayahan
41.	Kecamatan Loa Janan	Urusan Kewilayahan
42.	Kecamatan Loa Kulu	Urusan Kewilayahan
43.	Kecamatan Marangkayu	Urusan Kewilayahan
44.	Kecamatan Muara Badak	Urusan Kewilayahan
45.	Kecamatan Muara Jawa	Urusan Kewilayahan
46.	Kecamatan Muara Kaman	Urusan Kewilayahan
47.	Kecamatan Muara Muntai	Urusan Kewilayahan
48.	Kecamatan Muara Wis	Urusan Kewilayahan
49.	Kecamatan Samboja	Urusan Kewilayahan

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan
50.	Kecamatan Sanga-Sanga	Urusan Kewilayahan
51.	Kecamatan Sebulu	Urusan Kewilayahan
52.	Kecamatan Tabang	Urusan Kewilayahan
53.	Kecamatan Tenggarong	Urusan Kewilayahan
54.	Kecamatan Tenggarong Seberang	Urusan Kewilayahan
55.	Kecamatan Kota Bangun Darat	Urusan Kewilayahan
56.	Kecamatan Samboja Barat	Urusan Kewilayahan
57	RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong	Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan
58	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja	Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan
59	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun	Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan

Sumber : Perda No. 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Perda No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Sedangkan jumlah PNS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 apa bila dirinci berdasarkan Usia Per Jenis Kelamin sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah PNS Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia

No	Unit Kerja	Usia Per Jenis Kelamin								Jumlah
		U 18-30		U 31-40		U 41-50		=>50		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	2	7	7	36	17	15	6	91
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0	0	7	7	21	14	9	10	68
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	11	6	60	9	24	7	117
4	Badan Pendapatan Daerah	3	3	30	21	103	67	38	33	298
5	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1	0	9	1	21	17	23	9	81
6	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	4	1	21	13	65	36	15	12	167
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	0	9	10	42	35	18	10	125
8	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	0	0	6	7	28	30	15	11	97
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	0	0	5	5	33	21	28	7	99

No	Unit Kerja	Usia Per Jenis Kelamin								Jumlah
		U 18-30		U 31-40		U 41-50		=>50		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
10	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	0	0	13	9	23	14	17	5	81
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0	0	12	6	13	16	15	8	70
12	Dinas Kesehatan	10	14	32	117	138	362	102	116	891
13	Dinas Ketahanan Pangan	0	0	2	3	12	18	11	3	49
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0	0	6	4	33	15	12	5	75
15	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	0	0	6	6	12	23	14	10	71
16	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	0	0	4	7	41	18	17	6	93
17	Dinas Pariwisata	0	0	13	6	53	35	26	5	138
18	Dinas Pekerjaan Umum	0	0	33	27	136	75	55	16	342
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0	0	11	5	32	35	16	7	106
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0	0	3	5	7	14	7	11	47
21	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	1	10	10	18	20	10	8	77
22	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	12	26	183	393	627	1125	1329	1721	5416
23	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0	0	0	4	20	13	6	13	56
24	Dinas Perhubungan	0	0	13	6	57	21	20	3	120
25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	0	0	9	5	40	34	19	10	117
26	Dinas Perkebunan	0	0	18	13	58	29	26	11	155
27	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang	0	0	6	5	18	21	11	5	66
28	Dinas Pertanian Dan Peternakan	0	0	36	22	131	86	118	38	431
29	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	0	0	17	16	64	61	35	16	209
30	Dinas Sosial	1	0	3	3	27	11	26	7	78
31	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	0	0	6	4	23	15	18	7	73
32	Inspektorat	8	10	9	5	25	17	24	6	104
33	Kantor Kecamatan Anggana	0	0	3	3	7	7	9	6	35
34	Kantor Kecamatan Kembang Janggut	0	0	6	1	12	3	10	2	34
35	Kantor Kecamatan Kenohan	0	0	4	2	9	0	9	0	24
36	Kantor Kecamatan Kota Bangun	0	0	5	0	15	1	14	5	40

No	Unit Kerja	Usia Per Jenis Kelamin								Jumlah
		U 18-30		U 31-40		U 41-50		=>50		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
37	Kantor Kecamatan Loa Janan	0	0	1	4	9	9	7	5	35
38	Kantor Kecamatan Loa Kulu	0	0	5	4	23	10	11	6	59
39	Kantor Kecamatan Marangkayu	0	0	1	0	5	7	10	3	26
40	Kantor Kecamatan Muara Badak	0	0	1	1	9	7	3	4	25
41	Kantor Kecamatan Muara Jawa	0	0	4	12	21	20	15	9	81
42	Kantor Kecamatan Muara Kaman	0	0	14	5	29	4	9	2	63
43	Kantor Kecamatan Muara Muntai	0	0	1	2	13	10	14	2	42
44	Kantor Kecamatan Muara Wis	0	0	3	1	14	7	5	1	31
45	Kantor Kecamatan Samboja	6	1	25	21	38	24	35	11	161
46	Kantor Kecamatan Sanga-Sanga	1	0	4	6	18	10	16	2	57
47	Kantor Kecamatan Sebulu	0	0	1	1	18	5	12	4	41
48	Kantor Kecamatan Tabang	0	0	7	2	15	7	14	1	46
49	Kantor Kecamatan Tenggarong	3	1	48	41	92	77	37	31	330
50	Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang	0	0	4	4	28	4	12	4	56
51	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun	0	2	5	3	11	5	3	1	30
52	RSUD.A.M.Parikesit Tenggarong	5	14	15	49	73	84	43	29	312
53	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Batara Agung Dewa Sakti	4	7	8	22	16	23	7	5	92
54	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	16	2	90	5	26	2	141
55	Sekretariat Daerah	1	1	56	30	219	135	89	50	581
56	Sekretariat DPRD	0	0	16	12	46	48	26	14	162
Jumlah		**61**	**83**	**803**	**986**	**2.847**	**2.836**	**2.555**	**2.341**	**12.512**
Persentase		**1,2%**		**14,3%**		**45,4%**		**39,1%**		

Sumber : BKPSDM Tahun 2022

Kondisi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara jika dilihat berdasarkan menurut Tingkat Pendidikan, kelompok PNS dengan Pendidikan Sarjana (S-1) mendominasi jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 52,09%. secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Jumlah PNS Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	55	0,44%
2	SMP	170	1,36%
3	SMA	3.851	30,78%
4	D-I	29	0,23%
5	D-II	314	2,51%
6	D-III	726	5,80%
7	D-IV	98	0,78%
8	S-1	6.517	52,09%
9	S-2	741	5,92%
10	S-3	11	0,09%
Jumlah		**12.512**	

Sumber: BKPSDM 2022

e. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 sebesar Rp.7.443.525.130.275,86 atau 130,14% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.5.719.589.655.567,00 , secara rinci target dan realisasi pendapatan daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Target (RP)	Realisasi (Rp)	%
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**506.101.538.567,00**	**567.757.276.457,12**	**112,18**
	Pajak Daerah	110.862.683.927,00	142.647.003.486,00	**128,67**
	Retribusi Daerah	5.408.579.568,00	5.332.179.084,00	**98,59**
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	32.120.806.628,00	21.232.144.048,86	**66,10**

No	Uraian	Target (RP)	Realisasi (Rp)	%
	Lain-lain PAD yang Sah	357.709.468.444,00	398.545.949.838,26	**111,42**
2	**Pendapatan Trasnfer**	**5.209.738.117.000,00**	**6.764.448.480.052,00**	**129,84**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**4.606.260.415.410,00**	**6.153.698.018.616,00**	**133,59**
	Dana Perimbangan	4.429.357.061.410,00	5.976.853.751.616,00	**134,94**
	Dana Insentif Daerah (DID)	0	0	
	Dana Desa	176.903.354.000,00	176.844.267.000,00	**99,97**
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	**603.477.701.590,00**	**610.750.461.436,00**	**101,21**
	Pendapatan Bagi Hasil	561.362.821.590,00	568.635.581.436,00	**101,30**
	Bantuan Keuangan	42.114.880.000,00	42.114.880.000,00	**100,00**
3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**3.750.000.000,00**	**111.319.373.766,74**	**2968,52**
	Pendapatan Hibah	3.750.000.000,00	3.033.000.000,00	**80,88**
	Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perpu	0	108.286.373.766,74	
Total		**5.719.589.655.567,00**	**7.443.525.130.275,86**	**130,14**

Sumber : LKPD Kab. Kutai Kartanegara Ta. 2022 Unaudited

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 sebesar Rp.5.475.960.549.797,73 atau 83,50% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 6.558.205.838.057,00. Secara rinci target dan realisasi belanja daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7. Target dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Target (RP)	Realisasi (Rp)	%
1	**Belanja Operasi**	**4.359.530.414.599,00**	**3.672.269.131.103,80**	**84,24**
	Belanja Pegawai	1.906.288.638.947,00	1.660.706.849.284,31	87,12
	Belanja Barang dan Jasa	2.301.703.199.313,00	1.904.457.460.898,17	82,74
	Belanja Subsidi	464.050.000,00	94.194.315,00	20,30
	Belanja Hibah	126.445.726.339,00	90.036.576.606,32	71,21
	Belanja Bantuan Sosial	24.628.800.000,00	16.974.050.000,00	68,92
2	**Belanja Modal**	**1.533.375.706.328,00**	**1.171.734.721.349,93**	**76,42**
	Belanja Modal Tanah	26.833.778.687,00	22.828.252.727,00	85,07
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	438.187.785.606,00	273.027.320.037,73	62,31
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	281.249.158.559,00	187.440.891.917,20	66,65
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	768.832.742.639,00	672.563.911.292,00	87,48

No	Uraian	Target (RP)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.022.240.837,00	15.874.345.376,00	93,26
	Belanja Modal Aset Lainnya	1.250.000.000,00		0,00
3	**Belanja Tidak Terduga**	**41.196.260.000,00**	**10.717.074.540,00**	**26,01**
	Belanja Tidak Terduga	41.196.260.000,00	10.717.074.540,00	**26,01**
4	**Belanja Transfer**	**624.103.574.130,00**	**621.239.622.804,00**	**99,54**
	Belanja Bantuan Keuangan	624.103.574.130,00	621.239.622.804,00	**99,54**
Total		**6.558.205.955.057,00**	**5.475.960.549.797,73**	**83,50**

Sumber : LKPD Kab. Kutai Kartanegara Ta. 2022 Unaudited

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 sebesar Rp3.750.000.000,00 atau 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.3.750.000.000,00, Pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan modal. Secara rinci target dan realisasi pembiayaan daerah Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 8. Target dan Realiasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Target (RP)	Realisasi (Rp)	%
1	**Penerimaan Pembiayaan**	**842.366.182.490,00**	**842.321.882.487,69**	**99,99**
	- Sisa lebih perhitungan pembayaran tahun sebelumnya	842.366.182.490,00	842.321.882.487,69	99,99
2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**3.750.000.000,00**	**3.750.000.000,00**	**100,00**
	- Penyertaan Modal Daerah	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	100,00
Pembiayaan Netto		**838.616.182.490,00**	**838.571.882.487,69**	**99,99**

Sumber : LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Ta.2022 Unaudited

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan lima tahun mendatang, permasalahan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Permasalahan yang dirumuskan harus mampu menggambarkan setiap detil kondisi Kutai Kartanegara

sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan relevan dengan penyelesaian permasalahan pembangunan. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni: *"Belum Optimalnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Kutai Kartanegara"*.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut selanjutnya dijabarakan ke dalam 6 (enam) pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Belum meratanya kualitas kesejahteraan masyarakat;
4. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah;
5. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah;
6. Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021 –2026 adalah :

"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"

Visi tersebut mengandung dua elemen utama pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Masyarakat yang Berbahagia. Adapun penjelasan dari masing-masing elemen visi diatas ada sebagai berikut:

Masyarakat yang Sejahtera, kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan. Diharapkan dari kemudahan mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat dan akses terhadap sumber daya ekonomi maka masyarakat semakin sejahtera.

Masyarakat yang Berbahagia, Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketenteraman diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong-royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dari menjaga keharmonisan dan peningkatan terhadap pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat membuat warga Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berbahagia.

Selain Visi dan Misi, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan filosofi pembangunan tahun 2021-2026 yaitu ***KUKAR IDAMAN.*** Idaman secara etimologi berarti sesuatu yang diharapkan, yang didambakan, yang dicita-citakan. Sedangkan secara terminologi merupakan untuk akronim dari Inovatif, Daya saing dan Mandiri (Idaman). Kukar Idaman adalah satu gerakan yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong kreatifitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dalam menciptakan daya saing dan

kemandirian daerah yang didasari semangat kolaborasi dan sinergisitas antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mewujudkan Kutai Kartanegara yang lebih baik.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Memantapkan birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Keterkaitan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 9. Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia			
Misi/Tujuan/Sasaran	**Indikator**	**Data Awal**	**Target Tahun 2022**
Memantapkan birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani			
Meningkatkan Manajemen Birokrasiyang Efektif, Efisien, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**B (60,95)**	**B (62,00)**
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	B (65,89)	B (66,89)
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Presepsi Anti Korupsi	5,93	6,25

Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia			
Misi/Tujuan/Sasaran	**Indikator**	**Data Awal**	**Target Tahun 2022**
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Presepsi Kualitas Pelayanan Publik	8,50	8,85
Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya			
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing	**Indeks Pembangunan Manusia**	**73,59**	**75,34**
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan	Indeks Pendidikan	0,685	0,693
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	na	50,00
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,805	0,811
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	78,90	79,00
Meningkatkan Kebahagiaan Dan Kesejahteraan Masyarakat	**Tingkat Kebahagiaan**	**na**	**71,00**
	Tingkat Kemiskinan	**7,35**	**6,90**
Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	0,290	0,290
	Indeks Desa Membangun	0,685	0,705
Menurunnya pengangguran di masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,20	4,94
	PDRB per Kapita	188,64	187,21
Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan	**Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Non Migas dan Batu Bara**	**0,62**	**3,74**
Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,21	5,69
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	-0,99	2,34
Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	4,44	6,11

Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia			
Misi/Tujuan/Sasaran	**Indikator**	**Data Awal**	**Target Tahun 2022**
Meningkatnya daya saing investasi daerah	Tingkat Pertumbuhan Investasi	1,69	1,71
Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah			
Meningkatkan Pemerataan Infratstruktur dan Penataan Wilayah	**Indeks Kesulitan geografis**	**37,80**	**35,80**
	Persentase Kawasan Kumuh	**0,0058**	**0,0057**
Meningkatnyakualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	Cakupan layanan air bersih	87,60	89,32
	Presentase rumah layak huni	89,80	90,35
Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Indeks Aksesibilitas Wilayah	83,17	84,18
Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan			
Meningkatkan Pembangunan yang BerwawasanLingkungan	**Presentase penurunan Emisi GRK**	**5**	**5**
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,82	73,14
Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	110,0	108,55

Sumber : Perda No 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Sebagai tindaklanjut dalam pelaksanaan strategi dan arah kebijakan maka dilaksanakan melalui program prioritas yang mempunyai keterkaitan langsung dalam mencapai tujuan dan sasaran. Pada pembangunan lima tahun ke depan, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kebijakan dan program prioritas yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 10. Program Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

Visi/Misi Tujuan/Sasaran/Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
						2022	2023	2024	2025	2026		
Visi:"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"												
Misi 1: Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani												
Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani			**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Nilai**	**B (60,95)**	**B (62,00)**	**B (63,00)**	**B (64,00)**	**B (65,00)**	**BB (70,02)**	**BB (70,02)**	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			**Nilai SAKIP**	**Nilai**	**B (65,89)**	**B (66.89)**	**BB (70)**	**BB (73)**	**BB (77)**	**A (80.01)**	**A (80.01)**	
Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76	77	78	79	80	81	81	Sekretariat Daerah
			Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Pimpinan	Persen	83	87	92	96	98	100	100	
			Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB dan A	Persen	50	60	70	80	90	100	100	
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	
		Program Kepegawaian Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Persen	91,5	92	93	94	95	96	96	Badan Kepegawaian dan Pengembanga SDM
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah			**Indeks Persepsi Anti Korupsi**	**Nilai**	**5,93**	**6,25**	**6,50**	**6,75**	**6,80**	**7,00**	**7,00**	
Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan	Persen	90	100	100	100	100	100	100	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016	Persen	75	100	100	100	100	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	Persen	85	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan reko	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	Persen	90	96	96	96	97	97	97	Inspektorat Daerah

Visi/Misi Tujuan/Sasaran/Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
						2022	2023	2024	2025	2026		
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP	Persen	45	55	65	75	85	100	100	Inspektorat Daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan publik			**Indeks Kualitas Pelayanan Publik**	**Nilai**	**8,5**	**8,85**	**8,90**	**8,95**	**9,00**	**9,05**	**9,05**	
Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu berbasis IT	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP-el	Persen	97,97	99	99	99	99	99	99	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Persentase Kepemilikan KIA	Persen	20	50	70	90	99	99	99	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Penyediaan Data Kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Aplikasi	Aplikasi	1	3	3	3	3	3	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya												
Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing			**Indeks Pembangunan Manusia**	**Nilai**	**73,59**	**75,34**	**75,85**	**76,00**	**76,20**	**76,59**	**76,59**	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan			**Indeks Pendidikan**	**Nilai**	**0,085**	**0,693**	**0,697**	**0,700**	**0,704**	**0,706**	**0,706**	
			Indeks Pembangunan	**Nilai**	**n/a**	**50,00**	**50,50**	**51,00**	**51,50**	**53,00**	**53,00**	
Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu	Program Pengelolaan Pendidikan	Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD (Angka Indeks Max 7)	Persen	84,43	85,86	87	88,43	89,71	90,71	90,71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP (Angka Indeks Max 7)	Persen	83,43	84,86	86	87,43	88,71	89,71	89,71	
			Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) PAUD (Angka Indeks Max 100)	Persen	76,92	78,72	80,6	82,02	83,02	83,92	83,92	
			Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetaraan (Angka Indeks Max 100)	Persen	62,28	64,08	65,98	67,38	68,38	69,28	69,28	
			Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar IDAMAN Pendidikan Dasar	Orang	0	3000	3000	3000	3000	3000	15000	
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal (MuLok)	Persen	0	10	50	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Pendirian dan Operasional	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penguatan Modal Sosial Budaya, Solidaritas Sosial Dan Ketahanan Sosial Dalam Kehidupan Kemasyarakatan	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Pelaksanaan Evant Budaya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	Event	2	10	20	20	30	30	110	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Desa Budaya yang Aktif (Exixting 5 Budaya)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Persen	84	86	88	90	92	94	94	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	77	80	85	90	95	100	100	Dinas Sosial

Visi/Misi Tujuan/Sasaran/Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
						2022	2023	2024	2025	2026		
			Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
			Presentase Rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan	Persen	85	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
			Presentase Kerjasama yang di tindak lanjuti	Persen	75	80	85	90	90	90	90	
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat			**Indeks Kesehatan**	**Nilai**	**0,805**	**0,811**	**0,814**	**0,817**	**0,821**	**0,824**	**0,824**	
Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentasi Balita Stunting	Persen	16,19	15,6	15,1	14,6	14,1	13,8	13,8	Dinas Kesehatan
			Indeks Keluarga sehat	Persen	0,21	0,25	0,3	0,35	0,4	0,5	0,5	
			Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77	0,77	
			Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77	0,78	0,78	
			Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65	0,65	
			Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen	0,44	0,46	0,48	0,5	0,52	0,54	0,54	
			Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen	0,85	0,86	0,87	0,88	0,89	0,9	0,9	
			Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen	0,34	0,36	0,38	0,4	0,43	0,45	0,45	
			Indeks Perilaku kesehatan	Persen	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	0,49	
			Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen	18,75	21,88	25,00	28,13	31,25	34,38	34,38	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM yang Terlatih Sesuai Kompetensinya	Persen	68	68	70	75	80	85	85	Dinas Kesehatan
	Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Capaian RT- PHBS	Persen	26	30	32	34	36	40	40	Dinas Kesehatan
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan			**Indeks Pembangunan Gender**	**Nilai**	**78,9**	**79,00**	**79,05**	**79,10**	**79,15**	**79,20**	**79,20**	
Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	8,48	12,18	15,74	19,31	22,92	26,49	26,49	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai	710	730	750	770	790	810	810	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	97,78	100	100	100	100	100	100	
Meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat			**Tingkat Kebahagiaan**	**Nilai**	**n/a**	**71,00**	**72,00**	**73,00**	**74,00**	**75,00**	**75,00**	
			Tingkat Kemiskinan	**Persen**	**7,35**	**6,90**	**6,50**	**6,45**	**6,40**	**6,35**	**6,35**	
Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat			**Indeks Gini**	**Nilai**	**0,290**	**0,290**	**0,280**	**0,280**	**0,270**	**0,270**	**0,270**	
			Indeks Desa Membangun	**Nilai**	**0,685**	**0,705**	**0,725**	**0,745**	**0,765**	**0,785**	**0,785**	

Visi/Misi Tujuan/Sasaran/Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
						2022	2023	2024	2025	2026		
Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Posyandu Aktif	Persen	39	45,22	51,51	57,79	64,07	70,35	70,35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase Lembanga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik	Persen	16	50	70	80	90	95	95	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Persen	n/a	10	10	10	10	10	50	
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kecukupan Konsumsi Energi	Kkal/Kapita/Hari	1971	2050	2150	2175	2200	2225	2225	Dinas Ketahanan Pangan
			Kecukupan Konsumsi Protein	Gram/Kapita/Hari	54,7	55,5	57	57,1	57,2	57,25	57,25	
	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan pengembang an kawasan strategis daerah	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	Persen	n/a	1,55	5,18	10,36	25,91	38,86	38,86	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Menurunnya pengangguran di masyarakat			**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**Persen**	**5,20**	**4,94**	**4,65**	**4,40**	**4,25**	**4,10**	**4,10**	
			PDRB per Kapita	**Rp. (Juta)**	**188,64**	**187,21**	**191,44**	**197,62**	**202,16**	**204,69**	**204,69**	
Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerj	Pengembang an kewirausahaan dan manajemen bisnis bagi kaum muda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan Kepemudaan	Persen	36,47	71,95	74,39	76,83	79,27	81,71	81,71	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	8,98	12,82	16,66	20,5	24,34	28,19	28,19	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			Penyediaan Pusat Latihan Tenaga Kerja KUKAR IDAMAN	Unit	n/a	1	2	3	3	3	3	
Misi 3: Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif												
Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan			**Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Non Migas dan Batu Bara**	**Persen**	**0,62**	**3,74**	**5,46**	**5,81**	**5,72**	**5,89**	**5,89**	
Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah			**Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**	**Persen**	**0,21**	**5,69**	**6,15**	**6,6**	**7,05**	**7,5**	**7,5**	
Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Luas Tanam Padi	Hektar (Ha)	38.706,00	39.867,18	40.254,24	40.641,30	41.802,48	42.576,60	42.576,60	Dinas Pertanian dan Peternakan
			Luas Tanam Jagung	Hektar (Ha)	2878	3000	7500	13000	20000	30000	30000	
			Luas Tanam Palawija	Hektar (Ha)	14	25	35	45	55	65	65	
			Luas Tanam Hortikultura	Hektar (Ha)	23.449,03	26.197,87	26.987,26	27.781,65	29.278,24	30.200,81	30.200,81	
			Peningkatan Populasi Ternak Besar	Ekor	33576	34416	35275	36157	37061	37988	37988	
			Peningkatan Populasi Ternak Kecil	Ekor	17115	17551	17990	18441	18900	19375	19375	
			Peningkatan Populasi Ternak Unggas	Ekor	15534000	15999000	16480000	16975000	17483000	18009000	18009000	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat	Hektar (Ha)	28516	28570	28645	28720	28795	28880	28880	Dinas Pertanian dan Peternakan

Visi/Misi Tujuan/Sasaran/Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
						2022	2023	2024	2025	2026		
			Luas Areal Kelapa Sawit PBS	Hektar (Ha)	190797	214116	237435	268526	307390	346255	346255	
			Luas Areal Karet	Hektar (Ha)	17833	17898	17928	17958	17988	18033	18033	
			Luas Areal Lada	Hektar (Ha)	3375	3402	3412	3427	3442	3452	3452	
			Luas Areal Kelapa Dalam	Hektar (Ha)	7261	7286	7291	7301	7306	7311	7311	
			Luas Areal Kopi	Hektar (Ha)	72	78	89	110	115	125	125	
			Luas Areal Kakao	Hektar (Ha)	70	80	85	95	95	100	100	
			Luas Areal Aren	Hektar (Ha)	237	237	243	248	248	253	253	
			Luas Areal Kelor	Hektar (Ha)	2	5	7	9	9	9	9	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Panjang Jalan Usaha Tani Yang Dibangun	Meter	99500	28267	33000	20000	12500	10500	104267	Dinas Pertanian dan Peternakan
			Jumlah Embung Pertanian Yang Dibangun	Unit	5	14	23	23	21	19	100	
			Panjang Jaringan Irigasi yang dibangun	Meter	78375	14664	20000	17000	10000	7500	69164	
			Jumlah DAM Parit yang dibangun	Unit	16	4	5	6	4	3	22	
			Jumlah Pintu Air yang dibangun	Unit	128	19	35	33	19	19	125	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	Meter	100000	3600	3600	4000	4000	4800	20000	Dinas Perkebunan
			Jumlah Embung Perkebunan Yang Dibangun	Unit	20	3	4	4	5	4	20	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Derajat Kesehatan Ternak	Persen	90	92	94	95	96	97	97	Dinas Pertanian dan Peternakan
			Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Jenis	3	5	5	5	5	5	5	
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	75	80	85	90	95	100	100	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persen	1,91	4,8	9,8	14,6	19,6	24,6	24,60	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persen	75	80	85	90	95	100	100	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Cakupan Pelaku Usaha Pertanian yang di Bina	Persen	75	80	85	90	95	100	100	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	80000	82400	86520	95172	104689	115158	115158	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	136960	150.656	165.721	185.608	207.881	232.827	232.827	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Cakupan Wilayah Sumberdaya Perikanan Yang Diawasi	Kecamatan	5	5	20	20	20	20	20	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Persentase Penyelesaian Kasus Ilegal / Destruktif Fishing	Persen	n/a	92	93	95	98	100	100	

Visi/Misi Tujuan/Sasaran/Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
						2022	2023	2024	2025	2026		
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	21678	22762	23900	25095	26350	27668	27668	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan	Ton	1500	1530	1607	1687	1771	1860	1860	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan di toko modern	Persen	n/a	95	97	98	98	99	99	Dinas Perindustrian dan Perdaganan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola	Persen	31	43	54	65	75	86	86	Dinas Perindustrian dan Perdaganan
			Pertumbuhan pendapatan pasar	Persen	2,48	3,33	3,35	3,62	4,22	4,22	4,22	
			Indeks Kualitas Pasar	Nilai	43	48	53	58	62	67	67	
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dokumen perencanaan dan pengembangan industri	Dokumen	2	2	2	2	1	1	8	Dinas Perindustrian dan Perdaganan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Kecil, Dan Menengah	Persentase UMKM yang Difasilitasi	Persen	n/a	1,81	1,99	1,99	1,99	1,99	9,77	Dinas Koperasi dan UMKM
		Program Pengembangan Umkm	Persentase Pertumbuhan Omzet	Persen	n/a	0,3	0,6	0,9	1,1	1,4	1,4	Dinas Koperasi dan UMKM
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah			**Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata**	**Persen**	**-0,99**	**2,34**	**2,51**	**3,42**	**4,00**	**4,23**	**4,23**	**Dinas Pawriwisata**
Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam, sosial budaya, dan olah raga yang berkelanjutan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase DTW yang memenuhi aksesibilitas, Amenitas dan atraksi	Persen	28	59,14	64	82	100	100	100	Dinas Pawriwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	Okupansi	Persen	20	23,28	26,28	29,28	32,28	35,28	35,28	Dinas Pawriwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Pelaku EKRAF	Persen	7	7	7	7	7	7	7	Dinas Pawriwisata
Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif			**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif**	**Persen**	**4,44**	**6,11**	**6,55**	**7,09**	**7,48**	**7,56**	**7,56**	
Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Peningkatan produktivitas industri kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Terfasilitasi	Persen	n/a	4	4	5	6	7	7	Dinas Pawriwisata
Meningkatnya daya saing investasi daerah			**Tingkat Pertumbuhan Investasi**	**Persen**	**1,69**	**1,71**	**1,73**	**1,75**	**1,77**	**1,79**	**1,79**	
Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembang an kerjasama investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Proyek PMDN/PMA	Proyek	602	625	640	652	665	685	3267	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor PMDN/PMA	Investor	112	200	260	310	340	350	350	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Penerbitan izin	Izin	678	750	850	950	1050	1150	4750	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah												
Meningkatkan Pemerataan Infratstruktur dan Penataan Wilayah			**Indeks Kesulitan geografis**	**Nilai**	**37,80**	**35,80**	**34,80**	**33,80**	**32,80**	**31,80**	**31,80**	
			Presentase penurunan kawasan kumuh	**Persen**	**0,0058**	**0,0057**	**0,0057**	**0,0056**	**0,0055**	**0,0054**	**0,0054**	
Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih			**Cakupan layanan air bersih**	**Persen**	**87,60**	**89,32**	**90,74**	**92,16**	**93,58**	**95,00**	**95,00**	
			Persentase Rumah Layak Huni	**Persen**	**89,80**	**90,35**	**90,62**	**90,89**	**91,16**	**91,44**	**91,44**	

Visi/Misi Tujuan/Sasaran/Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
						2022	2023	2024	2025	2026		
Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Persen	26,30	31,77	37,25	42,72	48,19	53,67	53,67	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	7,4	7,2	7	6,7	6,4	6,1	6,1	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN	Unit	25	517	517	517	517	517	2585	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	Persen	n/a	4,92	4,69	4,48	4,29	4,11	4,11	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Persen	87,9	89,32	90,74	92,16	93,58	95	95	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan (50 Unit)	Persen	0	0,54	0,7	1,03	1,26	1,48	1,48	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	81,7	83,4	85	86,7	88,3	90	90	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Strategis Daerah	Persen	62,12	65,28	65,75	66,22	66,67	67,11	67,11	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun	Lokasi	1	1	2	1	1	1	6	
			Timbulan sampah	Persen	78,5	88,18	94,84	97,6	99,52	99,96	99,96	
Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah			**Indeks Aksesibilitas Wilayah**	**Nilai**	**83,17**	**84,18**	**85,18**	**86,18**	**87,18**	**88,18**	**88,18**	
Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN	Penyiapan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan pembanguna n kawasan di lokasi IKN	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	60,33	65	70	75	80	85	85	Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio	0,75	0,76	0,78	0,8	0,82	0,85	0,85	Dinas Pekerjaan Umum
			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di	Rasio	0,01	0,02	0,03	0,05	0,06	0,08	0,08	

Visi/Misi Tujuan/Sasaran/Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
						2022	2023	2024	2025	2026		
			Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten									
			Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	Rasio	0	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Kondisi Kemantapan Jalan	Persen	63,4	63,6	64,2	64,7	65	65,1	65,1	Dinas Pekerjaan Umum
Misi 5: Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan												
Meningkatkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			**Persentase Penurunan Emisi GRK**	**Persen**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**25**	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Nilai**	**72,82**	**73,14**	**73,47**	**73,81**	**74,15**	**74,51**	**74,51**	
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan secara lestari dan berkelanjutan	Pemulihan daya dukung lingkungan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	Persen	100	100	60	100	100	66,7	94,4	Dinas Limgkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Pohon yang ditanam pada Program Penanaman Satu Juta Pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi	Pohon	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000	Dinas Limgkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Dokumen Kajian timbulan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara	Dokumen	0	4	4	4	3	3	18	Dinas Limgkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	19,32	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	Dinas Limgkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Penghargaan yang diberikan	Penghargaan	101	124	126	128	129	119	626	Dinas Limgkungan Hidup dan Kehutanan
			Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama	Desa/Kelurahan	0	0	5	5	5	6	21	
Meningkatnya ketahanan bencana daerah			**Indeks Risiko Bencana**	**Nilai**	**110,00**	**108,55**	**106,42**	**104,28**	**102,14**	**100,00**	**100,00**	
daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Penguatan mitigasi dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	5,11	8,1	12,1	15,1	18,1	21,1	21,1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	8,55	10,6	13,6	16,6	19,6	22,6	22,6	
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

Visi/Misi Tujuan/Sasaran/Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
						2022	2023	2024	2025	2026		
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	10,86	12,2	15,8	17,6	19,3	20,1	20,1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	Kelompok	74	10	15	20	25	30	100	
			Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Pada pembangunan tahun 2022 ini merupakan tahun transisi dan langkah awal bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam merealisasikan RPJMD 2021-2026. Dengan ini perlu dilakukan pertimbangan yang mendalam untuk menentukan sasaran, prioritas, dan program serta kegiatan, agar dalam pembangunan selanjutnya pemerintah daerah mempunyai pijakan langkah yang lebih kuat dan mampu menyelenggarakan pembangunan dengan optimal.

Gambar 2. Fokus Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

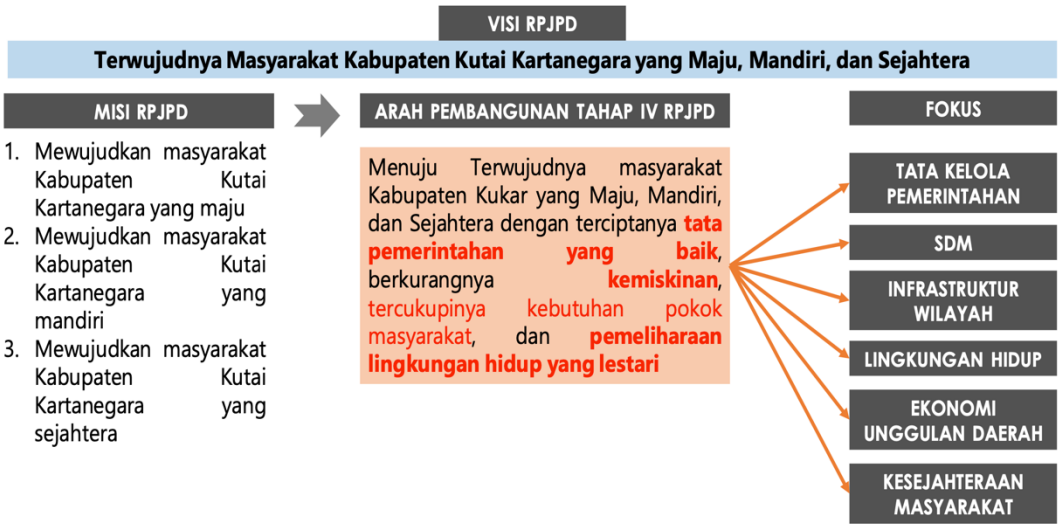

Berdasarkan arahan pembangunan tahap ke-IV RPJPD pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu tata pemerintahan yang baik, berkurangnya kemiskinan, tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan hidup yang lestari. Dengan ini ada 5 fokus pembangunan yang dirumuskan pada RKPD 2022 yaitu; tata kelola pemerintahan, SDM, infrastruktur wilayah, lingkungan hidup, ekonomi unggulan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Menindaklanjuti fokus pembangunan, pemerintah daerah harus mampu merumuskan sasaran tepat untuk mengantisipasi, mengatasi dan segala isu, permasalahan pembangunan daerah di tahun 2022. Dengan arah pembangunan dan permasalahan yang ada maka tema agenda pembangunan pada (RKPD) tahun 2022 adalah :

"Memperkuat Landasan Bagi Percepatan (akselerasi) dan Pembaharuan (transformasi) Pembangunan Berbasis Potensi Kewilayahan dan Komiditi Unggulan Daerah"

Dengan ini Kabupaten Kutai Kartanegera ingin meningkatkan pembangunan pada berbagai bidang pembangunan yaitu bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, pemerintahan, dan lingkungan hidup. Selain itu berdasarkan tema pembangunan yang diusung oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022, akslerasi dan transformasi menjadi *keyword* , dan menjadi fokus keberhasilan dalam agenda pembangunan. Tema pembangunan didasarkan pada pengembangan potensi daerah baik secara kewilayahan yaitu melalui penguatan kecamatan dan kawasan serta pengembangan komoditas unggulan daerah yang selama ini belum tergarap secara optimal seperti pertanian, pariwisata dan jasa. Pengembangan potensi tersebut dilakukan melalui akslerasi atau percepatan pembangunan kecamatan atau pengembangan kawasan yang berperan strategis sebagai prasyarat, untuk tercapainya transformasi struktur ekonomi dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Berdasarkan rumusan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 diatas maka prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegera dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 11. Sasaran, Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

Sasaran		Prioritas 2022	Arah Kebijakan	
1.	Meningktanya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	1.	Penataan Tata Kelola Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Dan Pelestarian Kebudayaan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	2.	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat		3.	Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif
4.	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan Kualitas Hidup Masyarakat	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	4.	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat
5.	Meningkatnya Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	5.	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan
6.	Meningktanua daya Saing Investasi Daerah		6.	Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerjasama investasi
7.	Meningktanya Kualitas Lingkungan Hidup		7.	Pemulihan daya dukung lingkungan
8.	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah		8.	Penguatan mitigasi dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
9.	Meningkatnya Kualitas Permukiman Masyarakat dan Ketersediaan Air Bersih		9.	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman
10.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah		10.	Penyiapan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan pembangunan kawasan di lokasi IKN

Sumber : Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 4 Tahun 2021 tentang RKPD Tahun 2022

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam mensejahterakan masyarakat, khususnya peningkatan pelayanan publik melalui pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan Wajib dan menjadi pelayanan dasar ada 6 (enam) urusan, yaitu: Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan

Pemukiman, Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Bidang Sosial.

Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan pelayanan dasar dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan penyesuaian terhadap regulasi diantaranya: Menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dengan menetapkan kembali melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 556/SK-BUP/HK/2022 tentang Pembentukan Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kutai Kartanegara.

Secara umum pelaksanaan dan penerapan SPM telah tertuang dalam penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, penitik beratan kebijakan umum terkait dengan upaya pemenuhan SPM dapat terlihat dalam pemahaman atas Visi Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026.

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, program pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran prioritas khususnya dalam penerapan standar pelayanan minimal sebagai berikut:

a. Bidan Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Program Pengelolaan Pendidikan.

b. Bidang Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

c. Bidang Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

d. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Program Program Pengembangan Perumahan.

e. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

   Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum:

Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan program Penanggulangan Bencana serta Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

f. Bidang Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Program Rehabilitasi Sosial dan Program Penanganan Bencana.

BAB II
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per-kapita dan ketimpangan pendapatan. Adapun Capaian Kinerja Makro menggunakan Indikator Kinerja Makro sebagai berikut:

Tabel 12. Capaian Kinerja Makro Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Laju Kinerja
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,06	74,67	**0,824**
2	Angka Kemiskinan	7,99	7,96	**-0,375**
3	Angka Pengangguran	5,66	4,14	**-26,855**
4	Pertumbuhan Ekonomi	2,67	3,71	**38,951**
5	Pendapatan Perkapita	241,7	325,6	**34,712**
6	Ketimpangan Pendapatan (gini ratio)	0,283	0,269	**-4,927**

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup penduduk di suatu negara atau daerah. Nilai IPM

berfungsi sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (BPS, 2022) yakni dengan menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Indeks ini dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu:

a. Umur Panjang dan Hidup Sehat yang digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir.
b. Pengetahuan yang diukur berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS merupakan rata- rata lamanya pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, sedangkan HLS menggambarkan harapan atas rata-rata lamanya pendidikan formal yang dapat dienyam oleh penduduk sejak usia tujuh tahun ke atas.
c. Standar hidup layak yang diperoleh dari besar pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP).

Tabel 13. Indikator Pembentukan IPM Tahun 2018-2022

Tahun	Umur Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Perkapita
2018	71,93	13,57	8,84	Rp10.959,00
2019	72,21	13,58	9,1	Rp11.152,00
2020	72,34	13,59	9,22	Rp10.720,00
2021	72,64	13,60	9,23	Rp11.048,00
2022	72,65	13,63	9,24	Rp11.677,00

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

2.1.2. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan bukan makanan yang diukur dari sisi

pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2022 berada pada angka 7,96 % angka ini mengalami penurunan sebesar 0,375 % dari Tahun 2021 pada angka 7,99%.

Isu kemiskinan menjadi perhatian yang cukup besar dalam pembangunan daerah, hal tersebut diindikasikan dari beragam program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diharapkan mendukung memecahkan permasalahan-permasalahan dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang memerlukan tambahan modal khususnya diprioritaskan kepada masyarakat yang bergerak di usaha mikro, pedagang kaki lima dan wirausaha baru.

2.1.3. Angka Pengangguran

Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/usia produktif 15 tahun ke atas. Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja dikenal pula indikator untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.

Angka TPAK dan TPT bisa mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah, serta besarnya persentase angkatan kerja yang masuk dalam kategori pengangguran. Idealnya capaian hasil pembangunan suatu wilayah dikatakan tinggi apabila angka TPAK tinggi dan TPT yang rendah.

Tabel 14. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2020 - 2022

No	Wilayah	2020	2021	2022
1	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**5,70**	**5,66**	**4,14**
2	Kabupaten Paser	4.52	5.70	4.88
3	Kabupaten Kutai Barat	4.97	5.14	4.62
4	Kabupaten Kutai Timur	5.45	5.35	6.48
5	Kabupaten Berau	5.08	5.82	5.02
6	Kabupaten Penajam Paser Utara	6.22	2.95	2.12
7	Kabupaten Mahakam Ulu	3.49	3.14	2.44
8	Balikpapan	9.00	8.94	6.90
9	Samarinda	8.26	8.16	6.78
10	Kota Bontang	9.46	9.92	7.81
11	**Provinsi Kalimantan Timur**	**6,87**	**6,83**	**5,71**

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara : 2022

Dalam laman resmi BPS Provinsi Kalimantan Timur, menurunya TPT Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dari 5,66 persen di tahun 2021 menjadi 4,14 persen di tahun 2022, menunjukkan semakin banyaknya tenaga kerja yang termanfaatkan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara, digunakan data PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara atas harga konstan Tahun 2010 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah pada periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha maupun sisi penggunaan.

Besarnya PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2020-2022) mengalami peningkatan dari Rp.149.043.578 juta pada Tahun 2020 menjadi Rp.240.402.390 juta pada tahun 2022, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku perkembangan dari tahun 2020-2022 serta kontributif per kategorinya terlihat sebagai berikut:

Tabel 15. PDRB Seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)

NO	Kategori Lapangan Usaha	Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
		2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22.247.328	23.863.132	25.777.344
B	Pertambangan dan Penggalian	89.329.132	113.653.746	170.131.419
C	Industri Pengolahan	6.676.746	7.523.085	8.359.456
D	Pengadaan Listrik dan Gas	96.002	97.498	105.092
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	56.115	60.772	69.892
F	Konstruksi	12.721.135	13.336.682	15.255.919
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.330.780	6.576.438	7.483.254
H	Transportasi dan Pergudangan	1.784.252	1.875.133	2.196.873
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	510.992	522.964	563.230
J	Informasi dan Komunikasi	1.282.979	1.399.010	1.505.112
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	554.691	584.404	665.744
L	Real Estate	792.174	779.319	810.916
M,N	Jasa Perusahaan	51.582	52.280	55.321
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.619.629	2.674.158	2.854.426
P	Jasa Pendidikan	2.021.986	2.115.279	2.214.644
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.543.422	1.759.624	1.859.734
R,S,T,U	Jasa lainnya	424.633	444.676	494.014
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**149.043.578**	**177.318.199**	**240.402.390**

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara : 2022

Sedangkan untuk nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan perkembangan dari tahun 2020-2022 serta kontributif per kategorinya terlihat sebagai berikut:

NO	Kategori Lapangan Usaha	Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
		2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.240.217,52	13.375.803,96	13.633.689,96
B	Pertambangan dan Penggalian	84.234.442,09	86.427.052,24	89.018.351,63
C	Industri Pengolahan	4.222.773,89	4.267.098,07	4.393.595,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas	79.167,54	80.344,86	84.200,28
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	43.701,56	45.864,79	51.595,77
F	Konstruksi	7.331.426,53	7.683.188,70	8.573.177,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.219.350,75	4.380.718,55	4.612.649,16
H	Transportasi dan Pergudangan	1.159.281,04	1.198.731,38	1.331.480,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	294.482,21	301.178,06	324.018,01
J	Informasi dan Komunikasi	1.125.520,89	1.224.116,52	1.309.572,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	364.897,85	377.643,00	408.581,67
L	Real Estate	580.507,13	569.896,07	583.714,37
M,N	Jasa Perusahaan	32.393,12	32.814,23	34.660,23
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.589.089,90	1.621.720,06	1.726.423,05
P	Jasa Pendidikan	1.225.101,00	1.262.435,73	1.319.810,69
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	959.084,88	1.071.177,27	1.122.666,36
R,S,T,U	Jasa lainnya	250.570,66	258.721,05	277.240,82
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**120.952.008,58**	**124.178.504,55**	**128.805.427,81**
		-4,21	**2,67**	**3,71**

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara : 2022

Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010. Laju Pertumbuhan Ekonomi pada kurun waktu tahun 2021 s.d 2022 yaitu 3,71.

2.1.5. Pendapatan Perkapita

Indikator pendapatan per kapita digunakan untuk menilai kesejahteraan suatu daerah secara agregat. Terdapat beberapa proxy yang dapat digunakan untuk mengukur pendapatan per kapita suatu daerah dan yang paling sering digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. PDRB per kapita mencerminkan rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh setiap penduduk pada suatu wilayah.

Data yang digunakan untuk mengukur PDRB per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 dan 2022 pada dokumen ini merupakan PDRB atas dasar harga konstan 2010 yang bersumber BPS Kutai Kartanegara. Pengukuran PDRB

per kapita dilakukan dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dalam suatu wilayah per periode tertentu. PDRB per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat pada tahun 2021 sebesar 241.835,19 Juta Rupiah menjadi 325.665,09 Juta. Hal ini menggambarkan tingkat kemakmuran di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021.

2.1.6. Ketimpangan Pendapatan

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna), sehingga nilai Gini Ratio berkisar antara 0–1. Indikator ini mencerminkan tingkat pemerataan pendapatan penduduk suatu wilayah.

Tabel 16. Gini Ratio 2020-2022

No	Wilayah	2020	2021	2022
1	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**0.294**	**0.283**	**0.269**
2	Kabupaten Paser	0.290	0.288	0.282
3	Kabupaten Kutai Barat	0.338	0.317	0.300
4	Kabupaten Kutai Timur	0.325	0.328	0.304
5	Kabupaten Berau	0.300	0.377	0.352
6	Kabupaten Penajam Paser Utara	0.292	0.263	0.274
7	Kabupaten Mahakam Ulu	0.259	0.270	0.288
8	Balikpapan	0.311	0.325	0.334
9	Samarinda	0.324	0.322	0.346
10	Kota Bontang	0.405	0.340	0.324

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara : 2022

Gini ratio Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 tercatat 0.294 persen, selanjutnya Tahun 2021 dan Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0.283 persen dan 0.269 persen. Bila dibandingkan dengan angka koefisien Gini Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsini Kalimantan Timur maka Gini Ratio Kabupaten

Kutai Kartanegara lebih rendah, hal ini menandakan bahwa tingkat pemerataan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara masih lebih baik dari pada Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing- masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Pada Indikator Kinerja Kunci Keluaran yang merupakan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan 8 Urusan Pilihan. Adapun rincian Capaian Indikator Kunci Keluaran pada tabel berikut:

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran Tahun 2022

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.a.1	Pendidikan	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	485	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.1	Pendidikan	2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	17137	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.1	Pendidikan	3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1388	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.1	Pendidikan	4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	147	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.1	Pendidikan	5. Jumlah pendidik pada PAUD	1115	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.1	Pendidikan	6. Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma	1342	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini			
1.a.1	Pendidikan	7. Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	414	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	628	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	92058	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	15335	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1048	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	702	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	6327	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1992	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	4037	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1815	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	954	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	304	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	12. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	724	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.a.2	Pendidikan	13. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	413	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	5464	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2021	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	420	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	105	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat	415	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat	203	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.4	Pendidikan	1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	15	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.4	Pendidikan	2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1421	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.4	Pendidikan	3. Jumlah peserta didik ppendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1949	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.4	Pendidikan	4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	245	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.4	Pendidikan	5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	228	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.4	Pendidikan	6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	204	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.4	Pendidikan	7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar	473	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
1.a.4	Pendidikan	8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	22	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.b.1	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kab/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	3	Dinas Kesehatan	
1.b.2	Kesehatan	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	3	Dinas Kesehatan	
1.b.3	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5	Dinas Kesehatan	
1.b.3	Kesehatan	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	3	Dinas Kesehatan	
1.b.4	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	Dinas Kesehatan	
1.b.4	Kesehatan	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	3	Dinas Kesehatan	
1.b.5	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6	Dinas Kesehatan	
1.b.5	Kesehatan	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	3	Dinas Kesehatan	
1.b.6	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	9	Dinas Kesehatan	
1.b.6	Kesehatan	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	5	Dinas Kesehatan	
1.b.7	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5	Dinas Kesehatan	
1.b.7	Kesehatan	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	6	Dinas Kesehatan	
1.b.8	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	Dinas Kesehatan	
1.b.8	Kesehatan	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	6	Dinas Kesehatan	
1.b.9	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	Dinas Kesehatan	
1.b.9	Kesehatan	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	6	Dinas Kesehatan	
1.b.10	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	Dinas Kesehatan	
1.b.10	Kesehatan	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	4	Dinas Kesehatan	
1.b.11	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	Dinas Kesehatan	
1.b.11	Kesehatan	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	5	Dinas Kesehatan	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.b.12	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4	Dinas Kesehatan	
1.b.12	Kesehatan	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1	Dinas Kesehatan	
1.b.13	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7	Dinas Kesehatan	
1.b.13	Kesehatan	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	6	Dinas Kesehatan	
1.b.14	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4	Dinas Kesehatan	
1.b.14	Kesehatan	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	6	Dinas Kesehatan	
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	21811	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	5026276, 812	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	1724	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	233677	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	5	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	2%	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	2.9%	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0.0%	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1. Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	Ada	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	Ada	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	Ada	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	1	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	4566	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	595	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	4566	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	228	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	228	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	595	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	5.74%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	0.45%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	2.31%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	14.29%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	66.67%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0.21%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0,87	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	220	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	22	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	9	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	2.193,023 Km	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2. Panjang jalan yang dibangun	7,751 Km	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3. Panjang jembatan yang dibangun	49 Meter	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	54.608 Km	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	30 Meter	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	14,314 Km	Dinas Pekerjaan Umum	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	70 Meter	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8. Panjang jalan yang dipelihara	6670.50 Meter	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	9. Panjang jembatan yang dipelihara	3320 Meter	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	46	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	550	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	550	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	2	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	-	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	-	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	-	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	16	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	39	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang	550	Dinas Pekerjaan Umum	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.			
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis	550	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota	550	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	34	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	-	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	-	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	-	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	-	Dinas Pekerjaan Umum	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	34	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	-	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	46	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	550	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	550	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	2	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	-	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	-	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	-	Dinas Pekerjaan Umum	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	16	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	39	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	2	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis	550	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota	550	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	-	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	-	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas Pekerjaan Umum	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	-	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	-	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	-	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	34	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	-	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas Pekerjaan Umum	
1.d.1	Perumahan Rakyat	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	304 unit rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.1	Perumahan Rakyat	2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Nihil	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.1	Perumahan Rakyat	3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Nihil	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.1	Perumahan Rakyat	4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	7 unit rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.d.1	Perumahan Rakyat	5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Nihil	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.1	Perumahan Rakyat	6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Nihil	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.1	Perumahan Rakyat	7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Nihil	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.1	Perumahan Rakyat	8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Nihil	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.1	Perumahan Rakyat	9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	8 lokasi, 23 ha Tenggarong dan Tgr. Seberang	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.2	Perumahan Rakyat	1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Nihil	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.2	Perumahan Rakyat	2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Nihil	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.2	Perumahan Rakyat	3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Nihil	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.2	Perumahan Rakyat	4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	40 rumah tangga	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.2	Perumahan Rakyat	5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	54 rumah tangga	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.2	Perumahan Rakyat	6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	7.44 ha	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.3	Perumahan Rakyat	1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	5,22 ha	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.3	Perumahan Rakyat	2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	15 unit PK RTLH	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.3	Perumahan Rakyat	3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	2,49 ha	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.d.4	Perumahan Rakyat	1. Jumlah rumah di kab/kota	185433 unit rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.4	Perumahan Rakyat	2. Jumlah unit PK RTLH	5553 unit rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.4	Perumahan Rakyat	3. Jumlah rumah tidak layak huni	12903 unit rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.4	Perumahan Rakyat	4. Jumlah rumah yang tidak dihuni	Nihil	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.4	Perumahan Rakyat	5. Rasio rumah dan KK	0,065972 222	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.4	Perumahan Rakyat	6. Jumlah rumah pembangunan baru	30 unit rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.5	Perumahan Rakyat	1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	8 Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.5	Perumahan Rakyat	2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	2264 unit rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.5	Perumahan Rakyat	3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	1466 unit rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.5	Perumahan Rakyat	4. Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site)	909 unit rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.5	Perumahan Rakyat	5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	12 perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.5	Perumahan Rakyat	6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	1338 unit rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.5	Perumahan Rakyat	7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	8 pengembang	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.5	Perumahan Rakyat	8. Jumlah pengembang yang terregistrasi	8 pengembang	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.5	Perumahan Rakyat	9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	8 pengembang	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	1584	Satpol PP	
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2. Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan	160	Satpol PP	
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	17	Satpol PP	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	5	Satpol PP	
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	10	Satpol PP	
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6. Tersedianya sarana prasarana minimal	12 jenis	Satpol PP	
1.e.3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	1	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	
1.e.3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	1	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	1	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0,13%	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0,12%	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0,04%	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	8,19%	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	1	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	1	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	7,58%	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	198	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	7	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	35	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	9	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	49	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	1459	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	8	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	
1.f.1	Sosial	1. Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki	1	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjur usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	21931	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	3. JumlahTimReaksi Cepat yang dibentuk	2	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	21412	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	4	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	21412	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	7. Jumlahrumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	2	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	21412	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	53	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	0	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	1	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	274	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	14. Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS	226	Dinas Sosial	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		dan/atau relawan sosial yang disediakan			
1.f.1	Sosial	15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	333	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	333	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	9	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	18511	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	176	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	155	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	65	Dinas Sosial	
1.f.2	Sosial	1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	1386	Dinas Sosial	
1.f.2	Sosial	2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	1386	Dinas Sosial	
1.f.2	Sosial	3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	18	Dinas Sosial	
1.f.2	Sosial	4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	1386	Dinas Sosial	
1.f.2	Sosial	5. Jumlah korban bencana yang meneriman pelayanan dukungan psikososial	0	Dinas Sosial	
1.f.2	Sosial	6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga	226	Dinas Sosial	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia			
2.a.1	Tenaga Kerja	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	1 dokumen	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.1	Tenaga Kerja	2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	100 persen	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.1	Tenaga Kerja	3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	Tidak Ada	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	63,74	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	2. Persentase instruktur bersertifikatkompetensi	100 persen	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	0,13	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	4. Persentase LPK yang terakreditasi	10, 26 Persen	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	5. Persentase LPK yang memiliki perizinan	100 Persen	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	6. Jumlah penganggur yang dilatih	546 orang	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	63,74 Persen	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	8. Persentase penyerapan lulusan	33,33 Persen	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	9. Lulusan bersertifikat kompetensi	348	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Tidak ada	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Tidak ada	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.3	Tenaga Kerja	1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Tidak Ada	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.3	Tenaga Kerja	2. Data tingkat produktivitas total	Tidak Ada	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	2,42	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	50 persen	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	12 perusahaan	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.a.4	Tenaga Kerja	4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	100 persen	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai peserta BPJS Ketenagakerjaan	100 persen	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	14,52 persen	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	7. Jumlah mogok kerja	Tidak ada	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	8. Jumlah penutupan perusahaan	Tidak ada	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	9. Jumlah perselisihan kepentingan	2 Kasus	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Tidak ada	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	11. Jumlah perselisihan PHK	57 kasus	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	827 Tenaga Kerja	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	4 kasus	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1 LKS	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	36,11 persen	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	1343	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	5621	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	23	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Tidak Ada	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	3	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	1	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	1	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui	Tidak Ada	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)			
2.a.5	Tenaga Kerja	9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)yang mendapatkan sosialisasi	Tidak Ada	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)yang terdata	10	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Tidak Ada	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	12. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Tidak Ada	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Tidak Ada	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	Tidak Ada	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.g.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.g.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2. Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	120	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.g.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.g.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.g.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.g.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.g.2	Pemberdayaan Perempuan dan	5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas	0	Dinas Pemberdayaan	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Perlindungan Anak	oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)		Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.h.1	Pengan	1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	ada	Dinas Ketahanan Pangan	
2.h.1	Pengan	2. Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	ada	Dinas Ketahanan Pangan	
2.h.1	Pengan	3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan	
2.h.1	Pengan	4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	ada	Dinas Ketahanan Pangan	
2.h.1	Pengan	5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	ada	Dinas Ketahanan Pangan	
2.h.1	Pengan	6. Tertanganinya kerawanan pangan	ada	Dinas Ketahanan Pangan	
2.h.1	Pengan	7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	ada	Dinas Ketahanan Pangan	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.h.1	Pengan	8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	ada	Dinas Ketahanan Pangan	
2.i.1	Pertanahan	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	100	DInas Pertanahan dan Tata Ruang	
2.i.1	Pertanahan	2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	100	DInas Pertanahan dan Tata Ruang	
2.i.1	Pertanahan	3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	100	DInas Pertanahan dan Tata Ruang	
2.i.1	Pertanahan	4. Dokumen Izin membuka tanah	100	DInas Pertanahan dan Tata Ruang	
2.i.1	Pertanahan	5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	100	DInas Pertanahan dan Tata Ruang	
2.j.1	Lingkungan Hidup	a. Indeks Kualitas Air	2,213888 889	DInas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2.j.1	Lingkungan Hidup	b. Indeks Kualitas Udara	3,729861 111	DInas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2.j.1	Lingkungan Hidup	c. Indeks Tutupan Hutan	2,9875	DInas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2.j.2	Lingkungan Hidup	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	100	DInas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2.j.3	Lingkungan Hidup	1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	90	DInas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2.j.3	Lingkungan Hidup	2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	25	DInas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2.j.3	Lingkungan Hidup	3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	Tdi	DInas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2.j.3	Lingkungan Hidup	4. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0	DInas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2.j.3	Lingkungan Hidup	5. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah	100	DInas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kabupaten/kota yang ditangani.			
2.j.3	Lingkungan Hidup	6. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	DInas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2.k.1.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Penerbitan akta perkawinan	1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.k.1.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2. Penerbitan akta perceraian	1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.k.1.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3. Penerbitan akta kematian	1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.k.1.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4. Penyajian data kependudukan	1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.l.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	46 Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2.l.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2.l.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	75	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2.l.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2.m.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.m.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	1,0529	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.m.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	22 kelahiran	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.m.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	7,19%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.m.1	Pengendalian penduduk dan	5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja	37	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	keluarga berencana	(termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK			
2.m.2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.m.2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	61,80%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.m.2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	3. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	40	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.m.2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	0,6418	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.m.3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	0,47	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.m.3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	100%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.n.1	Perhubungan	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	4	Dinas Perhubungan	
2.n.1	Perhubungan	2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	6726	Dinas Perhubungan	
2.n.1	Perhubungan	3. Penetapan tariffangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	13	Dinas Perhubungan	
2.n.1	Perhubungan	4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	3,94%	Dinas Perhubungan	
2.n.2	Perhubungan	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk jaringan Jalan Kabupaten	3,94%	Dinas Perhubungan	
2.o.1	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.o.1	Komunikasi dan Informatika	2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.o.1	Komunikasi dan Informatika	3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra	ADA (23)	Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah			
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	3,698611111	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	88.88	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	2,591666667	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	23,21	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	23,21	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	11. Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.o.3	Komunikasi dan Informatika	Persentase Komunitas Masyarakat/mitra Strategis Pemerintah Daerah Kab./Kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah Kab / Kota	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.o.3	Komunikasi dan Informatika	Persentase Konten Informasi terkait program dan kebijakan pemerintah Kab./Kota sesuai denha Strategi Komunikasi (STRAKOM)	214,79	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.o.3	Komunikasi dan Informatika	Persentase Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (Starkom) dan SOP yang telah ditetapkan	214,79	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,6667	DInas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1	DInas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,1896	DInas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannyauntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,1852	DInas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihanuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,0994	DInas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan	0,0041	DInas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	DInas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0	DInas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,1315	DInas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3,52%	DInas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaranuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1,38%	DInas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	5,96%	DInas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	22,17%	DInas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0,4223	DInas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0,0233	DInas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,0013	DInas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0,0075	DInas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,0042	DInas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,0153	DInas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	7. Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan kelembagaan dan usaha	0,0031	DInas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.q	Penanaman Modal	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	TDI	Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	TDI	Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	TDI	Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1	Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	5. Kegiatan pameran penanaman modal	3	Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	1	Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	837	Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	6173	Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	9. Laporan realisasi penanaman modal	9,78284E +12	Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	110	Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	382	Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	6173	Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu	
2.r.1	Kepemudaan dan Olah Raga	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	355	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
2.r.1	Kepemudaan dan Olah Raga	2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
2.r.2	Kepemudaan dan Olah Raga	1. Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	100	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.r.2	Kepemudaan dan Olah Raga	2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	342	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
2.r.3	Kepemudaan dan Olah Raga	1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	135	DInas Kepemudaan dan Olah Raga	
2.r.3	Kepemudaan dan Olah Raga	2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	2	DInas Kepemudaan dan Olah Raga	
2.s.1	Statistik	1. Tersedianya buku profil daerah	Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.s.1	Statistik	2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	51	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.s.1	Statistik	3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	2	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.s.1	Statistik	4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	36	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.s.1	Statistik	5. Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	2	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.s.1	Statistik	6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.s.1	Statistik	7. Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.t	Persandian	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankan	1	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.t	Persandian	2. Persentase system elektronik yang telahmenerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	75,71	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.t	Persandian	3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	17,14	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.t	Persandian	4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.u	Kebudayaan	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan	59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)			
2.u	Kebudayaan	2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	95 Terdaftar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	6. Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	7. Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	8. Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	9. Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	472 Koleksi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	4120 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	12. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	14. Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	5 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya	2 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.u	Kebudayaan	16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	9 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.v.1	Perpustakaan	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	5,847222222	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.v.1	Perpustakaan	2. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	3,03	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.v.1	Perpustakaan	3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,008333333	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.v.1	Perpustakaan	4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0,220138889	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.v.1	Perpustakaan	5. Jumlah pemasyarakatangemar membaca di masyarakat	145	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.v.2	Perpustakaan	1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.v.2	Perpustakaan	2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.v.2	Perpustakaan	3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	788	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.w.1	Kearsipan	1. persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.w.1	Kearsipan	2. persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.w.1	Kearsipan	3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.w.1	Kearsipan	4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.w.2	Kearsipan	1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	3,484	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.w.2	Kearsipan	2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	504	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.w.2	Kearsipan	3. Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	16349	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.w.2	Kearsipan	4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	520	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.w.2	Kearsipan	5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	40	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.w.2	Kearsipan	6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
3.a	Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	37693	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3.a	Kelautan dan Perikanan	2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	1	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3.a	Kelautan dan Perikanan	3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3.a	Kelautan dan Perikanan	4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	1074	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3.a	Kelautan dan Perikanan	5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	1090220 000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3.b.1	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	67 Pengelola Destinasi	DInas Pariwisata	
3.b.1	Pariwisata	2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	9	DInas Pariwisata	
3.b.1	Pariwisata	3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	3	DInas Pariwisata	
3.b.1	Pariwisata	4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	632	DInas Pariwisata	
3.b.1	Pariwisata	5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	25	DInas Pariwisata	
3.b.1	Pariwisata	6. Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	tidak ada	DInas Pariwisata	
3.b.1	Pariwisata	7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even	3	DInas Pariwisata	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		promosi pariwisata di dalam negeri			
3.b.1	Pariwisata	8. Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi	100	DInas Pariwisata	
3.b.1	Pariwisata	9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	27,50%	DInas Pariwisata	
3.b.1	Pariwisata	10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	27	DInas Pariwisata	
3.c.1	Pertanian	1. Sarana pertanian yang diberikan	10338,2	DInas Pertanain dan Kesehatan Hewan	
3.c.1	Pertanian	2. Prasarana pertanian yang digunakan	140	DInas Pertanain dan Kesehatan Hewan	
3.c.1	Pertanian	3. Penerbitan izin usaha pertanian	0	DInas Pertanain dan Kesehatan Hewan	
3.c.1	Pertanian	4. Persentase prasarana yang digunakan	1	DInas Pertanain dan Kesehatan Hewan	
3.c.1	Pertanian	5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	0	DInas Pertanain dan Kesehatan Hewan	
3.c.2	Pertanian	1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	1	DInas Pertanain dan Kesehatan Hewan	
3.d	Kehutanan	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3.d	Kehutanan	2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3.d	Kehutanan	3. Pemulihan ekosistem pada Tahura	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3.d	Kehutanan	4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3.e	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	-	Energi dan Sumber Daya Mineral (DIHAPUS)	
3.f.1	Perdaganagan	1.a Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	Tidak Di Isi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.f.1	Perdaganagan	1.b Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Swalayan	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.f.1	Perdaganagan	2. Persentase penerbitan TDG	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.f.1	Perdaganagan	3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	68%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.f.1	Perdaganagan	4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	Tidak Di Isi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.f.1	Perdaganagan	5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	Tidak Di Isi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
3.f.1	Perdaganagan	6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	Tidak Di Isi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.f.1	Perdaganagan	7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.f.1	Perdaganagan	8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0,0359	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.f.2	Perdaganagan	1. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	16,41%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.f.3	Perdaganagan	1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	23,3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.f.3	Perdaganagan	2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.g.1	Perindustrian	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Tidak Di Isi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.g.2	Perindustrian	1. Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	50%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.g.3	Perindustrian	1. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.g.3	Perindustrian	2. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Tidak Di Isi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.g.4	Perindustrian	Persentase Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri kecel dan menegah yang diterbitkan	Tidak Di Isi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.g.6	Perindustrian	1. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan indusri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota	1,83%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.h	Transmigrasi	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
3.h	Transmigrasi	2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Tidak ada	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
3.h	Transmigrasi	3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Tidak Ada	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Sumber : lppd.kukarkab.go.id : 2022 Sumber : lppd.kukarkab.go.id : 2022

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Pada Indikator Kinerja Kunci Hasil yang merupakan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan 8 Urusan Pilihan. Adapun rincian Capaian Indikator Kunci Hasil pada tabel berikut:

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil Tahun 2022

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.a.1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	64,47	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	98,41	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.3	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	86,07	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.4	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	66,71	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.b.1	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,11	Dinas Kesehatan	
1.b.2	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100,00	Dinas Kesehatan	
1.b.3	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	91,96	Dinas Kesehatan	
1.b.4	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	94,53	Dinas Kesehatan	
1.b.5	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97,24	Dinas Kesehatan	
1.b.6	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84,39	Dinas Kesehatan	
1.b.7	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	Dinas Kesehatan	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.b.8	Kesehatan	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	91,94	Dinas Kesehatan	
1.b.9	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	90,59	Dinas Kesehatan	
1.b.10	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	Dinas Kesehatan	
1.b.11	Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	Dinas Kesehatan	
1.b.12	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,84	Dinas Kesehatan	
1.b.13	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	138,38	Dinas Kesehatan	
1.b.14	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	108,98	Dinas Kesehatan	
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	100	Dinas Pekerjaan Umum	Tidak Ada Kewenangan WS sesuai Permen PUPR No.4 Tahun 2015
1.c.2	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	100	Dinas Pekerjaan Umum	Tidak Ada Kewenangan WS sesuai Permen PUPR No.4 Tahun 2015
1.c.3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	43,06	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	76,68	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	76,14	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	98,64	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	61,49	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	2,58	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.d.1	Perumahan Rakyat	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak Ada Bencana Terjadi
1.d.2	Perumahan Rakyat	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	42,55	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.3	Perumahan Rakyat	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Wil Kumuh <10 ha Sudah selesai ditangani pada tahun 2020
1.d.4	Perumahan Rakyat	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	6,96	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.5	Perumahan Rakyat	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	26,67	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00	Satpol PP	
1.e.2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	34,69	Satpol PP	
1.e.3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,13	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	668,70	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Perlindungan Masyarakat	kesiapsiagaan terhadap bencana			
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	78,33	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	
1.e.7	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	13,17	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	
1.f.1	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	97,63	Dinas Sosial	
1.f.2	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100,00	Dinas Sosial	
2.a.1	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100,00	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	8,86	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.3	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	52,25	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	88,91	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	8,02	DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.g.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,06	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.g.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	6,81	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.h.1	Pengan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	35,08	Dinas Ketahanan Pangan	
2.i.1	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100,00	DInas Pertanahan dan Tata Ruang	
2.i.2	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100,00	DInas Pertanahan dan Tata Ruang	
2.i.3	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100,00	DInas Pertanahan dan Tata Ruang	
2.i.4	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100,00	DInas Pertanahan dan Tata Ruang	
2.i.5	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	100,00	DInas Pertanahan dan Tata Ruang	
2.i.6	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	90,00	DInas Pertanahan dan Tata Ruang	
2.j.1	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	71,77	DInas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2.j.2	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	86,63	DInas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2.j.3	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	60,47	DInas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2.k.1.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	99,14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.k.1.2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	48,45	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.k.1.3	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	96,33	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.k.1.4	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	53,57	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.l.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2.l.2	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	22,45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2.m.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,39	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.m.2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	61,13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.m.3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	24,97	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.n.1	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	82,60	Dinas Perhubungan	
2.n.2	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	3,94	Dinas Perhubungan	
2.o.1	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	73,91	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.o.3	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	70,43	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	50,37	DInas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	73,11	DInas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.q	Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Ivestasi di Kabupaten / Kota	90,63	Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.r.1	Kepemudaan dan Olah Raga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,12	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
2.r.2	Kepemudaan dan Olah Raga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	16,30	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
2.r.3	Kepemudaan dan Olah Raga	Peningkatan prestasi olahraga	17,00	DInas Kepemudaan dan Olah Raga	
2.s.1	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.s.2	Statistik	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.t	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	55,60	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.u	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	9,47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.v.1	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	52,55	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.v.2	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	20,15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.w.1	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	75,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.w.2	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
3.a	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	99,69	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3.b.1	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1273,91	DInas Pariwisata	
3.b.2	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	68,76	DInas Pariwisata	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
3.b.3	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	37,39	DInas Pariwisata	
3.b.4	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	26,15	DInas Pariwisata	
3.b.5	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	8,52	DInas Pariwisata	
3.c.1	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahunProduktivitas pertania n per tahun	430,70	DInas Pertanain dan Kesehatan Hewan	
3.c.2	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota	-74,74	DInas Pertanain dan Kesehatan Hewan	
3.d	Kehutanan	n/a	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tidak Ada Kewenangan
3.e	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	100	Energi dan Sumber Daya Mineral	Tidak Ada Potensi
3.f.1	Perdaganagan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	90,77	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.f.2	Perdaganagan	Persentase kinerja realisasi pupuk	95,78	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.f.3	Perdaganagan	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	23,28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.g.1	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	7,17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.g.2	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	117,46	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.g.3	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	15,07	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.g.4	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI)	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tidak Ada Potensi

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
3.g.5	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tidak Ada Potensi
3.g.6	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	75,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.h	Transmigrasi	n/a	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tidak Ada Indikator

Sumber : lppd.kukarkab.go.id : 2022

2.2.3. Indikator Kinerja Kinci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Pada Indikator Kinerja Kunci yang merupakan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Urusan Fungsi Penunjang. Adapun rincian Capaian Indikator Kunci pada tabel berikut:

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Penunjang Tahun 2022

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
4.a.1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawaidi luar guru dan tenaga kesehatan	12,41	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
4.a.2	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	7,63	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
4.a.3	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,00	Inspektorat	
4.a.4	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,00	Inspektorat	
4.a.5	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	65,11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
4.a.6	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan 10 Tahun Terakhir	9,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
4.b.1	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun	0,00	Bagian Pengadan Barang Dan Jasa Setda	Tidak ada Kontrak

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama			Tahun Jamak
4.b.2	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	49,28	Bagian Pengadan Barang Dan Jasa Setda	
4.b.3	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	50,64	Bagian Pengadan Barang Dan Jasa Setda	
4.c.1	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	46,68	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
4.c.2	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	10,51	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
4.c.3	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	38,11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
4.d.1	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	16,44	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
4.d.2	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	13,30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
4.d.3	Manajemen Keuangan	Manajemen Aset	4,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
4.d.4	Manajemen Keuangan	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	17,87	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
4.e.1	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	97,07	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	
4.e.2	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	66,67	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	
4.b.4	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	42,97	Bagian Pengadan Barang Dan Jasa Setda	

Sumber : lppd.kukarkab.go.id : 2022

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja.

Berikuti disajikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 :

2.3.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara dan Perubahannya Tahun 2022, telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 yang ditandatangani Bupati Kutai Kartanegara. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 20. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET RPJMD 2022
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Nilai SAKIP	Nilai	66,89
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	6,25
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,85
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,693
		5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	50
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,811
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	8	Indeks Gini	Nilai	0,29
		9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,705
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,94
		11	PDRB Per Kapita	Nilai	187,21
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	5,69
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	2,34
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	6,11
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	1,71
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	89,32
		17	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	90,35

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET RPJMD 2022
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	84,18
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,14
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	108,55

2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sub bab ini akan disajikan target kinerja dalam perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja, capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja dengan target pembangunan jangka menengah, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibanding dengan capaian kinerja dan analisis program dan kegiatan yang mendukung capaian target kinerja, serta di uraikan cara pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja provinsi dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/ indikator kinerja.

Untuk mengukur persentase capaian kinerja dari masing-masing indikator maka ada dua jenis rumus yang digunakan yaitu:

1) Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$Persentase\ Capaian = \frac{Realisasi}{Target} X\ 100\%$$

2) Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$Persentase\ Capaian = 1 + \frac{Target - Realisasi}{Target} X\ 100\%$$

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja (PK).

Selanjutnya untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa **skala ordinal**. Adapun skala ordinal yang digunakan dalam laporan akuntabilitas ini adalah sebagai berikut:

Skala Ordinal Pengukuran Sasaran		
No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1	≥95	Sangat Berhasil
2	80 s/d <95	Berhasil
3	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4	<50	Kurang Berhasil

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi kedepan yang perlu dilaksanakan.

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Kurai Kartanegara atas Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Kurai Kartanegara Tahun 2022 yang terdiri dari 16 sasaran, adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Nilai SAKIP	Nilai	66,89	67,40	100,76%
Rata-rata Capaian							**100,76%**
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	6,25	8,38	134,08%
Rata-rata Capaian							**134,08%**
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,85	9,81	110,85%
Rata-rata Capaian							**110,85%**
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,693	0,687	99,13%
		5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	50	47,42	94,84%
Rata-rata Capaian							**96,99%**
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,811	0,81	99,88%
Rata-rata Capaian							**99,88%**
6	Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79	79,12) *	100,15%
Rata-rata Capaian							**100,15%**

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
7	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan Kualitas Hidup Masyarakat	8	Indeks Gini	Nilai	0,29	0,269	107,24%
		9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,705	0,747	105,96%
Rata-rata Capaian							**106,60%**
8	Menurunnya Pengangguran di Masyarakat	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,94	4,14	116,19%
		11	PDRB per Kapita	Nilai	187,21	254,50	135,94%
Rata-rata Capaian							**126,07%**
9	Meningkatnya Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	5,69	1,91	33,57%
Rata-rata Capaian							**33,57%**
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	2,34	3,74	159,83%
Rata-rata Capaian							**159,83%**
11	Berkembangnya Ekosistem Kreatif	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	6,11	6,96	113,91%
Rata-rata Capaian							**113,91%**
12	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	1,71	90,63	5300,00%
Rata-rata Capaian							**5300,00%**
13	Meningkatnya Kualitas Permukiman Masyarakat dan Ketersediaan Air Bersih	16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	89,32	76,68	85,84%
		17	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	90,35	93,39	103,36%
Rata-rata Capaian							**94,61%**
14	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah	18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	84,18	75,65	89,87%
Rata-rata Capaian							**89,87%**
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,14	71,77	98,13%
Rata-rata Capaian							**98,13%**
16	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	108,55	120,96	88,57%
Rata-rata Capaian							**88,57%**

) menggunakan angka kinerja tahun sebelumnya (2021), karena angka kinerja tahun 2022 belum tersedia*

Adapun pengkategorian hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran disajikan dalam Tabel 2.3.3 berikut:

Tabel 22. Pengkategorian Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata – Rata Capaian (%)	≤50%	51%≤80%	80%≤95%	≥95%
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	100,76%				Sangat Berhasil
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	1	134,08%				Sangat Berhasil
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	110,85%				Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	2	96,99%				Sangat Berhasil
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	1	99,88%				Sangat Berhasil
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	1	100,15%				Sangat Berhasil
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	2	106,60%				Sangat Berhasil
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	2	126,07%				Sangat Berhasil
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	1	33,57%	Kurang Berhasil			
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	1	159,83%				Sangat Berhasil
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	1	113,91%				Sangat Berhasil
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	1	5300,00%				Sangat Berhasil

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata – Rata Capaian (%)	≤50%	51%≤80%	80%≤95%	≥95%
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	2	94,61%			Berhasil	
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	1	89,87%%			Berhasil	
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	98,13%				Sangat Berhasil
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	1	88,57%			Berhasil	

Berdasarkan kedua tabel tersebut di atas, maka kinerja capaian Sasaran dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Capaian kinerja ≥ 95 % kategori "sangat berhasil" sebanyak 12 sasaran, atau 75%;
- Capaian kinerja 80 s/d <95% kategori "berhasil" sebanyak 3 sasaran, atau 18,75%;
- Capaian kinerja 50 s/d <80% kategori "cukup berhasil" sebanyak 0 sasaran, atau 0%; dan
- Capaian kinerja 0 s/d< 50% kategori "kurang berhasil" sebanyak 1 sasaran, atau 6,25%.

Pencapaian kinerja 16 sasaran tersebut, dikelompokkan sesuai predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 23. Predikat Nilai Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

No	Predikat Kinerja	Jumlah Sasaran	%
1	Sangat Berhasil	12	75,00%
2	Berhasil	3	18,75%
3	Cukup Berhasil	0	0,00%
4	Kurang Berhasil	1	6,25%
Jumlah		**16**	**100,00%**

Selanjutnya hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Rekapitulasi Capaian IKU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai SAKIP	Nilai	66,89	67,40	100,76%
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	6,25	8,38	134,08%
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,85	9,81	110,85%
4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,693	0,687	99,13%
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	50	47,42	94,84%
6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,811	0,81	99,88%
7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79	79,12)*	100,15%
8	Indeks Gini	Nilai	0,29	0,269	107,24%
9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,705	0,747	105,96%
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,94	4,14	116,19%
11	PDRB Per Kapita	Nilai	187,21	254,50	135,94%
12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	5,69	1,91	33,57%
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	2,34	3,74	159,83%
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	6,11	6,96	113,91%
15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	1,71	90,63	5300,00%
16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	89,32	76,68	85,85%
17	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	90,35	93,39	103,36%
18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	84,18	75,65	89,87%
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,14	71,77	98,13%
20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	108,55	120,96	88,57%

) menggunakan angka kinerja tahun sebelumnya (2021), karena angka kinerja tahun 2022 belum tersedia*

Hasil pengukuran kinerja dapat dianalisis sebagai berikut :

a. *Analisis Kinerja Sasaran 1: "Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"*

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"** dengan indikator Nilai SAKIP mencapai **100,76** dan termasuk predikat **"Sangat Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 25. Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai SAKIP	Nilai	66,89	67,40	**100,76%**

Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2023

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan metode desk evaluasi, dengan hasil capaian sebesar 67,40 Predikat B. Capaian tersebut lebih tinggi dari target kinerja RPJMD yaitu sebesar 66,89. Adapun Capaian Predikat Akuntabilitas Kinerja dalam 7 tahun terakhir ditunjukkan dalam grafik berikut:

Grafik 1. Predikat SAKIP

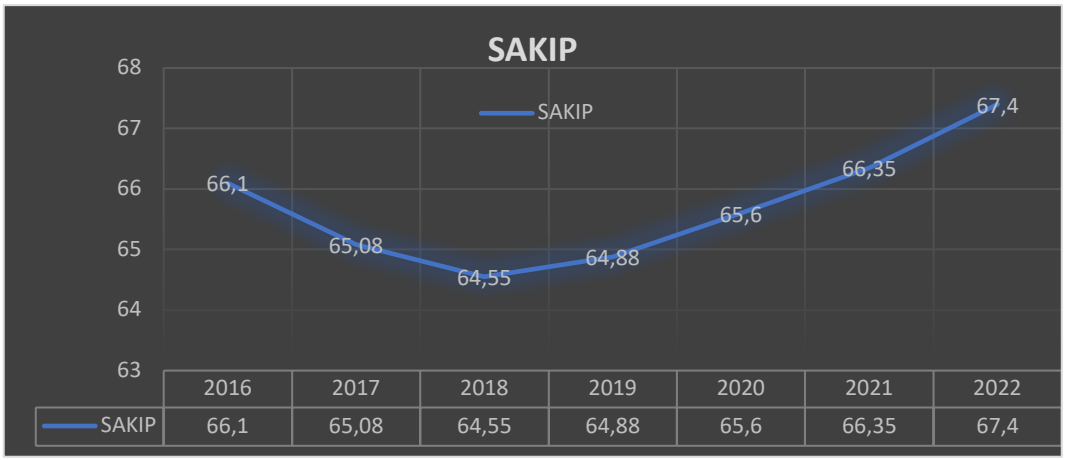

Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2016-2022

Hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

Tabel 26. Hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,43
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,97
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,40
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**67,40**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**B**

Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2023

Realisasi indkator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 27. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
1	Nilai SAKIP	Nilai	66,35	67,40	70,00	73,00	77,00	80,01

Sumber data: Kementerian PANRB

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 28. Program dan Anggaran Sasaran 1 Tahun 2022

No.	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	104.316.686.013,00	129.211.504.601,00	124.425.953.325,00	96,30%
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4.117.400.000,00	4.817.400.000,00	4.054.982.411,00	84,17%
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.945.249.440,00	3.820.249.440,00	2.914.237.243,00	76,28%
4	Program Kepegawaian Daerah	4.160.000.000,00	5.304.454.000,00	4.054.279.556,00	76,43%
TOTAL		**115.539.335.453,00**	**143.153.608.041,00**	**135.449.452.535,00**	**94,62%**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 135.449.452.535,00 dari anggaran sebesar Rp. 143.153.608.041,00 atau 94,62%. Realisasi keuangan sebesar 94,62%, dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,76%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dengan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Perumusan tujuan dan sasaran strategis RPJMD dan Renstra PD belum sepenuhnya menggambarkan outcome serta belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, relevan sehingga pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis belum dapat diukur manfaatnya kepada masyarakat.

2. Panjabaran kinerja belum berdasarkan kerangka berpikir logis (logical framework) sehingga belum tercipta hubungan kausalitas antara kinerja berjenjang, mulai perangkat daerah sampai jenjang individu.
3. Program-program prioritas belum memperhatikan mekanisme crosscutting lintas perangkat daerah. Masing-masing perangkat daerah hanya berfokus pelaksanaan program kegiatannya tanpa melihat aspek kolaborasi dengan perangkat daerah lainnya.
4. Evaluasi program, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas belum dimanfaatkan dalam memberikan informasi mengenai efektivitas dan efisiensi program terhadap capaian kinerja, belum mampu memberikan umpan balik perbaikan kinerja tahun berikutnya dan hasil evaluasi belum sepenuhnya menggambarkan kondisi penerapan SAKIP di perangkat daerah.

Beberapa rekomendasi dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, suda mulai ditindak lanjuti, antara lain:

1. Dalam Perjanjian Kinerja kepala perangkat daerah, memuat mandat tambahan dari Bupati yaitu Melaksananakan reviu awal terhadap indikator kinerja utama perangkat daerah sesuai dengan data terkini.
2. Pengumpulan data defenisi operasional dan formulasi perhitungan kinerja IKU, Program, Kegiatan sampai dengan sub kegiatan, data tersebut akan dijadikan bahan evaluasi terhadap indikator dan data-data penyusun dari capaian kinerja tersebut.
3. Proses integrasi Aplikasi SAKIP KUKAR, sedang dalam proses pengerjaan. Integrasi dilakukan dengan 2 aplikasi yaitu e-RPJMD dan e-Pantau.

4. Reward dan punishment telah dilaksanakan mulai Tahun 2022 atas pelaksanaan SAKIP Tahun 2021, saat ini sedang disusun peraturan bupati tentang evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan capaian kinerja terkair RB dan SAKIP menjadi salah satu komponen penilaian.
5. Untuk rekomendasi yang lainnya, akan dilaksanakan secara bertahap dengan pihat-pihak terkait.

b. Analisis Kinerja Sasaran 2: "Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "**Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah"** dengan indikator Indeks Persepsi Anti Korupsi mencapai **134,08%** dan termasuk predikat **"Sangat Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 29. Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	6,25	8,38	134,08%

Sumber data: Kementerian PANRB

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Penilaian terhadap Indeks Persepsi Anti Korupsi berdasarkan IPAK yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB, yang tertuang dalam Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Penilaian dilakukan dengan metode Survey Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Anti Korupsi (KPK).

Untuk Hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, mengalami peningkatan sebesar 2,16 point dari capaian tahun 2021.

Grafik 2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kabupaten/ Kota se Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

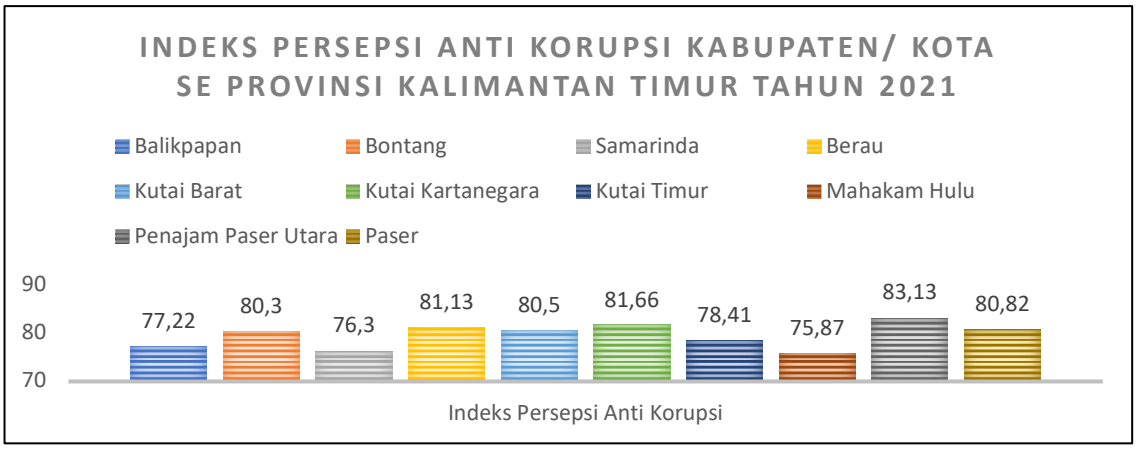

Sumber data: Kementerian PANRB

Karena belum tersedia data IPAK Kabupaten/Kota lainnya di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, maka dalam laporan ini hanya menyajikan perbandingan IPAK Tahun 2021. IPAK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021, menempati urutan tertinggi ke-2 se Provinsi Kalimantan Timur, capaian ini lebih rendah 1,47 poin dari Penajam Paser Utara. Berikut ini disajikan grafik Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kabupaten/ Kota se Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021:

Berdasarkan hasil Survey Penilaian Integritas (SPI), pada laman resmi KPK di https://www.kpk.go.id/id/, ada penurunan hasil SPI Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 4,84 poin di Tahun 2022 jika dibandingkan dengan Tahun 2021.

Grafik 3. Hasil Survey Penilaian Integritas Kab/Kota di Prov. Kalimantan Timur Tahun 2021-2022

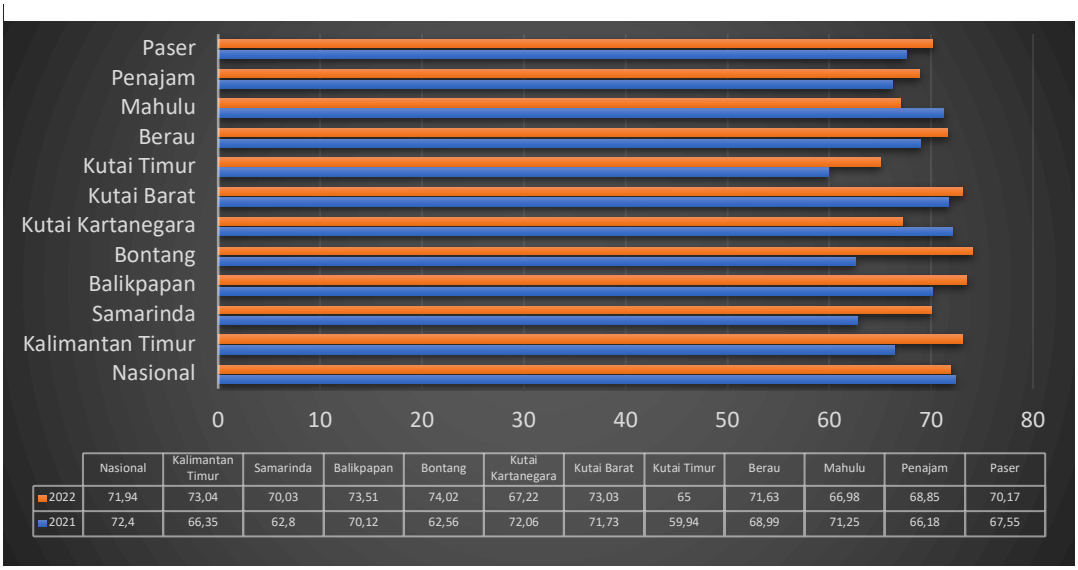

	Nasional	Kalimantan Timur	Samarinda	Balikpapan	Bontang	Kutai Kartanegara	Kutai Barat	Kutai Timur	Berau	Mahulu	Penajam	Paser
2022	71,94	73,04	70,03	73,51	74,02	67,22	73,03	65	71,63	66,98	68,85	70,17
2021	72,4	66,35	62,8	70,12	62,56	72,06	71,73	59,94	68,99	71,25	66,18	67,55

Realisasi indkator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 30. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	81,66	8,38	6,50	6,75	6,80	7,00

Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2022

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 31. Program dan Anggaran Sasaran 2 Tahun 2022

No.	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	654.217.943.856,00	698.702.605.656,00	461.079.034.985,00	65,99%
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.768.405.274,00	5.050.204.179,00	4.531.273.676,00	89,72%
3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	10.145.920.000,00	8.533.907.000,00	5.641.942.017,00	66,11%

No.	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
4	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistens	3.500.000.000,00	3.215.713.000,00	1.322.995.260,00	41,14%
TOTAL		**671.632.269.130,00**	**715.502.429.835,00**	**472.575.245.938,00**	**66,05%**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.472.575.245.938,00 dari anggaran sebesar Rp.715.502.429.835,00 atau 66,05%. Realisasi keuangan sebesar 66,05% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 134,08%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dengan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Langkah-langkah dan Upaya yang dilakukan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi:

Upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah salah satunya dilakukan melalui program Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Program ini merupakan pelaksanaan dari tugas KPK dalam koordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah, KPK berkolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian/ Lembaga yang terkait lainnya.

Implementasi pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah;

2. Pernyataan dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah;
3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah; dan
4. Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Grafik 4. Monitoring Center for Prevention KPK Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2022

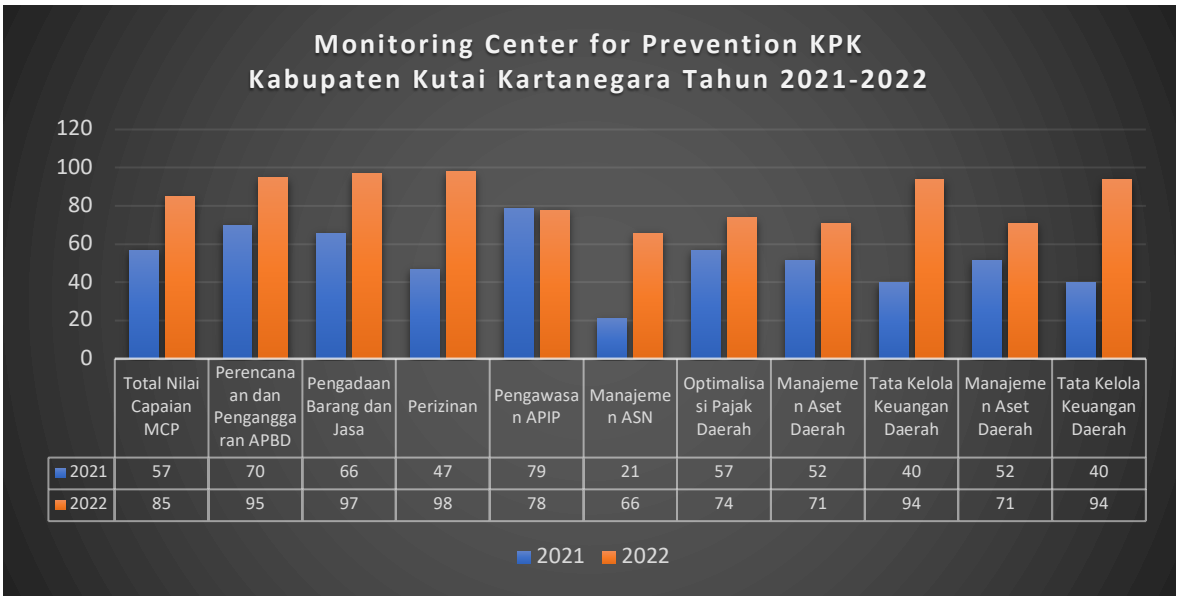

	Total Nilai Capaian MCP	Perencanaan dan Penganggaran APBD	Pengadaan Barang dan Jasa	Perizinan	Pengawasan APIP	Manajemen ASN	Optimalisasi Pajak Daerah	Manajemen Aset Daerah	Tata Kelola Keuangan Daerah	Manajemen Aset Daerah	Tata Kelola Keuangan Daerah
2021	57	70	66	47	79	21	57	52	40	52	40
2022	85	95	97	98	78	66	74	71	94	71	94

Sumber data: Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2022

Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi difokuskan pada pembangunan sistem dan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi resiko dan potensi korupsi di daerah serta dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, melalui 8 area intervensi yaitu (1) Perencanaan dan Penganggaran APBD; (2) Pengadaan Barang dan Jasa; (3) Perizinan; (4) APIP; (5) Manajemen ASN; (6) Optimalisasi Pajak Daerah; (7) Manajemen Aset Daerah; (8) Tata Kelola Dana Desa.

Hasil monitoring progress pelaksanaan aksi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada 8 area intervensi dengan bobot masing

masing, berwarna hijau menunjukkan kemajuan implementasi yang baik, yaitu lebih dari 75%. Kemajuannya setiap sistem dihitung berdasarkan kemajuan dari setiap kriteria yang terukur dan seragam di sistem tersebut.

c. Analisis Kinerja Sasaran 3: "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"** dengan indikator Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik mencapai **110,85%** dan termasuk predikat **"Sangat Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 32. Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,85	9,81	**110,85%**

Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2022

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Penilaian terhadap Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) berdasarkan IPKP yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB, yang tertuang dalam Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Capaian Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) Kabupaten Kutai Kartanegara, sebesar 98,10 atau dikonversi dalam skala 1-10, maka capaian kinerja sebesar 9,81. Jika dibandingkan dengan capaian IPKP di Tahun 2021, maka terdapat peningkatan sebesar 7,41 point, dari 90,69 ke 98,10, dan jika dibandingkan dengan terget RPJMD yaitu 8,85 maka capaian IPKP kabupaten sebesar 110,85%.

Di Tahun 2022 Kementerian PANRB telah melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, yang hasilnya tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1035 Tahun 2022 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022, dilakukan terhadap 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berikut hasil penilaian Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2022 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel 33. Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik DPM-PTSP Tahun 2022

No	Kab/Kota	DPM-PTSP		
		Peringkat Nasional	Nilai	Predikat
1.	Kutai Kartanegara	18	4,65	A
2.	Samarinda	53	4,54	A
3.	Balikpapan	62	4,53	A
4.	Bontang	147	4,2	A-
5.	Kutai Barat	253	3,73	B
6.	Berau	313	3,49	B-
7.	Penajam Paser Utara	361	3,25	B-
8.	Kabupaten Kutai Timur	411	2,98	C
9.	Kabupaten Paser	414	2,95	C
10.	Kabupaten Mahakam Ulu	494	1,55	D

Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2022

Tabel 34. Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik DISDUKCAPIL Tahun 2022

No	Kab/Kota	DISDUKCAPIL		
		Peringkat Nasional	Nilai	Predikat
1.	Samarinda	10	4,65	A
2.	Kutai Kartanegara	54	4,46	A-
3.	Balikpapan	71	4,36	A-
4.	Bontang	135	4,09	A-
5.	Berau	180	3,94	B
6.	Paser	328	3,34	B-
7.	Kutai Barat	323	3,4	B-
8.	Penajam Paser Utara	330	3,33	B-
9.	Kutai Timur	490	1,97	D
10.	Mahakam Ulu	501	1,59	D

Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2022

Di Tahun 2022 Ombudsman Republik Indonesia telah melaksanakan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada 25 Kementerian, 14 Lembaga Negara serta Pemerintah Daerah yang terdiri 98 Pemerintah Kota dan 415 Pemerintah Kabupaten, dan 34 (tiga puluh empat) Pemerintah Provinsi. Penilaian dilakukan tidak hanya atas pemenuhan standar pelayanan publik, namun termasuk juga penilaian persepsi maladministrasi kepada masyarakat pengguna layanan, pengukuran kompetensi penyelenggara layanan, pemenuhan sarana dan prasarana layanan, serta pengelolaan pengaduan yang ada di instansi tersebut. Seluruh penilaian tersebut akan menjadi komponen dari Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang nantinya akan menghasilkan Opini Pengawasan Pelayanan Publik.

Untuk level pemerintah daerah, dimensi penilaian mencakup:

1. Dimensi Input terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan;

a. Pada variabel kompetensi, diukur pengetahuan pejabat dan petugas layanan mengenai komponen standar pelayanan, tugas dan kewenangan jabatan, bentuk-bentuk maladministrasi dan pengetahuan tentang layanan yang ramah kelompok marginal/rentan;

b. Pada variabel sarana prasarana, diukur pemenuhan penjaminan mutu untuk pelayanan yang diberikan, frekuensi pengawasan internal, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, serta sarana prasarana dan fasilitas begi pengguna layanan dan pengguna dengan perlakuan khusus;

2. Dimensi Proses terdiri dari variabel standar pelayanan publik, yang mana pada variabel standar pelayanan diukur pemenuhan informasi standar pelayanan seperti persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, maklumat pelayanan, visi misi pelayanan, moto pelayanan, atribut dan pelayanan terpadu;

3. Dimensi Output terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi, yang mana pada variabel penilaian persepsi maladministrasi diukur persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pribadi mengenai transparansi standar pelayanan di instansi tersebut setelah selesai mengakses suatu layanan; dan

4. Dimensi Pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan, yang mana pada variabel pengelolaan pengaduan, diukur kewajiban pengelolaan pengaduan, pemenuhan sarana pengaduan, pembinaan terhadap pengelola pengaduan, mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan dan informasi jangka waktu penyelesaian pengaduan.

Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik, di Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Puskesmas Rapak Mahang, Puskesmas Mangkurawang. Pada lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara, yang menjadi objek penilaian terdiri dari 4 (empat) Dinas dan 2 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dengan rincian:

a. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Substansi Perizinan dan Administrasi Kesehatan);
b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Substansi Administrasi Kependudukan);
c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Substansi Pendidikan);
d. Dinas Sosial (Substansi Sosial);
e. Puskesmas Mangkurawang (Substansi Jasa Kesehatan); dan
f. Puskesmas Rapak Mahang (Substansi Jasa Kesehatan).

Hasil Penilaian merupakan penggabungan atas penilaian kompetensi penyelenggara, Standar Pelayanan dan Sarana Prasarana, Presepsi Maladministrasi, dan Pengelolaan Pengaduan. Penggabungan penilaian tersebut menghasilkan angka persentase akhir untuk masing-masing penyelenggara pelayanan dengan hasil kategorisasi penilaian akhir sebagai berikut:

Tabel 35. Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan

Interval Nilai	Kategori	Zonasi	Opini
88.00 – 100	A	Hijau	Kualitas Tertinggi
78.00 - 87.99	B	Hijau	Kualitas Tinggi
54.00 - 77.99	C	Kuning	Kualitas Sedang
32.00 - 53.99	D	Merah	Kualitas Rendah
0 - 31.99	E	Merah	Kualitas Terendah

Sumber data: Ombudsman Republik Indonesia

Adapun nilai akhir untuk Pemkab Kutai Kartanegara adalah sebesar **82,84** dengan kategori **B (Kualitas Tinggi)** dan mendapatkan **Zona Hijau** (detail rapor penilaian terlampir):

Tabel 36. Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan

No	Unit Layanan	Dimensi Pelayanan				Nilai
		Input	Proses	Output	Pengaduan	
1.	Puskesmas Rapak Mahang	20,29	30,08	21,95	21,52	93,86
2.	DPMPTSP	18,26	31,11	21,41	21,07	91,86
3.	Puskesmas Mangkurawang	18,69	30,08	21,15	19,32	89,23
4.	Disdukcapil	17,04	30,28	20,74	19,34	87,40
5.	Dinas Pendidikan	13,83	28,74	20,51	13,77	76,84
6.	Dinas Sosial	12,50	11,70	20,14	13,49	57,83
Nilai Akhir						**82,84**

Sumber data: Ombudsman Republik Indonesia

Realisasi indkator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 37. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,5	9,81	8,90	8,95	9,00	9,05

Sumber data: Kementerian PANRB

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 38.Program dan Anggaran Sasaran 3 Tahun 2022

No.	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	12.033.827.670,00	16.204.827.670,00	14.174.487.051,00	87,47%

No.	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
2	Program Pendaftaran Penduduk	575.000.000,00	657.162.000,00	489.646.129,00	74,51%
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	375.000.000,00	394.010.000,00	253.691.438,00	64,39%
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	260.000.000,00	260.000.000,00	219.214.032,00	84,31%
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	500.000.000,00	7.744.709.664,00	6.311.496.486,00	81,49%
TOTAL		**13.743.827.670,00**	**25.260.709.334,00**	**21.448.535.136,00**	**84,91%**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 21.448.535.136,00 dari anggaran sebesar Rp. 25.260.709.334,00 atau 84,91%. Realisasi keuangan sebesar 84,91% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 110,85%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Adanya komitmen dan atensi dari kepala daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan meluncurkan program prioritas yaitu Program Disapa (Program Digitalisasi Pelayanan).
2. Masih terbatasnya pengetahuan dari perangkat daerah tentang bagaimana bentuk, cara membuat dan menyusun serta menerapkan standar pelayanan.
3. Kebiasaan perangkat daerah yang sudah terbentuk lama terkadang tidak sesuai dengan standar pelayanan, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan.

Bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain:

1. Sejak 2021 sampai saat ini, setiap kepala perangkat daerah di wajibkan membuat inovasi minimal 1 inovasi setiap tahunnya, dan diperjanjikan dalam perjanjian kinerja.
2. Simultan dengan kewajiban kepala perangkat daerah dalam berinovasi, sejak 2021 telah dilaksanakan Pekan Inovasi setiap tahunnya. Pada Pekan Inovasi Tahun 2022 sebanyak 127 inovasi, yang terbagi dalam 8 kategori inovasi, yaitu Kategori perangkat daerah, kategori kecamatan, kategori kelurahan dan desa, kategori pendidikan, kategori kelompok perempuan, kategori penyandang disabilitas, kategori puskesmas. Bentuk reward bagi pemenang inovasi berupa penambahan anggaran perangkat daerah, pemberian hadiah uang tunai dan beasiswa Pendidikan bagi penyandang disabilitas.
3. Di Tahun 2023 juga telah dibangun Aplikasi "DISAPA IDAMAN", yaitu sebuah aplikasi online khusus pelayanan di kecamatan dan kelurahan, serta menjadi pintu akses kepada seluruh pelayanan online yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Aplikasi ini dibangun untuk mengatasi kondisi geografis, memberikan pelayanan jauh lebih mudah, cepat dan murah kepada masyarakat. Penekanan pelayanan yang murah lebih dititik beratkan pada murahnya *cost* yang harus dikeluarkan masyarakat dalam menerima pelayanan, karena tidak perlu mendatangi kantor/ unit pelayanan.

d. Analisis Kinerja Sasaran 4 : "Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan"** dengan indikator Indeks Pendidikan & Indeks Pembangunan Kebudayaan mencapai **96,99%** dan termasuk predikat **"Sangat Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 39. Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,693	0,687	**99,13%**
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	50	47,42	**94,84%**
Rata-rata Capaian					**96,99%**

Salah satu indeks komposit yang digunakan sebagai indikator kinerja pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks ini merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia/masyarakat di suatu wilayah. Menurut UNDP, pembangunan manusia hanya dapat direalisasikan bila penduduk dalam suatu wilayah tertentu setidaknya memiliki peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan keterampilan yang memadai dan peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan produktif sehingga memiliki daya beli. Dengan kata lain, tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut sudah dapat merefleksikan secara minimal tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah.

IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak. Setiap dimensi memiliki indeks tersendiri. Pengukuran dimensi umur panjang dan sehat menggunakan indikator umur harapan hidup (expectancy of life at birth) yang menghasilkan indeks kesehatan. Dimensi pengetahuan diukur dengan indikator rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dan indikator harapan lama sekolah dari penduduk usia 7 tahun ke atas yang menghasilkan indeks pengetahuan. Dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan yang menghasilkan indeks pendapatan.

Perkembangan angka IPM di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2010-2022 terus mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

Grafik 5. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010 - 2022

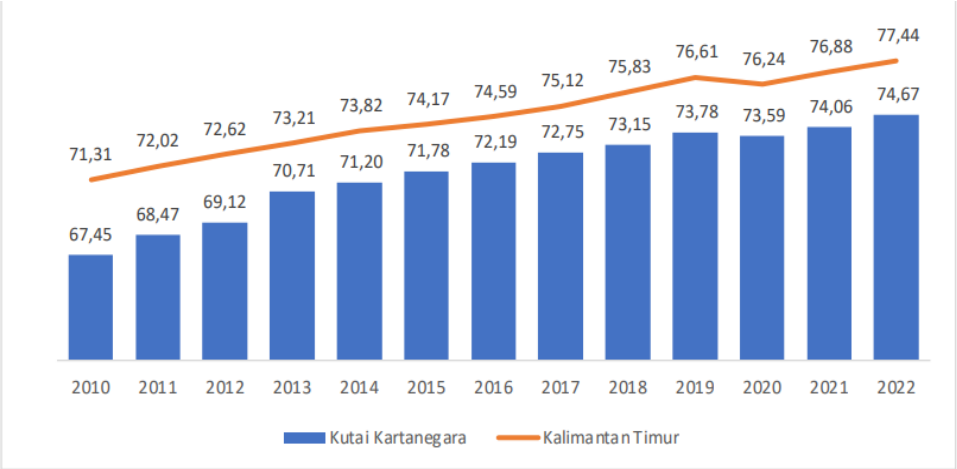

Sumber: BPS, diolah

Dengan menggunakan metode baru, pada tahun 2010 IPM Kutai Kartanegara hanya mencapai 67,45, sementara IPM Provinsi Kalimantan Timur mencapai angka yang lebih tinggi 71,31. Pada tahun 2022 IPM Kutai Kartanegara meningkat 7,22 point menjadi 74,67. Selama periode 2010-2022 IPM Kutai Kartanegara selalu

lebih rendah dari IPM Provinsi Kalimantan Timur. Kendati demikian, jika dilihat dari pertumbuhannya, IPM Kutai Kartanegara tumbuh sedikit lebih cepat dibandingkan IPM Kaltim. Selama periode 2010-2022, IPM Kutai Kartanegara tumbuh 10,70 persen sementara IPM Kaltim hanya tumbuh di kisaran 8,60 persen.

Posisi relatif pencapaian IPM di Kabupaten Kutai Kartanegara dibandingkan dengan Kabupaten Kota lain di Provinsi Kalimantan Timur selama 12 tahun terakhir ditunjukkan oleh Gambar 21. Terlihat bahwa posisi pencapaian IPM Kabupaten Kutai Kartanegara tiadk mengalami pergeseran, berada pada peringkat yang sama, tertinggi ke-5. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan upaya peningkatan angka IPM sebagaimana Kabupaten Kutai Kartanegara. Pergeseran peringkat IPM justru terlihat di wilayah dengan angka IPM yang lebih tinggi dari IPM Provinsi Kalimantan Timur.

Grafik 6. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2010 dan 2022

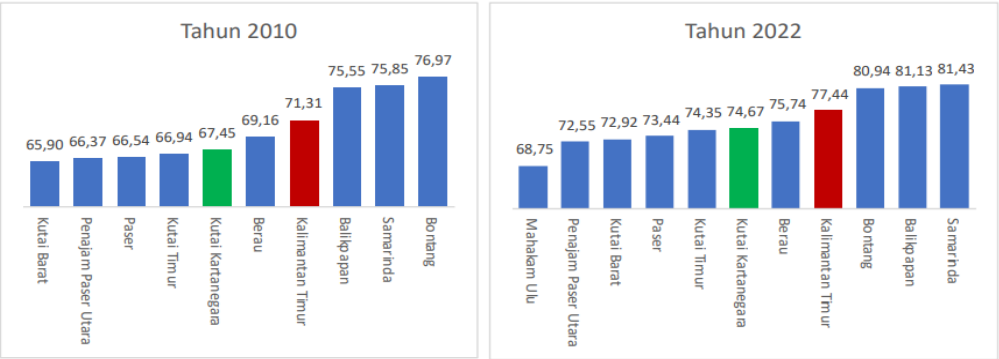

Sumber: BPS, diolah

Evaluasi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia dapat kita lihat berdasarkan capaian dari masing-masing komponen pembentuknya, yaitu indeks kesehatan, indeks pengetahuan dan indeks pendapatan.

Grafik 7. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen Pembentuk IPM 2010 dan 2022

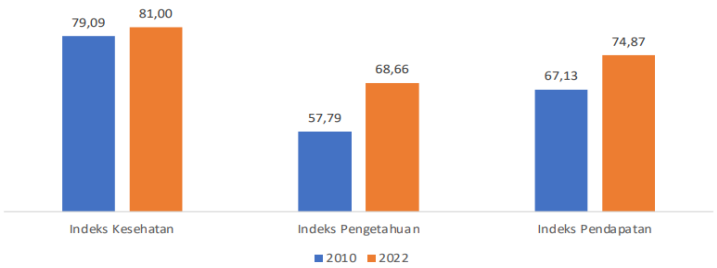

Sumber: BPS, diolah

Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara mengambil Indikator Indeks Pendidikan dalam sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan. Adapun penjelasan capaian indikator kinerja sasaran tersebut sebagai berikut:

1. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk indeks Pendidikan adalah Angka Melek Huruf dan Rata-rata lama Sekolah, namun perubahan terjadi pada indikator pembentuk indeks pengetahuan, yaitu penggunaan indikator harapan lama sekolah sebagai pengganti indikator melek huruf. Angka melek huruf mayoritas wilayah sudah berada pada capaian yang tinggi sehingga sudah tidak sensitif dan tidak relevan lagi dalam mengukur kualitas pendidikan.

Pada Tahun 2010 dalam komponen pengukuran Indeks Pembangunan Manusia, Indeks terendah dicapai oleh indeks pengetahuan, yang hanya mencapai angka 57,79. Pada tahun 2022 indeks pengetahuan meningkat 10,87 poin menjadi 68,66. Kendati memiliki nilai terendah, tetapi pertumbuhan indeks pengetahuan

merupakan pertumbuhan tercepat dibanding indeks yang lain. Selama 12 tahun, indeks pengetahuan mampu tumbuh 10,87 persen.

Indeks Pendidikan dihitung dengan menggunakan rumus:

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Keterangan:

$I_{pendidikan} = Indeks\ Pendidikan$

$I_{HLS} = Indeks\ Harapan\ Lama\ Sekolah$

$I_{RLS} = Indeks\ Rata - rata\ Lama\ Sekolah$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$$

Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Grafik 8. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2022

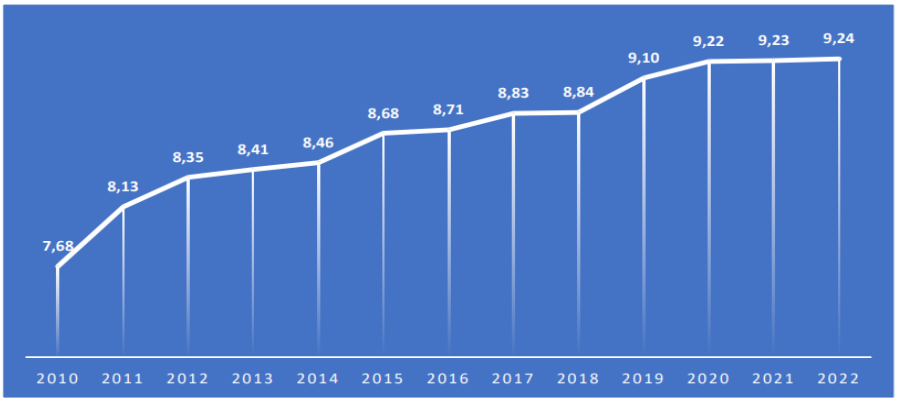

Sumber: BPS, diolah

Komponen dimensi pengetahuan dalam pembangunan manusia dihitung dengan indikator rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan

dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah tiap jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Cakupan penghitungan angka HLS adalah penduduk umur 7 tahun ke atas. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Grafik 9. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2022

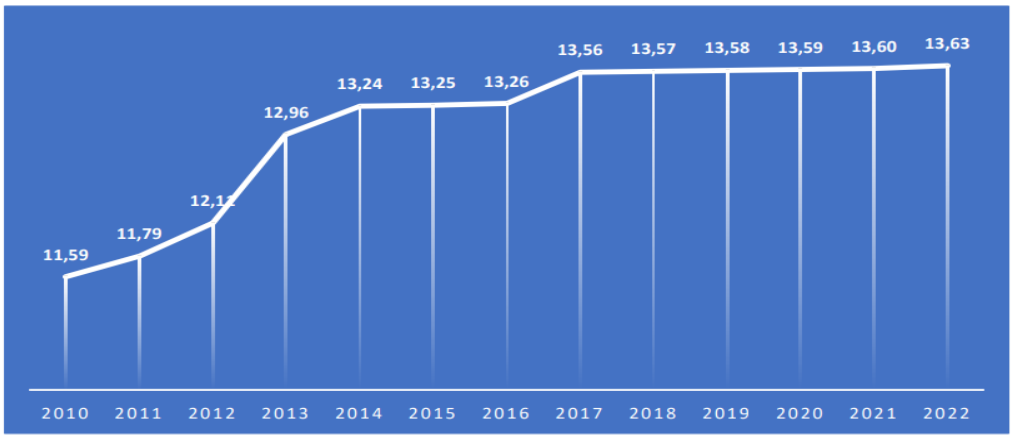

Sumber: BPS, diolah

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Selama periode 2010-2022 angka RLS mampu tumbuh 20,31 persen. Pada tahun 2010 penduduk usia 25 tahun ke atas rata-rata menjalani Pendidikan formal selama 7,68 tahun atau setara hingga kelas 1 SMP. Angka ini terus meningkat hingga 9,24 tahun di Tahun 2022, atau setara hingga kelas 3 SMP. Angka RLS meningkat rata-rata 0,13 poin per tahun atau tumbuh sekitar 1,57 persen per tahun. Indikator harapan lama sekolah juga mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah. Meskipun HLS terus meningkat namun terlihat pola peningkatan yang sedikit berbeda dengan peningkatan RLS. Angka HLS meningkat cukup signifikan pada

periode 2010-2014, namun setelah periode tersebut HLS terlihat mengalami pertumbuhan yang pelan, bahkan di periode 2017-2022 cenderung stagnan.

Grafik 10. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur, 2021

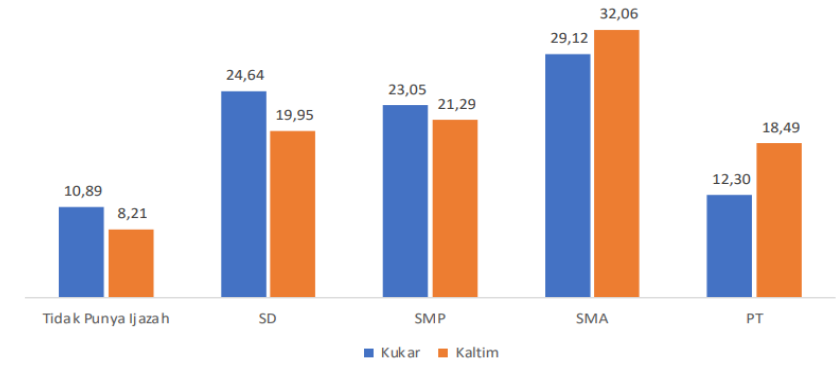

Sumber: BPS, diolah

Keberhasilan pencapaian Pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut ijazah tertinggi yang dimiliki. Terlihat di Gambar 2.3.6 bahwa tingkat pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Kutai Kartanegara lebih rendah dari tingkat pendidikan rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Kalimantan Timur. Pada tingkat pendidikan yang rendah (SMP ke bawah) persentase penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara (58,58 persen) lebih banyak daripada persentase penduduk di Provinsi Kalimantan Timur (49,45 persen). Sebaliknya, persentase penduduk yang memiliki ijazah SMA dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Kutai Kartanegara justru lebih sedikit dibanding Provinsi Kalimantan Timur. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah SMA dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Kutai Kartanegara berturut-turut sebesar 29,12 persen dan 12,30 persen. Sementara di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 32,06 persen (SMA) dan 18,49 persen (Perguruan Tinggi).

Berdasarkan penjelasan diatas maka Indeks Pendidikan/ Indeks Pengetahuan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, diperoleh dengan perhitungan:

$$I_{pendidikan} = \frac{0{,}616 + 0{,}7572}{2}$$

$$I_{pendidikan} = 0{,}687$$

2. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor.

Adapun capaian Dimensi penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Dimensi Ekonomi Budaya

21 % Pelaku seni dari 18 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang sumber penghasilannya diperoleh dari keterlibatan sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni. Capaian 21 % ini masih dibawah capaian Provinsi Kalimantan Timur yaitu 29,65 %.

b. Dimensi Pendidikan

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang inklusif agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam bidang Seni, Budaya, dan Bahasa. Sebanyak 25,91% Satuan pendidikan yang mempunyai guru muatan lokal bahasa daerah dan ekstra kurikuler kesenian.

c. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya

Kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat. Pada dimensi ketahanan sosial budaya yang terdiri atas delapan dimensi ini, indikator persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal menyumbang angka terbesar 94.33 %. Keragaman suku ini hidup berdampingan secara rukun di Kutai Kartanegara, tanpa pernah menimbulkan konflik yang eskalatif. Nilai 94,33% diperoleh dari 91,72 % Setuju agama lain berkegiatan; 94,33 % Setuju suku lain berkegiatan; 88,67 % Setuju

bersahabat dengan agama lain; 93,20 % Setuju bersahabat dengan suku lain; 88,47 % Berkegiatan di masyarakat; 59,24 % Bergotong royong; 10,98% Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir dan 59,61 % Persentase masyarakat yang merasa aman menitipkan rumah kepada tetangga.

d. Dimensi Warisan Budaya

Upaya yang dilakukan seluruh pihak (masyarakat dan pemerintah) terhadap pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya. 6,06% Cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi; 91,44% Warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi; 38,26% Penduduk mengunjungi peninggalan sejarah; 25,76% Penduduk menggunakan Bahasa daerah; 34,60% Penduduk menonton pertunjukan seni; 87,41% Penduduk menggunakan produk tradisional.

e. Dimensi Ekspresi Budaya

Segala aktivitas yang dilakukan untuk mendukung proses penciptaan karya budaya yang dihasilkan masyarakat. 58,90% Penduduk memberikan saran atau pendapat dalam rapat; 17,29% Penduduk terlibat dalam pertunjukan seni; 35% Penduduk aktif berorganisasi; 19,60% Penduduk menyelenggarakan upacara adat.

f. Dimensi Literasi

Aktivitas serta sarana/prasarana pendukung dalam memperoleh, menguji kesahihan, dan menghasilkan informasi dan pengetahuan untuk pemberdayaan kecakapan masyarakat. 15,69 % penduduk membaca literatur selain kitab suci; 80,02 % penduduk mengakses internet; 14,12 % penduduk yang mengunjungi perpustakaan/taman bacaan.

g. Dimensi Kesetaraan Gender

Persamaan hak, tanggung jawab dan peluang yang setara antara perempuan dan laki-laki di ruang publik untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. 18,42% Rasio Anggota Parlemen Perempuan dan laki-laki; 77,99% Rasio Angkatan Kerja Perempuan dan laki-laki; 44,10% Rasio Ijazah Perempuan terhadap laki-laki.

Berdasarkan data capaian per dimensi diatas, maka Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 sebesar 47,42. Capaian ini lebih rendah dari capaian IPK Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 52,49. Adapun rincian capaian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 40. Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Dimenasi	Nilai Indeks	
	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur
Ekonomi Budaya	21,00	29,65
Pendidikan	74,25	72,20
Ketahanan Sosial Budaya	73,28	72,46
Warisan Budaya	47,25	37,44
Ekspresi Budaya	32,70	24,33
Budaya Literasi	36,60	60,09
Gender	46,84	55,88
IPK Total	**47,42**	**52,49**

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Realisasi indkator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 41. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,685	0,687	0,697	0,700	0,704	0,706
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	n.a	47,42	50,50	51,00	51,50	53,00

Sumber data: BPS dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 42. Program dan Anggaran Sasaran 4 Tahun 2022

No.	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pengelolaan Pendidikan	290.599.954.000,00	335.062.445.944,00	175.100.340.860,32	52,26%
2	Program Pengembangan Kurikulum	200.000.000,00	200.000.000,00	151.154.774,00	75,58%
3	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	100.000.000,00	100.000.000,00	99.915.000,00	99,92%
4	Program Pengembangan Kebudayaan	4.500.000.000,00	4.700.000.000,00	4.691.516.014,00	99,82%
5	Program Pemberdayaan Sosial	670.000.000,00	1.295.000.000,00	1.248.556.776,00	96,41%
6	Program Rehabilitasi Sosial	1.714.600.000,00	2.196.935.000,00	1.855.233.526,00	84,45%
7	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	8.343.886.000,00	9.212.280.500,00	5.878.578.131,00	63,81%
8	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	46.600.332.448,00	57.102.070.467,00	48.829.016.691,00	85,51%
TOTAL		**352.728.772.448,00**	**409.868.731.911,00**	**237.854.311.772,32**	**58,03%**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 237.854.311.772,32 dari anggaran sebesar Rp. 409.868.731.911,00 atau 58,03%.

Realisasi keuangan sebesar 58,03% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 96,99%%, maka terjadi ketidak efisiensian penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, walaupun penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Sudah tersedianya lembaga pendidikan jenjang pada setiap desa
2. Adanya pembebasan biaya pendidikan sampai jenjang pendidikan menengah dan adanya beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa Kutai Kartanegara dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia
3. Kondisi geografis sebagian wilayah Kutai Kartanegara yang sulit dijangkau, juga mempengaruhi masyarakat dalam mengakses pendidikan.
4. Masih rendahnya kesadaran penduduk di wilayah tertentu terutama pada wilayah perkebunan dan kampung nelayan untuk bersekolah/ kuliah, masyarakat lebih mementingkan bekerja dan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.
5. Terkait pembangunan kebudayaan adanya prioritas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan kualitas pembangunan kebudayaan. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki banyak warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan secara nasional.
6. Situasi kerukunan umat beragama, suku, ras, dan golongan di wilayah ini juga sangat baik, bahkan belum pernah terjadi konflik yang eskalatif.
7. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mendorong lahirnya pelaku seni yang menjadikan kesenian sebagai sumber penghasilan utama dengan memberi pelatihan, sponsorship, publikasi, hingga promosi.

8. Peningkatan minat baca dengan menyediakan beragam buku bacaan, pustakawan, dan sarana prasarana penunjang di tiap perpustakaan kecamatan, kelurahan, dan desa.

Komitmen dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan indeks Pendidikan salah satunya menjadikan Program Beasiswa Idaman dan Program 1000 guru sarjana, menjadi program dedikasi/ prioritas. Beasiswa 1000 Guru Sarjana dibagi dalam 3 kategori yaitu beasiswa guru non PNS/ Tenaga Pendidik, Beasiswa Calon Guru dan Beasiswa Pasca Sarjana (S2 dan S3), sedangkan Beasiswa Kukar Idaman dibagi dalam 7 kategori yaitu Beasiswa Berkebutuhan Khusus, Beasiswa Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan/ Madrasah, Beasiswa Santri Pondok Pasantren, Beasiswa Stimulan (S1), Beasiswa Khusus (Yatim Piatu terdampak covid-19) Beasiswa Santri Lanjut Perguruan Tinggi dan Beasiswa Tematik.

e. Analisis Kinerja Sasaran 5: "Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat"** dengan indikator Indeks Kesehatan mencapai **99,88%** dan termasuk predikat **"Sangat Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 43. Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,811	0,81	**99,88%**

Pengukuran dimensi umur panjang dan sehat menggunakan indikator umur harapan hidup (expectancy of life at birth) yang menghasilkan indeks kesehatan, merupakan salah satu dimensi dari Indeks Pembangunan Manusia.

Untuk mengukur capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan indikator Indeks Kesehatan. Indeks Kesehatan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$$

Grafik 11. Indeks Kesehatan Kabupaten Kutai kartanegara 2010 dan 2022

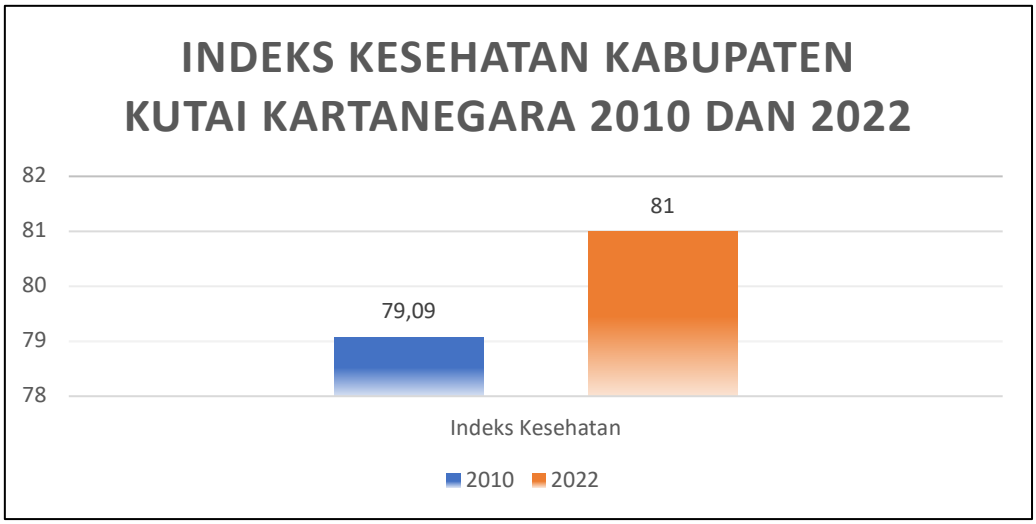

Capaian indeks kesehatan pada Tahun 2010 berada pada angka 79,09. Dibanding indeks yang lain, capaian indeks kesehatan merupakan capaian yang tertinggi. Pada tahun 2022 angka indeks kesehatan bisa mencapai 81,00 atau meningkat 1,91 poin. Kendati merupakan capaian tertinggi, namun jika dilihat dari

pertumbuhannya, indeks kesehatan tumbuh sangat lambat. Selama 12 tahun, indeks kesehatan hanya tumbuh 2,41 persen.

Angka Harapan Hidup

Komponen umur panjang dan hidup sehat diukur dengan indikator angka harapan hidup saat lahir (*expectation of life at birth*). Angka harapan hidup menggambarkan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk (dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas). Semakin tinggi capaian indikator angka harapan hidup (AHH) maka semakin tinggi kemampuan manusia di suatu wilayah untuk hidup lebih lama.

Grafik 12. Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2022

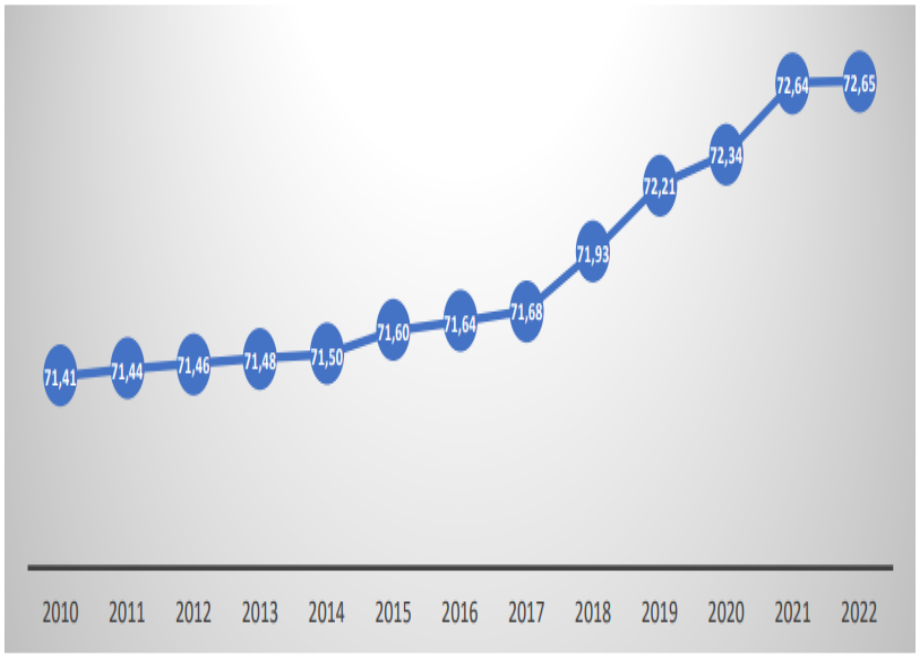

Sumber: BPS, diolah

Pada tahun 2010 perkiraan rata-rata umur yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 71,41 tahun. Angka ini terus meningkat hingga mencapai 72,65 tahun pada tahun 2022. Selama periode 2010-

2022, angka harapan hidup tumbuh sangat lambat hanya 1,74 persen. Secara rata-rata per tahun angka harapan hidup hanya meningkat 0,10 tahun atau tumbuh 0,14 persen per tahun. Peningkatan AHH terbesar justru terjadi pada tahun 2021. AHH meningkat dari 72,34 (2020) menjadi 72,64 (2021) atau meningkat sebesar 0,30 tahun.

Angka harapan hidup sangat bergantung pada tingkat kematian bayi yang terjadi di suatu wilayah. Salah satu faktor yang mempengaruhi kematian bayi adalah penolong persalinan. Bayi yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis (dokter atau bidan) memiliki peluang hidup lebih tinggi dibanding yang ditolong oleh dukun atau lainnya, selain tenaga medis. Berdasarkan hasil Susenas 2021 terlihat bahwa persentase wanita usia subur (15-49 tahun) yang pernah kawin dan melahirkan hidup yang persalinannya ditolong oleh dukun (7,40 persen) di Kabupaten Kutai Kartanegara masih lebih tinggi dari rata-rata persentase Provinsi Kalimantan Timur (hanya 2,38 persen). Dimungkinkan ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi lambatnya pertumbuhan angka harapan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Grafik 13. Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun Yang Pernah kawin dan melahirkan hidup berdasarkan penolong persalinan di Kab.Kutai Kartanegara dan Provinsi Kaltim, 2021

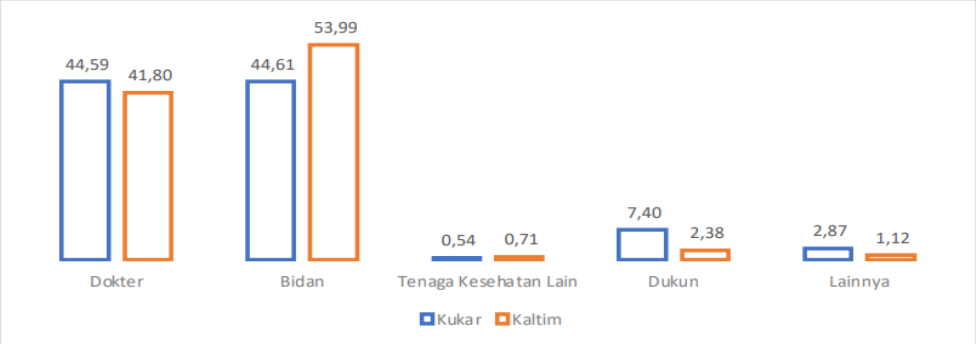

Sumber: BPS, diolah

Realisasi indkator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 44. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,81	0,81	0,814	0,817	0,821	0,824

Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS)

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 45. Program dan Anggaran Sasaran 5 Tahun 2022

No.	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	171.370.422.999,00	190.239.900.972,00	167.759.528.323,00	88,18%
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	417.228.390,00	39,74%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	741.834.000,00	1.137.714.000,00	745.886.930,00	65,56%
TOTAL		**173.162.256.999,00**	**192.427.614.972,00**	**168.922.643.643,00**	**87,79%**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.168.922.643.643,00 dari anggaran sebesar Rp.192.427.614.972,00 atau 87,79%. Realisasi keuangan sebesar 87,79% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99,88%, maka terjadi ketidak efisiensian penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, dan walaupun penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelayanan kesehatan masyarakat susah untuk diakses secara merata di seluruh wilayah.
2. Belum tersedia secara merata dan lengkapnya sarana prasarana Kesehatan maupun SDM Kesehatan di seluruh unit-unit layanan Kesehatan masyarakat.

Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memecahkan permasalahan ini antara lain:

1. Perbaikan sarana prasarana Kesehatan dengan membangun dan memperbaiki kondisi Banguan Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Terhadap kesenjangan SDM Kesehatan, maka dijadwalkan secara rutin kunjungan Dokter Spesialis ke Puskesmas-puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartenegara menambahkan indikator kinerja tambahan terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di kabupaten, dan indikator kinerja tambahan di bawah koordinasi kecamatan antara lain meningkatnya indeks Kesehatan keluarga di kecamatan, terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di kecamatan, menurunnya angka kematian ibu, mewujudkan desa/kelurahanstop buang air besar sembarangan (SBS), meningkatnya posyandu aktif. Serta mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah, menjadi sasaran tambahan dalam perjanjian kinerja seluruh kepala perangkat daerah.

f. Analisis Kinerja Sasaran 6: "Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan"** dengan indikator Indeks Pembangunan Gender mencapai **100,15%** dan termasuk predikat **"Sangat Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 46. Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79	79,12	**100,15%**

Sumber data: Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia.

Rumusan: IPG = IPM perempuan / IPM laki-laki

Untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan.

Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), (ii) Pengetahuan (*knowledge*), dan (iii) Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Grafik 14. Indeks Pembangunan Gender Kab/Kota di Kaltim

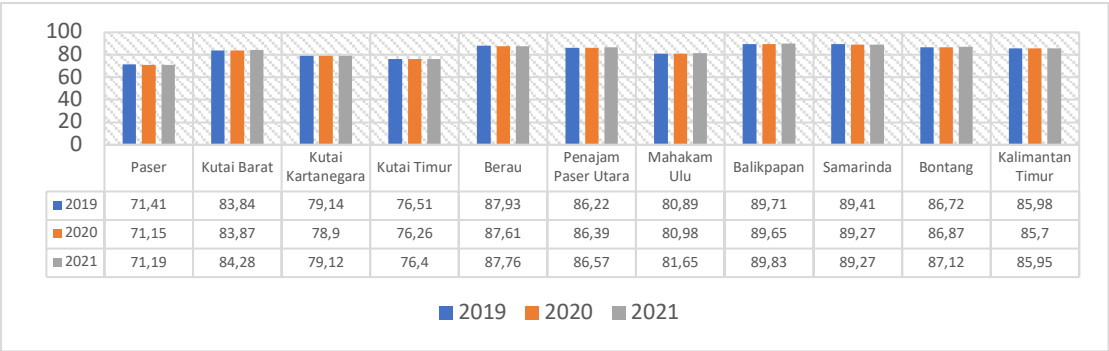

Realisasi indkator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 47. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
6	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,12	79,12) *	79,05	79,10	79,15	79,20

) menggunakan angka kinerja tahun sebelumnya (2021), karena angka kinerja tahun 2022 belum tersedia*
Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS)

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 48. Program dan Anggaran Sasaran 6 Tahun 2022

No.	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	725.000.000,00	725.000.000,00	706.017.463,00	97,38%
2	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	250.000.000,00	495.000.000,00	414.361.050,00	83,71%
3	Program Perlindungan Khusus Anak	315.000.000,00	540.000.000,00	415.791.509,00	77,00%
TOTAL		**1.290.000.000,00**	**1.760.000.000,00**	**1.536.170.022,00**	**87,28%**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 1.536.170.022,00 dari anggaran sebesar Rp. 1.760.000.000,00 atau 87,28%. Realisasi keuangan sebesar 87,28% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,15%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Kondisi ketimpangan gender utamanya dapat dilihat dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kemampuan ekonomi. Perempuan yang berdaya salah satunya dapat dilihat dari kondisi finansial. Tak dapat dipungkiri lagi, keterbatasan kontribusi perempuan dalam perekonomian terjadi karena adanya diskriminasi gender dalam pasar tenaga kerja. Jika hal ini masih terus terjadi, kesetaraan gender dalam penciptaan pendapatan tampaknya tidak akan mudah dicapai.

Kutai kartanegara telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, adanya perda ini bertujuan

memberikan acuan dalam Menyusun strategi pengintegrasian gender atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, mewujudkan perencanaan berpresfektif gender, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsive gender, meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peran dan tanggung jawab, memperkuat pemberdayaan perempuan, meningkatkan dan mendorong peran aktif Lembaga non pemerintahan dan masyarakat yang menangani pembangunan gender di daerah.

g. *Analisis Kinerja Sasaran 7: "Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan Kualitas Hidup Masyarakat"*

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "**Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan Kualitas Hidup Masyarakat"** dengan indikator Indeks Gini dan Indeks Desa Membangun mencapai **106,60%** dan termasuk predikat **"Sangat Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 49. Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
8	Indeks Gini	Nilai	0,29	0,269	**107,24%**
9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,705	0,747	**105,96%**
Rata-rata Capaian					**106,60%**

Sumber data: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Indeks Gini

Angka realisasi 2022 Indeks Gini atau Gini Ratio terealisasi sebesar 0,269 dari target tahun 2022 sebesar 0,29 sehingga capaiannya adalah sebesar 107,24 %. Angka tersebut lebih kecil apabila dibandingkan angka Indeks Gini nasional

sebesar 0,381 (pada September 2022), dan juga lebih rendah dari Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,327 (data BPS Kalimantan Timur per Maret 2022).

Indeks Gini merupakan tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan dengan kriteria G<0,30 berarti ketimpangan rendah; 0,30≤G≤0,50 berarti ketimpangan sedang dan G>0,50 berarti ketimpangan tinggi. Nilai Indeks Gini berkisar 0 hingga 1. Jika mendekati 1 maka ketimpangan pendapatan penduduk makin lebar. Jika mendekati 0, maka distribusi pendapatan makin merata. Realisasi Indeks Gini tersebut menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada kriteria ketimpangan rendah.

Grafik 15. Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2022

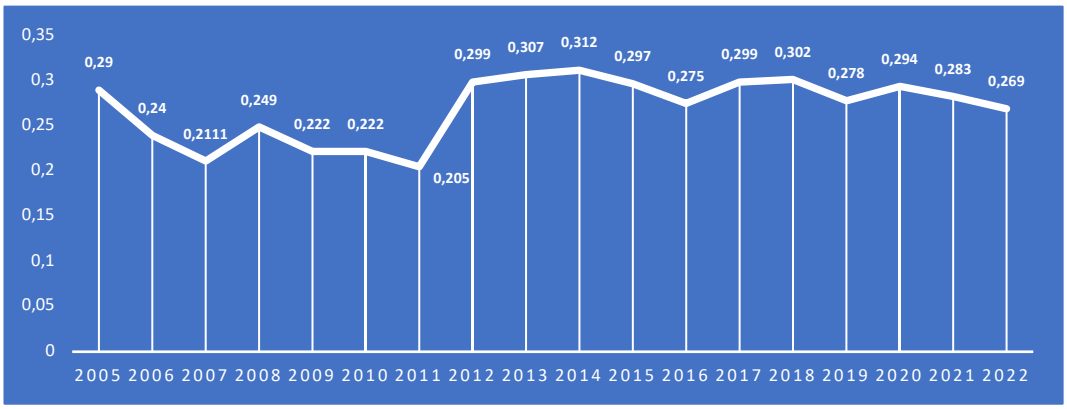

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

Perkembangan gini ratio di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan kondisi yang berfluktuatif. Pada awal periode tahun 2005 gini ratio di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 0,290. Menurut Oshima (1976), angka ini termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. Gini ratio terus menurun meskipun berfluktuatif hingga mencapai nilai terendah pada tahun 2011 sebesar 0,205. Pada

tahun 2012 gini ratio meningkat tajam menjadi 0,299 dan terus meningkat hingga mencapai 0,312 pada tahun 2014. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di antara penduduk semakin melebar dibanding kondisi periode 2005-2011. Pada periode berikutnya, 2015 hingga 2016, angka gini ratio sempat turun hingga mencapai 0,275 namun kembali meningkat di tahun 2017 dan 2018. Meskipun sempat turun di tahun 2019 namun karena pandemi Covid-19 angka gini ratio kembali meningkat di tahun 2020. Pada periode 2012 hingga 2021 dapat dikatakan gini ratio cenderung turun melambat meskipun berfluktuatif. Gini ratio tahun 2022 di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai angka 0,269 yang menunjukkan kondisi pemerataan yang lebih baik dibanding awal periode tahun 2021, karena mengalami penurunan 0,014.

Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2022, jika dibandingkan dengan Indeks Gini kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 16. Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2022

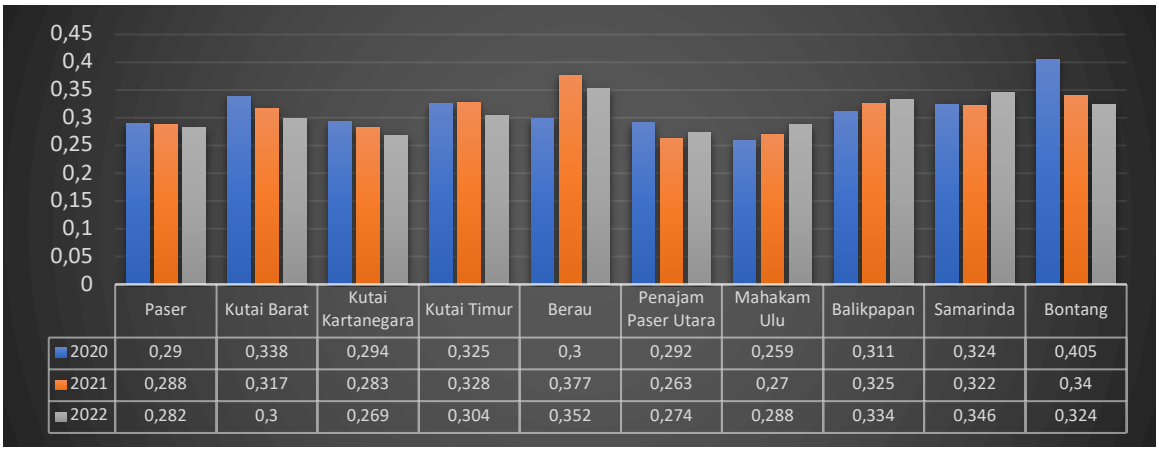

	Paser	Kutai Barat	Kutai Kartanegara	Kutai Timur	Berau	Penajam Paser Utara	Mahakam Ulu	Balikpapan	Samarinda	Bontang
2020	0,29	0,338	0,294	0,325	0,3	0,292	0,259	0,311	0,324	0,405
2021	0,288	0,317	0,283	0,328	0,377	0,263	0,27	0,325	0,322	0,34
2022	0,282	0,3	0,269	0,304	0,352	0,274	0,288	0,334	0,346	0,324

Sumber data: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya rasio gini, pertama yakni kesempatan yang tidak sama bagi masyarakat untuk mengakses pendididikan dan

kesehatan. Hal itu telah menciptakan kemiskinan yang menurun. Kedua, pasar tenaga kerja yang tidak seimbang, yakni pekerja informal bergaji sangat minim, sedangkan pekerja formal memiliki gaji ‘selangit’. Ketiga, distribusi kekayaan yang tidak merata.

Beberapa usaha telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menekan tingkat kesenjangan, salah satunya pengentasan kemiskinan ekstrem, salah satunya melalui inovasi Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK: https://rbpk.kukarkab.go.id/) Kutai Kartanegara, agar meningkatkan *Colaboratif Working* antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, pemerintah desa dan keterlibatan non pemerintah. Beberapa program antara lain Program Sanitasi Aman, Program

Yok Baiki Rumah, Program Air Bersih, Program Pondok Pangan Etam. Program Nyaman Be’jukut, Program Pendidikan Keaksaraan Dasar, Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM), Program Pendidikan Kecakapan Hidup, Program Pendidikan Kesetaraan Paket A s/d C, Program Bantuan Alat Bantu Aksesibilitas, Program Bantuan Pangan. Melalui program-program ini nantinya diharapkan bisa mencapai Kemiskinan 0% pada tahun 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga dibutuhkan kolaborasi semua stakeholder serta meningkatkan partisipasi pihak swasta dalam pengentasan kemiskinan.

Selain itu program jaring pengaman sosial, juga akan sangat mempengaruhi penurunan gini ratio. Melalui Pragram Rehabilitasi Sosial Pemda Kutai Kartanegara telah melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi di luar panti, sebanyak 21.412 atau tercapai 97,62% dari yang ditergetkan sebesar 21.931 di Tahun 2022. Melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dilaksanakan dengan kegiatan Pemenuhan kebutuhan dasar: pemberian pangan, sandang, kesehatan (Penerima Bantuan Iuran / BPJS) bagi masyarakat miskin non potensial kepada 7.218 atau 89,95% dari target 2022 sebanyak 8.057.

Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu :

a. **Indeks Ketahanan Sosial**, meliputi Pendidikan, Kesehatan, Modal Sosial, Permukiman
b. **Indeks Ketahanan Ekonomi**, meliputi Keragaman Produksi Masyarakat, Akses Pusat Perdagangan dan Pasar, Akses Logistik, Akses Perbankan dan Kredit, Keterbukaan Wilayah
c. **Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan**, meliputi Kualitas Lingkungan, Bencana Alam, Tanggap Bencana

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi,

dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Adapun Indeks Desa Membangun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 50. Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Status Desa					IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	Nilai IDM 2022	Status IDM 2022
			ST	T	B	Mju	Mdri					
1	Muara Muntai	13	0	0	4	5	4	0,8251	0,6346	0,8205	0,7600	Maju
2	Loa Kulu	15	0	0	1	4	10	0,8865	0,7456	0,8578	0,8299	Mandiri
3	Loa Janan	8	0	0	0	4	4	0,8857	0,7625	0,7917	0,8133	Maju
4	Anggana	8	0	0	4	3	1	0,7879	0,6146	0,7667	0,7231	Maju
5	Muara Badak	13	0	0	2	5	6	0,8558	0,6731	0,8205	0,7831	Maju
6	Tenggarong	2	0	0	0	2	0	0,8543	0,5917	0,8334	0,7598	Maju
7	Sebulu	14	0	0	6	6	2	0,8551	0,7155	0,6714	0,7474	Maju

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Status Desa					IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	Nilai IDM 2022	Status IDM 2022
			ST	T	B	Mju	Mdri					
8	Kota Bangun	21	0	0	13	6	2	0,7921	0,6310	0,6921	0,7050	Berkembang
9	Kenohan	9	0	0	7	2	0	0,8064	0,6370	0,6667	0,7033	Berkembang
10	Kembang Janggut	11	0	0	0	10	1	0,8234	0,7212	0,8061	0,7835	Maju
11	Muara Kaman	20	0	0	10	6	4	0,7989	0,6908	0,7067	0,7321	Maju
12	Tabang	19	0	0	14	5	0	0,7588	0,5912	0,6491	0,6664	Berkembang
13	Samboja	4	0	0	1	3	0	0,8329	0,6334	0,7667	0,7443	Maju
14	Tenggarong Seberang	18	0	0	1	7	10	0,8791	0,7630	0,7704	0,8041	Maju
15	Marang Kayu	11	0	0	7	3	1	0,8447	0,6500	0,5879	0,6942	Berkembang
16	Muara Wis	7	0	0	4	2	1	0,8033	0,5976	0,8000	0,7336	Maju
TOTAL		**193**	**0**	**0**	**74**	**73**	**46**	**0,8271**	**0,6734**	**0,7389**	**0,7465**	**Maju**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Grafik 17. Indeks Desa Membangun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2022

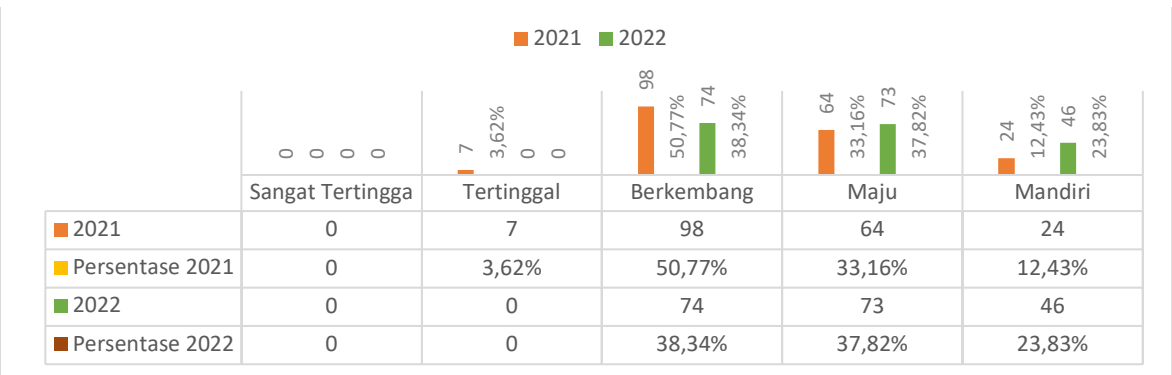

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi indkator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 51. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
8	Indeks Gini	Nilai	0,283	0,269	0,280	0,270	0,270	0,270
9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,713	0,747	0,725	0,745	0,765	0,785

Sumber data: Kementerian PANRB

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 52. Program dan Anggaran Sasaran 7 Tahun 2022

No.	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.903.478.400,00	3.470.109.800,00	3.151.409.368,00	90,82%
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	9.452.607.428,00	13.600.746.881,00	11.551.469.846,00	84,93%
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.710.000.000,00	1.710.000.000,00	1.621.975.101,00	94,85%
4	Program Penataan Desa	350.000.000,00	429.900.000,00	265.576.400,00	61,78%
5	Program Peningkatan Kerjasama Desa	300.000.000,00	350.000.000,00	256.234.000,00	73,21%
TOTAL		**13.716.085.828,00**	**19.560.756.681,00**	**16.846.664.715,00**	**86,12%**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 16.846.664.715,00 dari anggaran sebesar Rp. 19.560.756.681,00 atau 86,12%. Realisasi keuangan sebesar 86,12% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 106,60%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Tersedianya pendamping desa baik dari Kementerian Desa dan Kabupaten, dapat membantu memberdayakan masyarakat desa, meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintah dan pembangunan di desa. meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan peran serta masyarakat desa dalam

pembangunan di desa, meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor dan mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

2. Adanya kesadaran pemerintah desa terkait prestasi kinerja pemerintah desa dalam pencapain status desa. Adanya *reward* yang diberikan oleh pemerintah pusat bagi Desa yang berhasil menjadi Desa Mandiri juga memberi pengaruh yang cukup positif bagi desa serta ketersediaan anggaran yang memadai mandaji faktor pendukung tercapainya sasaran ini.
3. Namun dibalik semua faktor yang mendukung keberhasilan, masih ditemukan adanya sebagian kecil kepala desa yang engan meningkat/berubah status desanya dikarenakan ada ketakutan pengurangan anggaran desa.
4. Kondisi geografik Kabupaten Kutai Kartanegara yang sangat luas juga mempengaruhi pemerataan pembangunan seperti masih minimnya akses internet, layanan Kesehatan bagi desa-desa tertinggal.
5. Kurangnya pemahaman Kepala Desa tentang Teknis Pengisian Form Quisioner penilaian indeks desa membangun terutama terkait dengan kondisi sarana prasarana yang dimiliki desa.

h. Analisis Kinerja Sasaran 8: "Menurunnya Pengangguran di Masyarakat"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **"Menurunnya Pengangguran di Masyarakat"** dengan indikator **Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB per Kapita** mencapai **126,07%** dan termasuk predikat **"Sangat Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 53. Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,94	4,14	116,19%
11	PDRB Per Kapita	Nilai	187,21	254,50	135,94%
Rata-rata Capaian					**126,07%**

Tingkat Pengangguran Terbuka

Permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah di bidang ketenagakerjaan adalah meningkatnya pengangguran. Pengangguran terjadi ketika jumlah angkatan kerja yang ada, belum atau tidak terserap sepenuhnya oleh lapangan pekerjaan yang tersedia. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat besarnya tingkat pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT diperoleh dengan membagi antara jumlah pengangguran (penduduk yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan) dengan jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja yang bekerja dan pengangguran). Ukuran ini dapat digunakan untuk melihat seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap di dalam pasar kerja.

Tabel 54. Jumlah dan Perubahan Pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara 2017-2021

Tahun	Pengganguran	
	Jumlah Orang	Perubahan (Orang)
2010	33.980	
2011	23.530	-10.450
2012	23.977	447
2013	22.215	-1.762
2014	24.381	2.166
2015	31.397	7.016

Tahun	Pengganguran	
	Jumlah Orang	Perubahan (Orang)
2017	19.473	-11.924
2018	21.361	1.888
2019	22.607	1.246
2020	20.497	-2.110
2021	21.544	2.047

Sumber : BPS Kutai Kartanegara

Selama 1 dekade terakhir, jumlah pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Jumlah pengangguran tercatat berkisar antara 20-35 ribu, dimana jumlah tertinggi tercatat pada tahun 2010 yang mencapai 33.980 orang dan terendah tercatat pada tahun 2017 sebanyak 19.473 orang. Penduduk yang terkategori sebagai pengangguran adalah mereka yang tergolong dalam usia kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, tidak bekerja dan sedang mempersiapkan usaha, tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (discouraged workers), serta tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (future starters). Jumlah penganggur yang juga tercatat cukup tinggi terjadi pada tahun 2015 yang mencapai 31.397 orang. Perubahan jumlah pengangguran setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 2. Pada tahun 2011, jumlah pengangguran tercatat berkurang sebanyak 10.450 orang dibandingkan dengan kondisi tahun 2010. Kemudian pada tahun 2013 berkurang sebanyak 1,762 orang, tahun 2017 berkurang sebanyak 11.924 orang, dan tahun 2020 juga berkurang sebanyak 2.110 orang. Namun demikian, pada beberapa tahun juga terjadi penambahan jumlah pengangguran meskipun secara angka tidak terlalu

besar. Penambahan jumlah pengangguran ini terjadi pada tahun 2012, 2014, 2015, 2018, 2019, dan 2021. Penambahan pengangguran ini banyak terjadi pada tahun dimana ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kondisi yang kurang baik. Dengan melihat data diatas, maka secara rata-rata, jumlah pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara berkurang sebanyak 1.131 orang setiap tahunnya.

Grafik 18. Perkembangan TPT Kab. Kutai Kartanegara dan Prov. Kaltim, 2011-2022

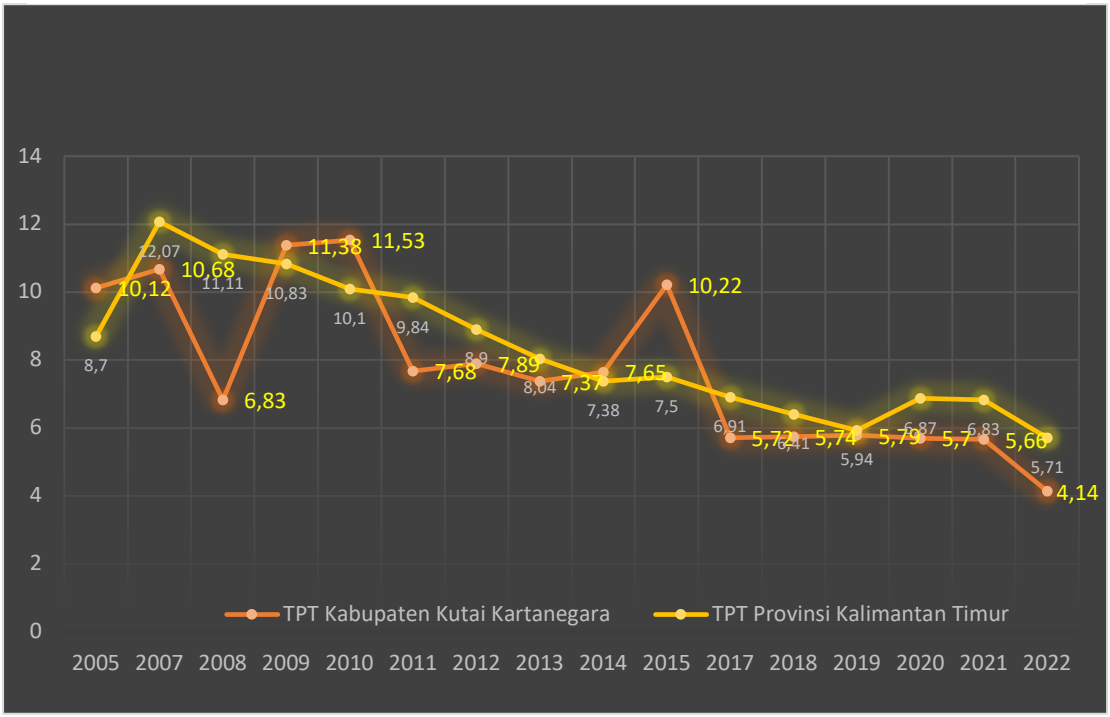

Sumber: BPS

Sejalan dengan jumlah pengangguran, perkembangan tingkat pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara juga berfluktuasi dengan kecenderungan angka yang relatif rendah, terutama pada 5 tahun terakhir. Pada tahun 2005, TPT Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebesar 10,12 persen, lebih tinggi daripada TPT Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat sebesar 8,70 persen. Satu tahun kemudian, TPT Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebesar 10,68 persen, lebih rendah dari TPT Provinsi Kalimantan Timur yang melonjak menjadi 12,07 persen.

Pada tahun 2008, TPT Kabupaten Kutai Kartanegara kembali turun cukup drastis mencapai angka 6,83 persen, jauh lebih rendah dari TPT Kalimantan Timur yang sebesar 11,11 persen. Namun pada tahun 2009-2010 dan kemudian tahun 2015, TPT Kutai Kartanegara meningkat cukup tajam, melebihi TPT Provinsi Kalimantan Timur. Tingginya angka TPT ini tidak terlepas dari fakta bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara dikenal sebagai magnet bagi para pekerja pendatang dari luar wilayah. Akibatnya jumlah pencari kerja di Kutai Kartanegara bertambah banyak dan tingkat pengangguran juga meningkat. Beruntungnya, pada periode 2017-2022, rata-rata TPT Kutai Kartanegara tercatat sebesar 5,4 persen dan selalu lebih rendah dari TPT provinsi Kalimantan Timur.

PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dilihat dari PDB atas dasar harga berlaku (**ADHB**) dan PDB atas dasar harga konstan (**ADHK**).

PDB atas dasar harga berlaku (**ADHB**) menggambarkan nilai tambah batang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan (**ADHK**) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Berikut ini disajikan data capaian kinerja PDRB Per Kapita:

Grafik 19. PDRB per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2022

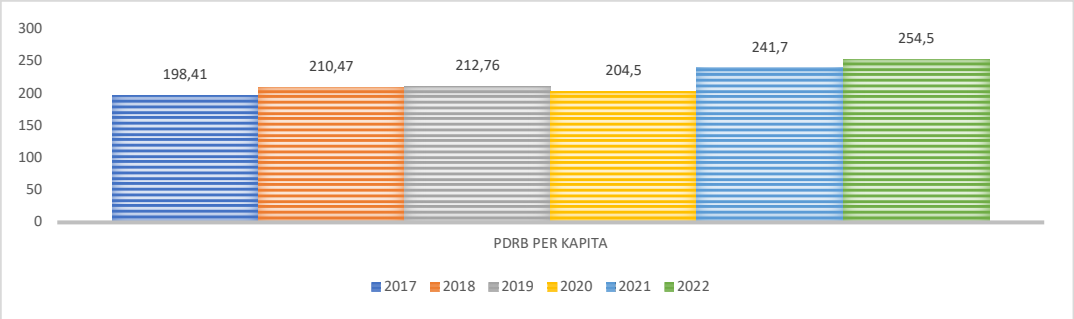

PDRB per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan kenaikan pada Tahun 2021 dari 204,50 juta rupiah di tahun 2020 menjadi 241,70 juta di tahun 2021 dan meningkat 12,8 menjadi 254,5 di Tahun 2022. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara rata-rata mampu menciptakan PDRB (atau nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik selama 20 tahun terakhir telah meningkatkan PDRB perkapita penduduk, dari Rp. 113,64 juta rupiah pada Tahun 2005 menjadi Rp. 241,70 juta rupiah pada Tahun 2021 dan meningkat menjadi 254,5 juta rupiah di Tahun 2022. Kendati demikian, masih terdapat gap yang cukup besar antara PDRB perkapita dengan indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Hal ini disebabkan salah satunya karena peranan komponen konsumsi rumah tangga di PDRB yang tercatat relatif kecil dengan kontribusi rata-rata kurang dari 10 persen dalam 10 tahun terakhir.

Realisasi indkator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 55. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	5,66	4,14	4,65	4,40	4,25	4,10
11	PDRB Per Kapita	Nilai	241,7	254,5	191,44	197,62	202,16	204,69

Sumber data: BPS

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 56. Program dan Anggaran Sasaran 8 Tahun 2022

No.	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	6.855.000.000,00	7.944.829.000,00	7.488.938.515,00	94,26%
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	5.650.000.000,00	6.378.292.000,00	6.182.248.400,00	96,93%
TOTAL		**12.505.000.000,00**	**14.323.121.000,00**	**13.671.186.915,00**	**95,45%**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 13.671.186.915,00 dari anggaran sebesar Rp. 14.323.121.000,00 atau 95,45%. Realisasi keuangan sebesar 95,45% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 122,65%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Pendanaan yang memadai untuk pelaksanaan workshop dengan metode full *cost*, menjadi faktor yang menarik antusias minat peserta pelatihan.

2. Kerjasama yang dibangun dengan balai-balai pelatihan yang terakreditasi dan instruktur berpengalaman, diharapkan bisa meningkatkan kapasitas para pencari kerja, sehingga mampu bersaing.
3. Biaya pelatihan berbasis kompetensi relatif cukup tinggi, sehingga belum maksimal dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan ketenagakerjaan.

i. Analisis Kinerja Sasaran 9: "Meningkatnya Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah"** dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencapai **33,57%** dan termasuk predikat **"Kurang Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 57. Realisasi Indikator Sasaran 9 Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	5,69	1,91	**33,57%**

Sumber data: BPS: Data Diolah Tahun 2021

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Dalam meningkatnya produktifitas, tata kelola, dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya meningkatkan pertumbahan sektor pertanian dengan target RPJMD 2022 sebesar 5,69%. Realisasi target Pertumbuhan Sektor Pertanian Tahun 2022 sebesar 1,91%. PDRB sektor pertanian (Pertumbuhan Sektor Pertanian) 2022 mengalami

peningkatan sebesar 0,89% dari Tahun 2021 yang mencapai 1,02. Berdasarkan hal tersebut jika dibandingkan target Tahun 2022, maka capaian Kinerja Tahun 2022 sebesar 33,57%.

Grafik 20. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)

	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Pengadaan Listrik dan Gas	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Konstruksi	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Transportasi dan Pergudangan	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Informasi dan Komunikasi	K. Jasa Keuangan	L. Real Estate	M,N. Jasa Perusahaan	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	P. Jasa Pendidikan	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	R,S,T,U. Jasa Lainnya	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
2019	5,96	3,25	4,68	9,38	5,02	4,92	5,99	5,77	6,28	7,89	5,95	2,85	3,04	3,02	7,32	9,23	8,4	3,92
2020	0,6	-5,83	-3,54	12,34	3,5	-4,01	1,72	-0,17	-0,48	8,94	2,05	0,39	-3,72	-3,79	0,86	18,73	-1,81	-4,21
2021	1,02	2,6	1,05	1,49	4,95	4,8	3,82	3,4	2,27	8,76	3,49	-1,83	1,3	2,05	3,05	11,69	3,25	2,67
2022	1,91	3	3,09	4,8	12,5	11,28	5,29	11,07	7,58	6,98	8,19	2,42	5,63	6,46	4,54	4,81	7,16	3,71

Sumber data: BPS

Realisasi indkator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 58. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	1,02	1,91	6,15	6,60	7,05	7,5

Sumber data: BPS

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 59. Program dan Anggaran Sasaran 9 Tahun 2022

No.	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	28.570.000.000,00	46.630.000.000,00	43.641.921.934,00	93,59%
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.365.000.000,00	4.871.057.000,00	4.338.607.393,00	89,07%
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	39.460.000.000,00	46.158.731.331,00	43.907.539.771,00	95,12%
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.515.000.000,00	3.915.000.000,00	3.334.941.786,00	85,18%
5	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	250.000.000,00	650.000.000,00	630.562.009,00	97,01%
6	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	500.000.000,00	900.000.000,00	662.300.081,00	73,59%
7	Program Penyuluhan Pertanian	2.224.185.000,00	5.374.185.000,00	4.806.837.990,00	89,44%
8	Program Penyuluhan Pertanian	500.000.000,00	600.000.000,00	486.872.558,00	81,15%
9	Program Perizinan Usaha Pertanian	-	-	-	0,00%
10	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	45.006.000.000,00	51.991.000.000,00	52.962.212.825,00	101,87%
11	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	38.986.013.000,00	64.050.235.000,00	56.220.785.498,00	87,78%
12	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.950.000.000,00	2.650.000.000,00	2.334.139.312,00	88,08%
13	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.150.000.000,00	2.110.000.000,00	1.821.621.128,00	86,33%
14	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	605.000.000,00	805.000.000,00	395.998.000,00	49,19%
15	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	7.650.000.000,00	8.965.000.000,00	8.117.097.098,00	90,54%
16	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	23.040.000.000,00	23.390.000.000,00	4.795.415.752,00	20,50%
17	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	2.140.000.000,00	2.404.863.528,00	1.603.748.577,00	66,69%
18	Program Pengembangan UMKM	2.450.000.000,00	2.700.000.000,00	1.750.011.397,00	64,82%
TOTAL		**202.361.198.000,00**	**268.165.071.859,00**	**232.210.613.109,00**	**86,59%**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 232.210.613.109,00 dari anggaran sebesar Rp. 268.165.071.859,00 atau 86,59%. Realisasi keuangan sebesar 86,59%dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 17,93%, maka terjadi ketidak efisiensian penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih tinggi dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Produksi Sebagian besar komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur, namun belum mampu meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pertanian, karena potensi sektor pertambangan yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara, masih merupakan magnet terbesar jika dibandingkan dengan sektor pertanian.
2. Adanya alih fungsi lahan pertanian terutama di wilayah perkotaan juga mempengaruhi pertumbuhan sektor pertanian, serta masih besarnya lahan pertanian yang sementara tidak diusahakan.
3. Regenerasi pelaku usaha bidang pertanian yang rendah, karena pelaku usaha pertanian masih di dominasi generasi tuan dan masih rendahnya minat generasi muda untuk berusaha di sektor pertanian.

j. Analisis Kinerja Sasaran 10: "Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah"** dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor

Pariwisata mencapai **159,83%** dan termasuk predikat **"Sangat Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 60. Realisasi Indikator Sasaran 10 Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	2,34	3,74	**159,83%**

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Kabupaten Kutai Kartanegara mendorong sektor pariwisata sebagai trigger dalam proses transformasi struktur ekonomi dari dominasi sektor ekonomi tak terbarukan ke sektor ekonomi terbarukan. Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup memiliki potensi yang berdampak pada percepatan perekonomian daerah. Namun semenjak pandemi saat ini, terjadi penurunan yag sangat signifikan dalam hal kunjungan wisatawan. Pada tahun 2021, sebanyak 617.064 wisatawan yang berkunjung di 48 destinasi pariwisata Kutai kartanegara. Jika dibanding tahun 2020 yang mencapai 693.246 wisatawan.

Grafik 21. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2022

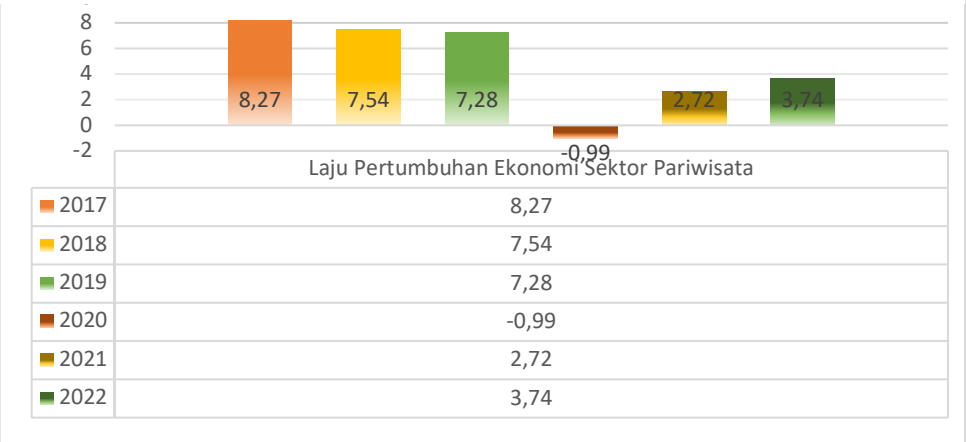

Kekuatan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini terbagi menjadi 3 (tiga) kategori daya tarik, yakni: daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan dan daya tarik wisata budaya dan sejarah. Kunjungan wisatawan pada tahun 2021 terbesar pada destinasi wisata buatan dan alam sebesar 45.21 persen dan 45.08 disusul wisata budaya dan sejarah 9.70. Adapun kontribusi terbesar dalam kunjungan wisatawan terdapat pada Pantai Pangembang dan Ladaya. Pariwisata diupayakan akan menjadi penopang perekonomian daerah pada masa yang akan datang, pendekatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menjadi salah satu bagian penting dari keberhasilan pencapaian pembangunan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Laju Pertumbuhan Ekonomi pariwisata tahun 2021 sebesar 2.72 persen seiring penanganan dan pemulihan ekonomi wilayah terwujud. Kondisi ini meningkat dibanding tahun 2020 sebesar - 0.99 persen. Namun pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata semakin meningkat menjadi 3,74 persen Diharapkan sektor pariwisata akan terus berkembang dan memberikan pengaruh yang kuat terhadap perekonomian daerah, salah satu kekuatan pariwisata yang terus didorong adalah dengan memperkuat ekonomi kreatif daerah sebagai titik point krusial dalam proses pembangunan pariwisata daerah. Berikut data kunjungan wisatawan selama 2022 di Kabupaten Kutai Kartanegara:

Tabel 61. Data Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan Tahun 2022

No	Nama Daya Tarik Wisata	Jumlah		
		Wisnus	Wisman	Jumlah
1	Hotel	**80.286**	**49**	**80.335**
2	Bukit Bangkirai Samboja	**14.750**	**213**	**14.963**
3	BOSF Samboja		-	
4	Sungai Hitam Samboja		-	

No	Nama Daya Tarik Wisata	Jumlah		
		Wisnus	Wisman	Jumlah
5	Museum Mulawarman Tenggarong	**48.736**	**156**	**48.892**
6	Ladaya (Ladang Budaya) Tenggarong	**122.168**	**-**	**122.168**
7	Waterboom HRD 77 Muara Jawa Ilir		**-**	
8	Lamin Etam Ambors Samboja	**101.280**	**-**	**101.280**
9	Pulau Kumala Tenggarong	**19.893**	**-**	**19.893**
10	Waduk Panji Sukarame Tenggarong	**8.492**	**-**	**8.492**
11	Pantai Tanah Merah Samboja	**74.472**	**-**	**74.472**
12	Pantai Ambalat Samboja	**67.605**	**-**	**67.605**
13	Pantai Pangempang Muara Badak	**110.985**	**-**	**110.985**
14	Pantai Sambera Muara Badak	**2.855**	**-**	**2.855**
15	Pantai Malabar Muara Badak	**25.563**	**-**	**25.563**
16	Pantai Duta Pemedas Samboja	**20.853**	**-**	**20.853**
17	Planetarium Jagad Raya Tenggarong		**-**	
18	Istana Bunga Jembayan	**18.171**	**-**	**18.171**
19	Kaltim Park Kuala Samboja	**12.786**	**-**	**12.786**
20	Family Weater Park Tenggarong	**4.234**	**-**	**4.234**
21	Family Weater Park Tenggarong Seberang	**3.276**	**-**	**3.276**
22	Museum Kayu Tenggarong	**4.202**	**15**	**4.217**
23	Situs Makam Raja-raja Kutai Tenggarong	**72.961**	**92**	**73.053**
24	Danau Kumbaran SP.3 Kota Bangun	**9.681**	**-**	**9.681**
25	Situs Makam Pangeran Noto Igomo Tenggarong		**-**	
26	Situs Makam Sinopati Aw. Long Tenggarong	**366**	**-**	**366**
27	Makam Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa Jembayan		**-**	
28	Situs Lesung Batu Muara Kaman		**-**	
29	Batu Dinding Samboja	**1.632**	**3**	**1.635**
30	Situs Makan Raja Aji Mahkota dan Aji dilanggar Anggana	**43.328**	**-**	**43.328**
31	Situs Makam Syeh Tunggang Parangan Anggana	**33.921**	**-**	**33.921**
32	Situs Makam Pangeran Mangkunegoro Tenggarong	**1.348**	**-**	**1.348**
33	Kembang Jaong Tenggarong	**11.826**	**-**	**11.826**

No	Nama Daya Tarik Wisata	Jumlah		
		Wisnus	Wisman	Jumlah
34	Tugu Equator Marang Kayu	**167**	**-**	**167**
35	Wisata Sungai Mahakam	**2**	**70**	**72**
36	Air Terjun Suka Alam	**1.107**	**-**	**1.107**
37	Desa Wisata Pela Kota Bangun	**2.742**	**34**	**2.776**
38	Desa Wisata Kedang Ipil Kota Bangun	**5.064**	**-**	**5.064**
39	Desa Wisata Kersik Marang Kayu	**33.173**	**-**	**33.173**
40	Desa Wisata Sumber Sari		**-**	
41	Taman Gubang Tenggarong Seberang	**45.765**	**-**	**45.765**
42	Desa Budaya Leqak Kidau Sebulu		**-**	
43	Event Budaya	**37.564**	**-**	**37.564**
	Jumlah	***1.041.254***	***632***	***1.041.886***

Sumber Data: Dinas Pariwisata Tahun 2022

Realisasi indkator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 62. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	2,72	3,74	2,51	3,42	4,00	4,23

Sumber data: BPS

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 63. Program dan Anggaran Sasaran 10 Tahun 2022

No.	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5.675.000.000,00	5.849.447.575,00	5.566.580.595,00	95,16%

No.	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
2	Program Pemasaran Pariwisata	4.180.000.000,00	5.580.594.273,00	5.177.330.393,00	92,77%
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	11.355.000.000,00	11.276.570.000,00	10.223.850.144,00	90,66%
TOTAL		**21.210.000.000,00**	**22.706.611.848,00**	**20.967.761.132,00**	92,34%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 20.967.761.132,00 dari anggaran sebesar Rp.22.706.611.848,00 atau 92,34%. Realisasi keuangan sebesar 92,34% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 116,24%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

Berakhirnya kondisi pandemi Covid-19 dan penghentian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, turut berpengaruh pada sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan di Tahun 2021 sebanyak 617.064.

Semakin tingginya kesadaran kelompok masyarakat dalam upaya mengembangkan potensi lingkungannya menjadi objek wisata, juga mempu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang terus meningkat. Tumbuhnya Pokdarwis juga mengindikasikan bahwa masyarakat Kutai Kartanegara semakin siap untuk mengelola pariwisata dan siap menerima kunjungan wisatawan.

k. Analisis Kinerja Sasaran 11: "Berkembangnya Ekosistem Kreatif"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **"Berkembangnya Ekosistem Kreatif"** dengan indikator **Laju** Pertumbuhan **Ekonomi Kreatif** mencapai **113,91%** dan termasuk predikat **"Sangat Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 64. Realisasi Indikator Sasaran 11 Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	6,11	6,96	**113,91%**

Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Menurut *Insitute For Development Economy and Finance*, ekonomi kreatif diartikan sebagai suatu proses peningkatan nilai tambah hasil dari eksplorasi kekayaan intelektual berupa kreativitas, keahlian, dan bakat individu menjadi suatu produk dapat dijual.

Grafik 22. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2022

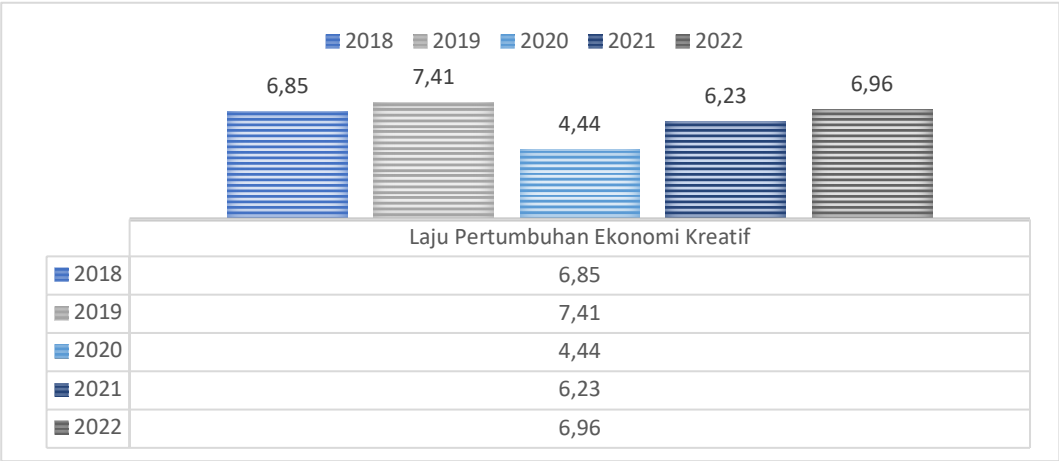

Sumber : BPS Kutai Kartanegara

Realisasi indkator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 65. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	6,23	6,96	6,55	7,09	7,48	7,56

Sumber data: BPS

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 66. Program dan Anggaran Sasaran 11 Tahun 2022

No.	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00	2.306.508.991,00	98,15%
TOTAL		**2.350.000.000,00**	**2.350.000.000,00**	**2.306.508.991,00**	**98,15%**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 2.306.508.991,00 dari anggaran sebesar Rp. 2.350.000.000,00 atau 98,15%. Realisasi keuangan sebesar 98,15% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 101,96%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

Peran generasi muda sangat mempengaruhi capaian sasaran ini, ketersediaan tenaga kerja yang dimiliki, terbukanya kesempatan bagi mereka untuk berkreasi didukung dengan kemajuan teknologi yang dimiliki, kemudahan dalam akses komunikasi, serta perkembangan media sosial, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mengejar perkembangan Ekosistem Kreatif, yang diiukur dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif.

l. Analisis Kinerja Sasaran 12: "Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah"** dengan indikator Tingkat Pertumbuhan Investasi mencapai **5300,00%** dan termasuk predikat **"Sangat Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 67. Realisasi Indikator Sasaran 12 Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	1,71	90,63	**5300,00%**

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi mengalami peningkatan pada Tahun 2022, dari yang ditargetkan sebesar 1,71% Kabupaten Kutai Kartanegara berhasil mencapai Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi sebesar 90,63%.

Perhitungan Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi adalah :

$$\text{Tingkat Pertumbuhan Investasi} = \frac{\text{(Jumlah Investasi Tahun n – Jumlah Investasi n-1) di Kabupaten/ Kota}}{\text{Jumlah Investasi n-1 di Kabupaten/ Kota}} \text{ X } 100\%$$

$$\text{Tingkat Pertumbuhan Investasi} = \frac{9.782.835.525.025{,}52 - 5.131.829.920.000}{5.131.829.920.000} \text{ X } 100\%$$

Tingkat Pertumbuhan Investasi = **90,63%**

Berikut disajikan Perhitungan Target, Realisasi dan Tingkat Pertumbuhan Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2021 :

Grafik 23. Target dan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2022

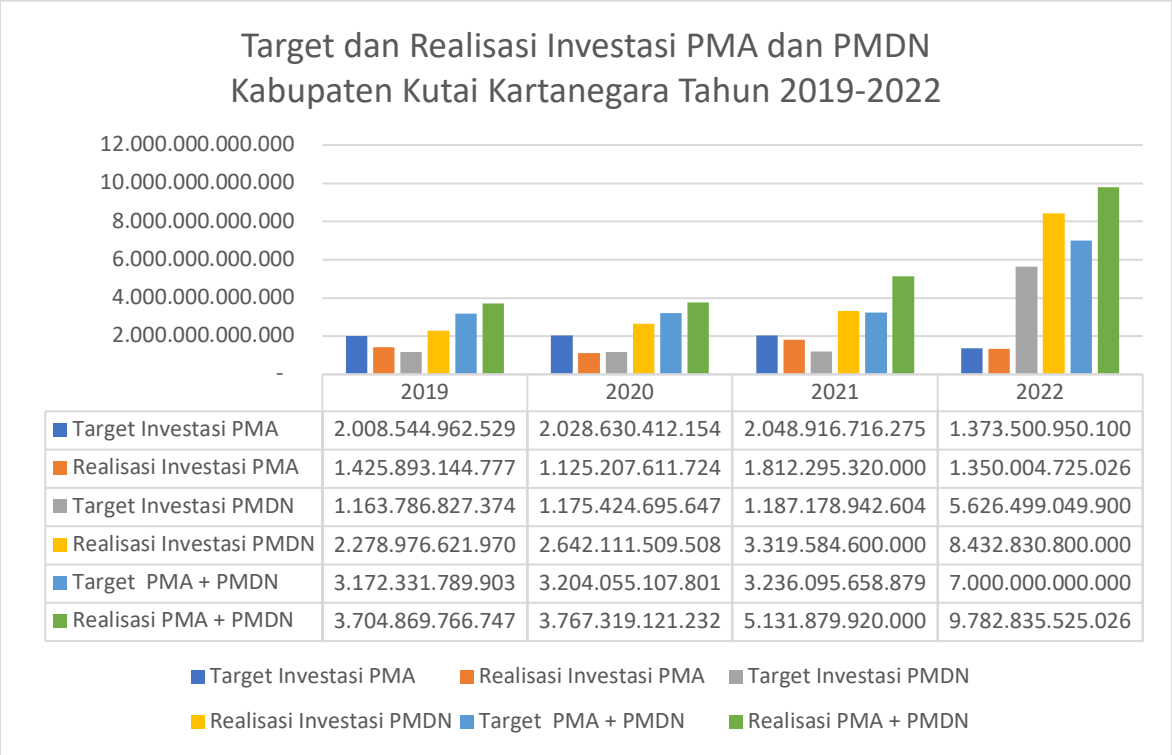

	2019	2020	2021	2022
Target Investasi PMA	2.008.544.962.529	2.028.630.412.154	2.048.916.716.275	1.373.500.950.100
Realisasi Investasi PMA	1.425.893.144.777	1.125.207.611.724	1.812.295.320.000	1.350.004.725.026
Target Investasi PMDN	1.163.786.827.374	1.175.424.695.647	1.187.178.942.604	5.626.499.049.900
Realisasi Investasi PMDN	2.278.976.621.970	2.642.111.509.508	3.319.584.600.000	8.432.830.800.000
Target PMA + PMDN	3.172.331.789.903	3.204.055.107.801	3.236.095.658.879	7.000.000.000.000
Realisasi PMA + PMDN	3.704.869.766.747	3.767.319.121.232	5.131.879.920.000	9.782.835.525.026

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2022

Nilai Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2022 sebesar Rp.9.782.835.525.026, angka ini melebihi target investasi Tahun 2022 sebesar Rp. 7.000.000.000,00. Capaian ini meningkat dari capaian Tahun 2021 yaitu sebesar Rp.5.131.879.920.000, dengan tingkat pertumbuhan nilai investasi sebesar 90,63%,

sehingga terjadi peningkatan nilai investasi di tahun 2022 sebesar Rp. 4.650.955.605.026 dibandingkan dengan Tahun 2021.

Realisasi indkator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 68. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	36,22	90,63	1,73	1,75	1,77	1,79

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2022

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 69. Program dan Anggaran Sasaran 12 Tahun 2022

No.	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.185.285.899,00	98,77%
2	Program Promosi Penanaman Modal	700.000.000,00	700.000.000,00	659.285.998,00	94,18%
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.100.000.000,00	1.000.000.000,00	961.853.687,00	96,19%
TOTAL		**3.000.000.000,00**	**2.900.000.000,00**	**2.806.425.584,00**	**96,77%**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.2.806.425.584,00 dari anggaran sebesar Rp. 2.900.000.000,00 atau 96,77%. Realisasi keuangan sebesar 96,77% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 5.300%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Kutai Kartanegara memiliki posisi strategis sebagai salah satu bagian dari Ibu Kota Negara baru, dengan bentangan daratan dan perairan yang menyimpan berbagai potensi sumber daya alam, serta alur Sungai Mahakam yang menjadi poros ekonomi, menjadikan Kutai Kartanegara sebagai tempat terbaik untuk berinvestasi.
2. Potensi sumberdaya alam yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara mendorong meningkatnya pertumbuhan investasi, baik dari sektor pertambangan dan perkebunan.
3. Ketersediaan sarana prasarana, dalam menjalankan usaha turut meningkatkan pertumbuhan investasi.
4. Regulasi dibidang investasi, stabilitas politik, dan kondisi sosial budaya merupakan faktor pendorong iklim investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam menerbitkan izin usaha oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) dalam mendukung kemudahan berinvestasi di Kab. Kutai Kartanegara.

m. Analisis Kinerja Sasaran 13: "Meningkatnya Kualitas Permukiman Masyarakat dan Ketersediaan Air Bersih"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya Kualitas Permukiman Masyarakat dan Ketersediaan Air Bersih"** dengan indikator Cakupan Layanan Air Bersih dan Presentase Rumah Layak Huni mencapai **94,61%** dan termasuk predikat **"Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 70. Realisasi Indikator Sasaran 13 Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	89,32	76,68	**85,85%**
17	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	90,35	93,39	**103,36%**
Rata-rata Capaian					**94,61%**

1. Cakupan Layanan Air Bersih

Indikator Kinerja Utama **Cakupan Layanan Air Bersih** adalah Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih / Jumlah rumah tangga dikali 100. Sumber data berasal dari Bidang Penyehatan Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Mahakam" dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk data non perpipaan, dengan asumsi perhitungan 1 SR=5 Jiwa.

Cakupan Layanan Air Bersih

$$= \frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$$

$$= \frac{131.960}{172.099} \times 100\% \qquad \mathbf{= 76,68\%}$$

Keterangan:

a) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih diperoleh dari perhitungan jumlah Layanan PDAM, Perpipaan dan Non Perpipaan.

b) Jumlah rumah tangga diperoleh dari proyeksi jumlah jiwa diseluruh kabupaten/kota tersebut dibagi 5 jiwa/kk.

Pemasangan Sambungan Rumah (SR)

Kebutuhan akan air bersih merupakan hal penting yang harus diperhatikan ketersediaannya, mengingat sumber air baku di Kabupaten Kutai Kartanegara bersumber dari sungai Mahakam yang didalamnya juga mengalir air limbah baik dari perusahaan maupun dari limbah rumah tangga. Besarnya persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih memberikan gambaran tentang kondisi kesehatan suatu daerah. Sumber air bersih diantaranya adalah air dalam kemasan, air isi ulang, air leding, pompa mata air terlindung dan sumur terlindung.Salah satu masalah pokok yang dihadapi adalah kurang tersedianya sumber air bersih, belum meratanya pelayanan penyediaan air bersih terutama di perdesaan dan sumber air bersih yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu jumlah rumah tangga pengguna air bersih meningkat seiring dengan peningkatan jumlah total rumah tangga.

Ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air bersih masih jauh dari kebutuhan, sementara seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka

Sambungan Rumah (SR) untuk memenuhi kebutuhan air bersih pun semakin bertambah. Apalagi dengan luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 27.263,10 Km2 dan terdiri dari 18 Kecamatan.

2. Persentase Rumah Layak Huni

Indikator Kinerja Utama **Persentase Rumah Layak Huni** adalah Jumlah Rumah Layak Huni / Jumlah Seluruh Rumah di wilayah pemda x 100%

Cakupan Rumah Layak Huni

$$= \frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah diwilayah pemda}} \times 100\%$$

$$= \frac{173.191}{185.433} \times 100\% = \mathbf{93,39\ \%}$$

Keterangan:

a) Jumlah rumah layak huni diperoleh dari perhitungan jumlah seluruh rumah dikurangi jumlah rumah tidak layah huni.

b) Untuk data RTLH berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT).

c) Adapun jumlah seluruh rumah diwilayah pemda sumber data diperoleh dari RP3KP tahun 2019.

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang **layak huni**, sarana pembinaan keluarga, cermin harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya (Sumber : UU NOMOR 01 TAHUN 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Pada masa pandemi ini rumah yang layak huni dan sehat menjadi kebutuhan setiap masyarakat. Untuk memiliki rumah yang layak huni, setidaknya harus memenuhi lima syarat penting, yaitu :

1. Ketahanan dan keselamatan bangunan;
2. Kecukupan luas ruang penghuni;
3. Adanya luas luasan pencahayaan dan penghawaan;
4. Akses sanitasi layak;

5. Akses air minum layak.

REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (R RTLH)

Program Rehabiliatsi Rumah Tidak Layak Huni yang merupakan Program adopsi dari BSPS. Pengadaan rumah secara swadaya ini telah banyak merumahkan masyarakat Indonesia, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun, permasalahan yang muncul dari pembangunan rumah secara swadaya oleh masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas adalah minimnya perencanaan dan pengetahuan teknis mengenai rumah layak huni (RLH). Hal ini menyebabkan kondisi rumah yang dibangun dalam jangka panjang menjadi tidak layak huni atau lebih dikenal dengan RTLH. Karena itulah, pemerintah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan fasilitasi kepada masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni secara swadaya dengan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

TUJUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (R RTLH)

Bertambahnya jumlah penghunian rumah yang layak huni melalui skema R RTLH , meningkatnya sistem pelaksanaan program Rumah Swadaya, serta terlaksananya dukungan teknis untuk pengembangan program Rumah Swadaya.

DEFINISI REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (R RTLH)

Adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

Di tahun 2022 ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara serta dalam rangka melaksanakan Misi ke 4 dari RPJMD yaitu Meningkatkan layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, serta mendukung program dedikasi KUKAR IDAMAN yang salah satunya adalah melalui peningkatan kualitas permukiman masyarakat, menetapkan Kecamatan Samboja dan Kecamatan Muara Kaman untuk memperoleh bantuan rehabilitasi untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui dana APBD. Total sebanyak 517 Unit rumah yang direhabilitasi pada tahun 2022 yaitu Kecamatan Samboja sebanyak 300 Unit di 5 Kelurahan dan 1 Desa dan Kecamatan Muara Kaman sebanyak 217 Unit di 4 Desa.

Tabel 71. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2022

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah Unit Rumah
1.	Samboja	Amborawang Darat	55
		Amborawang Laut	55
		Tani Bakti	55
		Kuala Samboja	50
		Margo Mulyo	55
		Bukit Merdeka	30
2.	Muara Kaman	Muara Kaman Ulu	86
		Muara Kaman Ilir	45
		Sabintulung	60
		Lebaho Ulak	26
T o t a l			**517**

Sumber data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2022

Selain itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga melaksanakan kegiatan pendampingan dan fasilitasi kegiatan APBN seperti PISEW, BSPS dan KOTAKU.

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan Indikator ini dilaksanakan dengan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan kegiatan yang dilaksanakan berupa Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten / Kota pada sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.

Realisasi indkator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 72. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	70,85	76,68	90,74	92,16	93,58	95,00
17	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	92,76	93,39	90,62	90,89	91,16	91,44

Sumber data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2022

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 73. Program dan Anggaran Sasaran 13 Tahun 2022

No.	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pengembangan Perumahan	7.586.384.560,00	7.486.384.560,00	6.956.929.369,00	92,93%
2	Program Kawasan Permukiman	1.213.615.440,00	1.263.615.440,00	1.057.764.120,00	83,71%
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	10.990.000.000,00	10.990.000.000,00	10.899.744.800,00	99,18%

No.	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	17.104.385.216,00	23.104.385.216,00	25.716.817.706,00	111,31%
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	71.120.806.784,00	136.009.657.007,00	131.142.421.403,00	96,42%
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.575.086.000,00	20.661.235.777,00	19.957.375.306,00	96,59%
7	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	59.228.998.672,00	100.613.926.172,00	86.424.371.837,00	85,90%
8	Program Pengelolaan Persampahan	11.405.000.000,00	14.726.854.000,00	13.671.566.825,00	92,83%
TOTAL		**189.224.276.672,00**	**314.856.058.172,00**	**295.826.991.366,00**	**93,96%**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.295.826.991.366,00 dari anggaran sebesar Rp.314.856.058.172,00 atau 93,96%. Realisasi keuangan sebesar 93,96% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 94,60%, maka terjadi ketidak efisiensian penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, walau penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi faktor utama yang mempengaruhi capaian sasaran ini, terlalu luasnya wilayah menghambat pemerataan pembangunan serta peningkatan pelayanan terhadap cakupan layanan air bersih dan penyediaan rumah layak huni. Dengan adanya program RBPK

Kabupaten Kutai kartanegara diharapkan juga berpengaruh terhadap capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Permukiman Masyarakat dan Ketersediaan Air Bersih.

n. Analisis Kinerja Sasaran 14: "Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah"** dengan indikator Indeks Aksesibilitas Wilayah mencapai **89,87%** dan termasuk predikat **"Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 74. Realisasi Indikator Sasaran 14 Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	84,18	75,65	**89,87%**

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2022

Indeks Aksesibilitas Wilayah diukur dengan rumus:

$$Indeks\ Aksesibilitas\ Wilayah = \frac{Jalan\ Mantap + Aksesibilitas}{2}$$

$$Indeks\ Aksesibilitas\ Wilayah = \frac{61{,}3 + 90}{2} = \mathbf{75,65}$$

Keterangan:

$$Aksesibilitas\ = \frac{jumlah\ Kecamatan\ terhubung}{total\ Kecamatan} X\ 100\ \%$$

Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang sangat luas dari 20 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, masih ada 2 kecamatan yang belum terhubung jalur darat dengan ibu kota kabupaten, yaitu Kecamatan Muara Muntai dan Kecamatan Muara Wis, dan ada beberapa desanya terletak di pulau dan kawasan lindung daerah gambut sehingga tidak dapat terkoneksi melalui jalur darat.

Dari 237 jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, ada 11 desa yang belum terhubung jalur darat, dari 11 desa tersebut ada 7 desa yang tidak bisa terhubung jalur darat karena kondisi wilayah. Data sebaran desa tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 75. Data Desa Terhubung Dan Tidak Terhubung Jalur Darat

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Desa yang Belum Terhubung Jalur Darat	Desa yang Tidak Bisa Terhubung Jalur Darat
1	Muara Muntai	13	1 Desa (Desa Jantur)	1 Desa (Desa Jantur)
2	Loa Kulu	15		
3	Loa Janan	8		
4	Anggana	8	3 Desa (Desa Sepatin, Desa Muara Pantuan, Desa Tani Baru)	3 Desa (Desa Sepatin, Desa Muara Pantuan, Desa Tani Baru)
5	Muara Badak	13		
6	Tenggarong	14		
7	Sebulu	14		
8	Kota Bangun	11		
9	Kenohan	9		
10	Kembang Janggut	11		
11	Muara Kaman	20	5 Desa (Desa Kupang Baru, Desa Liang Buaya, Desa Muara Siran, Desa Bukit Jering, Desa Tunjungan)	3 Desa (Desa Liang Buaya, Desa Muara Siran, Desa Bukit Jering)
12	Tabang	19		
13	Samboja	13		
14	Muara Jawa	8		
15	Sanga-Sanga	5		
16	Tenggarong Seberang	18		
17	Marangkayu	11		
18	Muara Wis	7	2 Desa (Desa Enggelam, Desa Muara Enggelam)	
19	Kota Bangun Darat	10		
20	Samboja Barat	10		
TOTAL		**237**	**11 Desa**	**7 Desa**

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

Di Kecamatan Anggana terdapat 3 (tiga) desa yang terletak di pulau yaitu Desa Muara Pantuan, Desa Sepatin, dan Desa Tani Baru. Ketiga desa tersebut sulit dihubungkan melalui jalur darat karena lokasinya yang berada pulau dan Muara

Selat Makassar. Selain itu, 3 (tiga) desa di Kecamatan Muara Kaman yaitu Desa Liang Buaya, Desa Bukit Jering, dan Desa Muara Siran juga sulit terhubung melalui jalur darat. Desa Liang Buaya tidak dapat terkoneksi karena desa tersebut masuk dalam kawasan lindung daerah gambur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara 590/526/001/A.Ptn/2013 tentang Penunjukan Konservasi Sebaran lahan Gambut Di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan Desa Bukit Jering dan Desa Muara Siran berada di lokasi yang terpisah dari Kecamatan Muara Kaman oleh Sungai Mahakam dan Sungai Kedang Kepala dan di Kecamatan Muara Muntai ada Desa Jantur.

Grafik 24. Perbandingan Kondisi Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2022

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2022

Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah dengan indikator Indeks Aksesibilitas Wilayah Tahun 2022 sebesar 75,65%, capaian ini meningkat dari capaian di Tahun 2021 sebesar 73,75%, hal ini diperoleh karena adanya peningkatan kemantapan jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar

3,8% atau peningkatan panjang jalan mantap sebesar 82,89 Km di Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021, walau kondisi jalan mantap tahun 2022 masil lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi jalan di Tahun 2020. Berikut disajikan grafik perbandingan kondisi jalan dan perbandingan kemantapan jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2022:

Grafik 25. Perbandingan Kemantapan Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2022

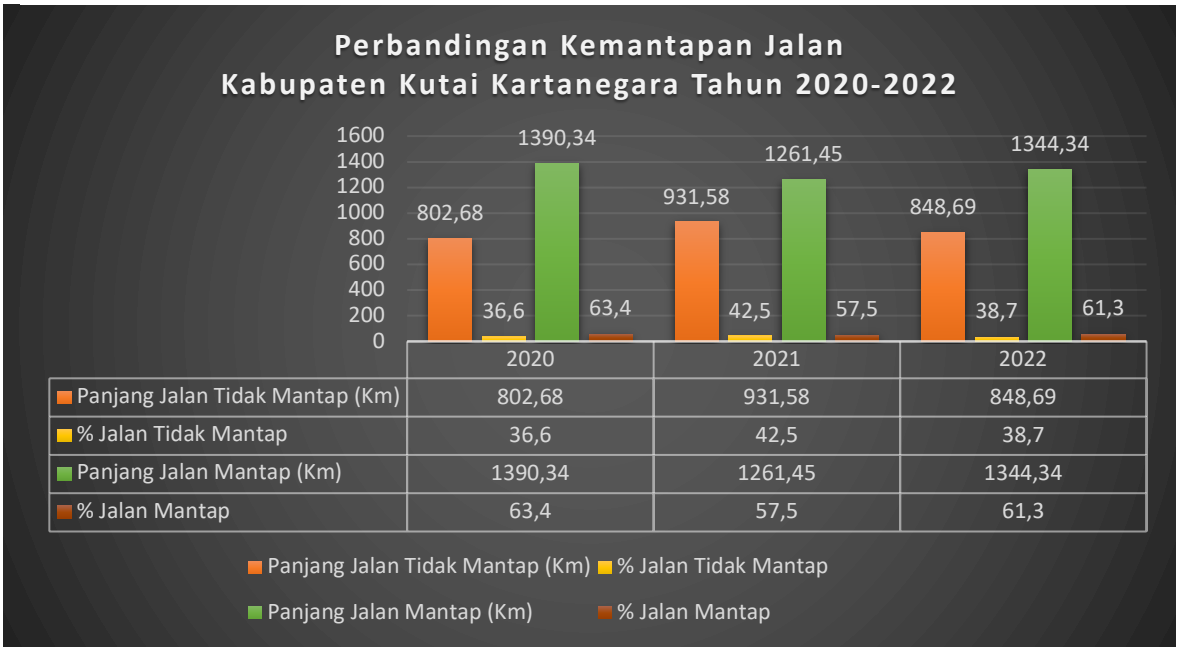

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2022

Realisasi indkator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 76. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 14 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	73,75	75,65	85,18	86,18	87,18	88,18

Sumber data: Kementerian PANRB

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 77. Program dan Anggaran Sasaran 14 Tahun 2022

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.820.000.000,00	2.520.000.000,00	2.301.107.655,00	91,31%
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	100.514.004.000,00	128.218.884.000,00	91.033.745.271,00	71,00%
3	Program Penyelenggaraan Jalan	262.955.686.996,00	464.689.268.462,00	397.128.416.490,00	85,46%
TOTAL		**365.289.690.996,00**	**595.428.152.462,00**	**490.463.269.416,00**	**82,37%**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 490.463.269.416,00 dari anggaran sebesar Rp. 595.428.152.462,00 atau 82,37%. Realisasi keuangan sebesar 82,37%, dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 89,87%, maka terjadi ketidak efisiensian penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, walaupun penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Wilayah Kutai Kartanegara yang sangat luas, menyulitkan untuk pemerataan pembangunan, terutama di peningkatan kualitas infrastruktur jalan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan seperti fasilitas penerangan jalan umum secara umum meningkat.

o. Analisis Kinerja Sasaran 15: "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup"** dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai **98,13%** dan termasuk predikat **"Sangat Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 78. Realisasi Indikator Sasaran 15 Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,14	71,77	**98,13%**

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2022

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut. Dan IKLH kabupaten/kota meliputi IKA, IKU, dan IKL.

Mulai tahun 2020, indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO_3, dan Fecal Coli; (2) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur

berdasarkan parameter SO_2 dan NO_2; (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung.

Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.

Tabel 79. Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2022

No.	Indikator	Target	Realisasi
1.	IKA	57,32	53,08
2.	IKU	88,78	89,31
3.	IKL	71,38	71,42
Rumus perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021: IKLH Kab/Kota = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)			

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2022

Terhitung mulai Tahun 2020 Perhitungan IKLH mulai diterapkan secara online melalui aplikasi: https://ppkl.menlhk.go.id/iklh. Dalam aplikasi ini masing-masing Pemerintah Daerah hanya memasukan hasil uji laboratorium parameter pada masing-masing Indeks, dan sistem akan menghitung dan menghasilkan nilai akhir untuk masing-masing indeks.

Sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, IKLH merupakan perpaduan konsep *Environmental Quality Index* (EQI) dan konsep *Environmental Performance Index* (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Realisasi indkator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 80. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,76	71,77	73,47	73,81	74,15	74,51

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2022

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 81. Program dan Anggaran Sasaran 15 Tahun 2022

No.	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	1.210.063.405,00	93,08%

No.	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.678.807.500,00	3.678.807.500,00	3.369.814.364,00	91,60%
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	175.000.000,00	175.000.000,00	169.060.000,00	96,61%
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	660.000.000,00	600.000.000,00	553.785.650,00	92,30%
5	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	150.000.000,00	150.000.000,00	149.315.650,00	99,54%
TOTAL		**5.963.807.500,00**	**5.903.807.500,00**	**5.452.039.069,00**	**92,35%**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 5.452.039.069,00 dari anggaran sebesar Rp. 5.903.807.500,00 atau 92,35%. Realisasi keuangan sebesar 92,35% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar **98,13%,** maka terjadi ketidak efisiensian penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, walaupun penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Jika dilihat dari realisasi IKLH tahun 2022 sebesar 71,77 nilai capaian hanya sekitar 98,13 % dari target IKLH 73,14 Namun tetap masuk dalam Kategori Indek Kualitas Lingkungan Hidup "**BAIK**". Adapun beberapa hal yang menyebabkan realisasi IKLH tidak dapat tercapai sesuai dengan yang ditarget dikarenakan beberapa hal:

1. Tidak terpenuhinya target pada Indeks Kualitas Air, IKA: Target = 57,32 Realisasi = 53,08. Pelaksanaan Pemantauan air permukaan pada 31 titik yang

dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Kutai Kartanegara sebanyak 16 titik, Pusat sebanyak 6 titik, dan Provinsi sebanyak 9 titik (penetuan titik pantau berdasarkan Surat Keputusan Kepala dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P-155/DLHK/BID III/663.1/02/22 Tentang Penetapan Titik Pantau Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2022.

2. Metode perhitungan air permukaan menggunakan perhitungan Indeks Pencemaran lebih diperketat lagi berdasarkan surat dari KLHK No. S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 dengan jumlah 8 parameter uji (pH,TSS,DO,BOD,COD,NO3-N,Fecal Coli,Total Phospat) tetapi pada tahun 2022 menggunakan Metode perhitungan PerMen LHK nomor 27 Tahn 2021 dengan Aplikasi IKLH. Berikut beberapa sungai yang nilai parameter Fecal Coli di atas baku mutu:

Tabel 82. Sungai yang nilai parameter Fecal Coli di atas Baku Mutu

Sungai	Baku Mutu Sungai Kelas 2	Hasil Sample (fecal coliform mg/l)
Mahakam As.Tgr S.Tenggarong	1000	3500
Mahakam As.Jmbs.Jembayan	1000	2100
Mahakam As.Tgr S.Tenggarong	1000	4000
Mahakam As.Jmbs.Jembayan	1000	3100
Mahakam Outlet Danau Semayang	1000	2200
Mahakam Kota Bangun	1000	1600
Mahakam As.Tgr S.Tenggarong	1000	3500
Mahakam As.Jmbs.Jembayan	1000	1600

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2022

3. Pola Hidup Masyarakat di bantaran sungai yang menyebabkan *Parameter Fecal Coliform* masih diatas baku mutu hal ini disebabkan karena kondisi

sungai kita yang masih banyak aktivitas manusia yang menghasilkan limbah domestik.

4. Belum adanya IPAL Domestik Komunal di Wilayah Perkotaan (Tenggarong);
5. Belum adanya pengelohan air limbah dari usaha kecil.

Meskipun capaian pada tahun 2022 belum tercapai namun secara umum berdasarkan hasil perhitungan Indeks Pencemaran dengan status mutu air permukaan, sungai memenuhi baku mutu 13, Tercemar ringan 49 dan tercemar sedang 3.

p. Analisis Kinerja Sasaran 16: "Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "**Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah**" dengan indikator **Indeks Risiko Bencana** mencapai **88,57%** dan termasuk predikat **"Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 83. Realisasi Indikator Sasaran 16 Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	108,55	120,96	**88,57%**

Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2022

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasar-kan rumus berikut:

$$Risk = Hazard \times Vulnerability\ Capacity$$

Di mana hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu feno-mena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan para-meter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Sampai saat ini nilai Indeks Risiko Bencana hasil perhitungan dari IRBI oleh Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risko Bencana BNPB.

Berdasarkan Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B-005/BNPB/PERB/SS.01.02/01/2023 Tanggal 11 Januari 2023, nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah 120,96 dan masuk ke tingkat **RESIKO SEDANG**. IRBI Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat/ naik sebesar 1,80 point dari kondisi Tahun 2021 yaitu sebesar 119,16.

Realisasi indkator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 84. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 16 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	119,16	120,96	106,42	104,28	102,14	100,00

Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2022

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 85. Program dan Anggaran Sasaran 16 Tahun 2022

No.	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Penanganan Bencana	625.000.000,00	1.031.770.000,00	980.779.903,00	95,06%
2	Program Penanggulangan Bencana	4.582.354.400,00	5.242.354.400,00	4.038.465.236,00	77,04%
3	Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.785.039.638,00	3.785.039.638,00	3.317.100.005,00	87,64%
TOTAL		**8.992.394.038,00**	**10.059.164.038,00**	**8.336.345.144,00**	**82,87%**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 8.336.345.144,00 dari anggaran sebesar Rp. 10.059.164.038,00 atau 82,87%. Realisasi keuangan sebesar 82,87% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 88,57%, maka terjadi ketidak efisiensian penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, walaupun penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi kemampuan individu, masyarakat, lembaga pemerintah atau non pemerintah dan aktor lain dalam menangani ancaman dengan sumber daya yang tersedia untuk melakukan tindakan pencegahan, mitigasi, dan mempersiapkan penanganan darurat, serta menangani kerentanan yang ada dengan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat di daerah rawan bencana.
2. Jika dibanding target IKU Tahun 2022 yaitu 108, 55 dengan capaian Tahun 2022 120, 96 , karena penentuan target di RPJMD terlalu tinggi atau belum mengacu hasil perhitungan dari IRBI yang dilakukan oleh Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB , sehingga sulit untuk Perangkat Daerah untuk mencapainya.
3. Lemahnya upaya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dokumen Rencana Penanggulangan Bencana pada Renstra dan atau rencana kerja (Renja) OPD terkait.

Belum adanya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) atau forum sejenis yang terbentuk beranggotakan pemerintah daerah, dunia usaha, perwakilan masyarakat, akademisi atau pakar serta media.

2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Berikut Rekapitulasi Pengukuran capaian kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 86. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
					2021	2022	
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Nilai SAKIP	Nilai	66,35	67,4	Meningkat 1,05
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	8,16	8,38	Meningkat 0,22
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,5	9,81	Meningkat 1,31
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,685	0,687	Meningkat 0,002
		5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	n.a	47,42	Di Tahun 2021 tidak dilakukan pengukuran
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,810	0,810	Tetap
6	Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,12	79,12*)	Data tahun sebelumnya karena angka kinerja tahun 2022 belum tersedia
7	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan Kualitas Hidup Masyarakat	8	Indeks Gini	Nilai	0,283	0,269	Meningkat 0,014
		9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,7130	0,747	Meningkat 0,034
8	Menurunnya Pengangguran di Masyarakat	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	7,99	4,14	Meningkat 3,85
		11	PDRB per Kapita	Nilai	241,7	254,50	Meningkat 12,8
9	Meningkatnya Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	1,02	1,91	Meningkat 0,89
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	2,72	3,74	Meningkat 1,02
11	Berkembangnya Ekosistem Kreatif	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	6,23	6,96	Meningkat 0,73
12	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	36,22	90,63	Meningkat 54,41
13	Meningkatnya Kualitas Permukiman Masyarakat dan Ketersediaan Air Bersih	16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	70,85	76,68	Meningkat 5,83
		17	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	92,76	93,39	Meningkat 0,63
14	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah	18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	73,75	75,65	Meningkat 1,9

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
					2021	2022	
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,76	71,77	Meningkat 0,01
16	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	19,16	120,96	Menurun 1,8

**) menggunakan angka kinerja tahun sebelumnya (2021), karena angka kinerja tahun 2022 belum tersedia*

Dari data pada tabel diatas secara garis besar capaian kinerja 2022 menunjukkan angka peningkatan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2021, namun terdapat 1 (satu) sasaran yang menunjukkan angka penurunan yaitu pada sasaran Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah, dengan Indeks Resiko Bencana, indikator kinerja ini merupakan indikator semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik. Indeks Resiko Bencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 mengalami peningkatan nilai sebesar 1,8 jika dibandingkan pada Tahun 2021, sehingga disimpulkan dengan peningkatan Indeks Resiko Bencana, maka capaian kinerja rendah.

2.3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

a. Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui pembandingan antara persentase rata - rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
2. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan sebagai berikut:

Tabel 87. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022

No.	Sasaran	Rata – Rata Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Ket
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100,76%	143.153.608.041,00	135.449.452.535,00	94,62%	Efisien
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	134,08%	715.502.429.835,00	472.575.245.938,00	66,05%	Efisien
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	110,85%	25.260.709.334,00	21.448.535.136,00	84,91%	Efisien
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	96,99%	409.868.731.911,00	237.854.311.772,32	58,03%	Tidak Efisien
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	99,88%	192.427.614.972,00	168.922.643.643,00	87,79%	Tidak Efisien
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	100,15%	1.760.000.000,00	1.536.170.022,00	87,28%	Efisien
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	106,60%%	19.560.756.681,00	16.846.664.715,00	86,12%	Efisien
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	126,07%	14.323.121.000,00	13.671.186.915,00	95,45%	Efisien
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	33,57%	268.165.071.859,00	231.810.613.109,00	86,44%	Tidak Efisien
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	159,83%	22.706.611.848,00	20.967.761.132,00	92,34%	Efisien

No.	Sasaran	Rata – Rata Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Ket
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	113,91%	2.350.000.000,00	2.306.508.991,00	98,15%	Efisien
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	5300,00%	2.900.000.000,00	2.806.425.584,00	96,77%	Efisien
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	94,61%	314.856.058.172,00	295.826.991.366,00	93,96%	Tidak Efisien
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	89,87%	595.428.152.462,00	490.463.269.416,00	82,37%	Tidak Efisien
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	98,13%	5.903.807.500,00	5.452.039.069,00	92,35%	Tidak Efisien
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	88,57%	10.059.164.038,00	8.336.345.144,00	82,87%	Tidak Efisien

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 16 sasaran menunjukkan 9 (sembilan) efisien karena sasaran dapat dicapai sebesar 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran, terdapat 7 (tujuh) sasaran tidak efisien, karena kinerja tidak mencapai 100%. Dari 7 (tujuh) sasaran yang tidak efisien, ada sebanyak 6 (enam) sasaran yang tidak mencapai target namun penyerapan anggaran lebih rendah dari capian kinerja, dan terdapat 1 (satu) sasaran yang penyerapan anggaran lebih besar dari capaian kinerja.

b. Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 sebanyak 7.437 paket non tender pekerjaan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 594.893.239.088,00 dan total setelah ditetapkan HPS turun menjadi sebesar Rp. 575.952.511.091,00 dan dalam proses pelaksanaan pemilihan setelah dilakukan negosiasi oleh kelompok kerja pemilihan anggaran turun menjadi sebesar Rp.

574.028.505.931,00 sehingga terdapat efisiensi anggaran dalam pengadaan barang/jasa sebesar Rp. 1.924.005.160 atau sebesar 0,33% dari total HPS. Sedangkan untuk Paket Tender sebanyak 606 Paket, diperoleh efisiensi anggaran sebesar 4,69% atau sebesar Rp. 44.195.961.010,00. Efisiensi ini diperoleh dari selisih anggaran HPS sebesar Rp. 942.995.864.645,00 dengan total realisasi sebesar Rp. 898.799.903.635,00.

Sedangkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai Rp. 599.193.953.112,00, dengan rincian Rp. 592.161.234.297,00 dari Paket Tender dan Rp. 7.032.718.815 dari paket pengadaan E-Purchasing.

Tabel 88. Anggaran dan Realisasi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa

No.	Kriteria	Jumlah Paket	Pagu	HPS	Realisasi	Selisih	Efisiensi	PDN/ TKDN
1.	Paket Non-Tender	7.437	594.893.239.088	575.952.511.091	574.028.505.931	1.924.005.160	0,33%	-
2.	Paket Tender	606	968.310.456.462	942.995.864.645	898.799.903.635	44.195.961.010	4,69%	592.161.234.297
3.	Paket E-Purchasing	247	46.433.214.404	46.433.214.404	46.433.214.404	-	-	7.032.718.815

Sumber Data: Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Tahun 2022

Dari keseluruhan penjabaran diatas dapat disimpulkan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Kurai Kartanegara atas Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Kurai Kartanegara Tahun 2022 yang terdiri dari 16 sasaran, adalah sebagai berikut:

Tabel 89. Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Nilai SAKIP	Nilai	66,89	67,40	100,76%

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Rata-rata Capaian							**100,76%**
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	6,25	8,38	134,08%
Rata-rata Capaian							**134,08%**
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,85	9,81	110,85%
Rata-rata Capaian							**110,85%**
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,693	0,687	99,13%
		5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	50	47,42	94,84%
Rata-rata Capaian							**96,99%**
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,811	0,81	99,88%
Rata-rata Capaian							**99,88%**
6	Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79	79,12*)	100,15%
Rata-rata Capaian							**100,15%**
7	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan Kualitas Hidup Masyarakat	8	Indeks Gini	Nilai	0,29	0,269	105,16%
		9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,705	0,747	100,15%
Rata-rata Capaian							**106,60%**
8	Menurunnya Pengangguran di Masyarakat	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,94	4,14	116,19%
		11	PDRB per Kapita	Nilai	187,21	254,50	135,94%
Rata-rata Capaian							**126,07%**
9	Meningkatnya Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	5,69	1,91	33,57%
Rata-rata Capaian							**33,57%**
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	2,34	3,74	159,83%
Rata-rata Capaian							**159,83%**
11	Berkembangnya Ekosistem Kreatif	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	6,11	6,96	113,91%

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Rata-rata Capaian							**113,91%**
12	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	1,71	90,63	5300,00%
Rata-rata Capaian							**5300,00%**
13	Meningkatnya Kualitas Permukiman Masyarakat dan Ketersediaan Air Bersih	16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	89,32	76,68	85,85%
		17	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	90,35	93,39	103,36%
Rata-rata Capaian							**94,61%**
14	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah	18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	84,18	75,65	89,87%
Rata-rata Capaian							**89,87%**
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,14	71,77	98,13%
Rata-rata Capaian							**98,13%**
16	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	108,55	120,96	88,57%
Rata-rata Capaian							**88,57%**

**) menggunakan angka kinerja tahun sebelumnya (2021), karena angka kinerja tahun 2022 belum tersedia*

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka kinerja capaian Sasaran dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja ≥ 95 % kategori “sangat berhasil” sebanyak 12 sasaran, atau 68,75%;
2. Capaian kinerja 80 s/d <95% kategori “berhasil” sebanyak 3 sasaran, atau 25%;
3. Capaian kinerja 0 s/d< 50% kategori “kurang berhasil” sebanyak 1 sasaran, atau 6,25%.

BAB III
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan.
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai Melalui Dana Tugas

Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

3.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga (K/L). Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota, dan/atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dan tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah pelaksana tugas pembantuan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan. Sehingga berdasarkan pola pertanggungjawaban dan pelaporan penyelenggaraan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022, maka yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten / Kota hanyalah pelaporan tugas pembantuan.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Tugas Pembantuan dari Penugasan Pemerintah Pusat melalui Kementrian/Lembaga non-Kementrian yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri/Lembaga non-Kementrian terdiri dari:

1. Kementerian Perdagangan Berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
2. Kementerian Koperasi dan UMK berdasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan.

3.3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Berdasarkan DIPA Tugas Pembantuan Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, secara kumulatif anggaran/pagu DIPA Tugas Pembantuan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 sebesar Rp.9,108,400,000.00. Penjabaran pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian/lembaga kepada Kabupaten Kutai Kartanegara diimplementasikan

pada 2 (dua) Perangkat Daerah menurut kesesuaian tugas pokok dan fungsinya masing-masing, yaitu meliputi:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Tugas Pembantuan dari Kementrian Perdagangan Republik Indonesia yaitu Pembangunan Pasar Rakyat 1 (satu) unit;
2. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Tugas Pembantuan dari Kementrian Koperasi dan UMK Republik Indonesia yaitu Pembangunan Rumah Produksi Bersama Jahe 1 (satu) unit.

Dalam pelaksanaanya sampai dengan 31 Desember 2021 anggaran yang terserap dari Dana Tugas Pembantuan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar Rp.8.615.146.668,- atau 94,58% dengan capaian fisik 82,25%.

3.4. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota

3.4.1. Target Kinerja

a. Pembangunan Pasar Rakyat (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara)

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdangangan yang mendukung kelancaran distribusi dan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok terutama pada daerah dengan kondisi ketersediaan prasarana dan sarana yang terbatas,serta meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.

Berkaitan hal tersebut pemerintah melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melakukan kebijakan Pembangunan / Revitalisasi sarana

perdagangan (Pasar Rakyat) dengan tujuan melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan.

Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat ditujukan untuk:

1. Mewujudkan pasar yang bersih, sehat (higienis),aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
2. Meningkatkan kesempatan berusaha;
3. Meningkatkan manajemen pengelolaan pasar rakyat;
4. Meningkatkan omset pedagang pasar rakyat;
5. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah;
6. Menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
7. Menjaga kestabilan harga; dan
8. Mendorong kelancaran arus barang.

Program/kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2022 adalah :

Tabel 90. Rincian Pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Dinas Perindustrian dan Perdanganan

Kementerian	Program/Kegiatan/Komponen Rincian Objek/Rincian Objek	Indikator Kinerja Keluaran (*Output*)			Pagu
		Indikator Kinerja	Jumlah	Satuan	
Kementerian Perdangangan	Program Perdagangan Dalam Negeri				
	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan				

Kementerian	Program/Kegiatan/Komponen Rincian Objek/Rincian Objek	Indikator Kinerja Keluaran (*Output*)			Pagu
		Indikator Kinerja	Jumlah	Satuan	
	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan				3.000.000.000
	Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat	Pasar yang dibangun	1	Unit	

b. Pembangunan Rumah Produksi Bersama Jahe (Dinas Koperasi dan UMK)

Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor industri yang dapat diandalkan sebagai indikator dalam stabilitas perekenomian baik di tingkat lokal ataupun daerah. Fungsi UMKM sendiri selain sebagai roda bisnis, akan tetapi juga sebagai pemberdayaan masyarakat pada umumnya. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di sektor agrikultur dalam hal ini komoditas Jahe.

Kegiatan pembangunan Rumah Produksi Bersama (*Factory Sharing*) bagi pelaku UKM pertanian (komoditas Jahe) di Kabupaten Kutai Kartanegara ditujukan untuk :

1. Meningkatkan nilai tambah dari produk UKM yang dihasilkan khususnya komoditas pertanian.
2. Sebagai rumah kemasan bagi produk yang dihasilkan sehingga tidak hanya menjual bahan mentah
3. Peningkatan kelas Usaha Kecil Menengah khususnya sektor pertanian.
4. Meningkatkan pemasaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5. khususnya pelaku UKM.

Program/kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2022 adalah:

Tabel 91. Rincian Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pada Dinas Koperasi dan UMK

Kementrian	Program/Kegiatan/Komponen Rincian Objek/Rincian Objek	Indikator Kinerja Keluaran (*Output*)			Pagu
		Indikator Kinerja	Jumlah	Satuan	
Kementrian Koperasi dan UMK	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi				
	Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok UKM				
	Sarana Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok UKM				
	Bantuan Pengembangan Sentra UKM melalui Factory Sharing	Bangunan Factory Sharing	1	Unit	6.108.400.000
		Peralatan dan Mesin	1	Unit	

3.4.2. Realisasi

Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 merupakan implementasidari DIPA Tugas Pembantuan Kementerian/Lembaga dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak/juknis) masing-masing program/kegiatan yang dialokasikan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Realisasi kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan menjadi gambaran tentang tingkat capaian kinerja kegiatan Tugas Pembantuan. Pengukuran tingkat capaian kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan dan anggaran menurut program/kegiatan Tugas Pembantuan pada Perangkat Daerah (PD). Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (goals and

objectivies). Kinerja kegiatan dan sasaran merupakan ukuran tingkat capaian indikator kinerja yang dicapai pada kegiatan dan sasaran. DIPA Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kutai Kartanegara Tahun 2022 yang telah menjabarkan indikator kinerja output dan input sebagai basis kuantitatif pengukuran kinerja program/kegiatan dan anggaran.

Tabel 92. Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket.
1	Kementrian Koperasi dan UMK	Permenkop UKM RI No. 6 Tahun 2022	**Program:** Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi **Kegiatan:** Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok UKM **Output :** UKM/Sentra yang difasilitasi Pengembangan Factory Sharing **Rincian Kegiatan :** Pembangunan Factory Sharing pada sentra UKM	Ds. Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Kutai Kartanegara	6.108.400.000	5.985.129.897	97,98	Bangunan Rumah Produksi Bersama dan Mesin Jahe	64,50	- Sisa pekerjaan yang belum diselesaikan di akhir tahun 2022 (Bangunan Rumah Produksi Bersama dan Mesin Jahe) dilanjutkan di Tahun 2023 sesuai PMK 189/2022: menggunakan jaminan pembayaran akhir Tahun (Bank Garansi) - Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan di tahun 2023, selama 50 hari kalender sebagaimana dalam SSUK
2	Kementerian Perdagangan	Permendag RI Nomor: 66 Tahun 2021	**Program:** Perdagangan Dalam Negeri **Kegiatan:** Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan **Rincian Kegiatan:** Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat	Ds. Sebuntal Kec. Marangkayu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara	3.000.000.000	2.630.016.771	89,67	Pembangunan Pasar Rakyat	87,67	Pemanfaatan Pasar masih menunggu Proses Hibah dari Kementrian

Sumber: Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2022

3.5. Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdangangan, Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan adalah

1. Masih adanya DIPA yang turun dipertengahan tahun, sehingga berdampak terhadap lambatnya proses-proses penyelesaian pekerjaan secara administratif seperti penunjukan PPK, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran. Kondisi lambatnya proses administratif ini akan berdampak terhadap lambatnya pelaksanaan operasional dilapangan dan pekerjaan fisik melebihi tahun anggaran seperti pada paket pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi bersama.
2. Masih rendahnya koordinasi dari perangkat daerah yang melaksanakan pekerjaan tugas pembantuan dalam memberikan informasi terkait pekerjaan tugas pembantuan tahun 2022, sehingga informasi terkait dengan kebutuhan akan pelaksanaan tugas pembantuan tidak optimal.
3. Pelaksana / penyedia jasa Kurang mempunyai kompetensi terhadap pekerjaan, sehingga pekerjaan yang dilaksanakan belum optimal.
4. Dari sisi *ex-post* pelaksanaan, Belum tersedianya infrastruktur dasar pendukung untuk pemanfaatan paket pekerjaan, seperti Jaringan Air dan Listrik, serta akses jalan yang baik menuju lokasi paket pekerjaan.

3.6. Saran dan Tindaklanjut

a. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pembantuan, melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dengan proses hibah sesuai dengan pentunjuk teknis kementerian atas Paket Pekerjaan yang dilaksanakan ke Pemerintah Pusat dari Barang Milik Negara menjadi Barang Milik Daerah, sehingga Pengelolaan dan kebermanfaatan dari Pasar Rakyat dan Rumah Produksi Bersama bisa optimal dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Perangkat Daerah pelaksana tugas pembantuan mengajukan usulan penambahan sarana dan prasarana infrastruktur dasar (air dan Listrik) serta akses jalan yang baik, pada perencanaan di tahun 2023 (Perubahan APBD 2023) dan Perencanaan Tahun 2024.

c. Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan monitoring dan pengendalian atas perpanjangan pelaksanaan pembangunan Rumah Produksi Bersama, sehingga target tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,

d. Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Kartanegara untuk dapat meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan Bappeda, Inspektorat Daerah, Bagian Pembangunan serta Stakeholder terkait guna melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan dan keberlanjutan Pemanfaatan paket pekerjaan.

BAB IV
Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, bahwa SPM Bidang Pendidikan meliputi:

1. Pendidikan Anak Usia Dini

   Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Usia Dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD.

2. Pendidikan Dasar

   Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI/SMP/MTs).

3. Pendidikan Kesetaraan

   Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan.

4.1.2. Target Pencapaian SPM

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, target capaian Pemerintah Daerah dalam pemenuhan SPM setiap jenis pelayanan dasar pada bidang Pendidikan adalah 100% tiap tahunnya

4.1.3. Realisasi

a. Realisasi Capaian Layanan Dasar Bidang Pendidikan

Tabel 93. Realisasi Capaian Layanan Dasar Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian 2022
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi Dalam PAUD	100%	29.356	23.109	78,72 %
2	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTS)	100%	138.395	135.001	97,55%
3	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (Yg Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menegah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)	100%	2.129	1.421	66,74%

Sumber: e-SPM Kemendagri: 2022

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini dicapai melalui perhitungan dengan cara:

$$= \frac{Jumlah\ Anak\ Usia\ 5-6\ Tahun\ yang\ sudah\ tamat\ atau\ sedang\ belajar\ di\ satuan\ PAUD}{Jumlah\ Warga\ Negara\ Usia\ 5-6\ Tahun} \times 100$$

$$= \frac{23.109}{29.356} \times 100$$

$$= 78{,}7293{,}31\%$$

Capaian Layanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2022 sebesar 78,72%, dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Usia 5-6 Tahun pada tahun 2022 sebanyak 29.356 Jiwa dengan partisipasi bersekolah pada Pendidikan anak usia dini sebesar 23.109 Jiwa yang mengenyam Pendidikan anak usia dini.

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar dicapai melalui perhitungan dengan cara:

$$= \frac{\begin{matrix} Jumlah\ Anak\ Usia\ 7-15\ Tahun \\ yang\ sudah\ tamat\ atau\ sedang\ belajar \\ di\ satuan\ Pendidikan\ Dasar\ (SD/MI, SMP/MTS) \end{matrix}}{Jumlah\ Warga\ Negara\ Usia\ 7-15\ Tahun} \times 100$$

$$= \frac{135.001}{138.395} \times 100$$

$$= 97{,}55\%$$

Capaian Layanan Dasar Pendidikan Dasar pada tahun 2022 sebesar 97,55%, dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Usia 7-15 Tahun pada tahun 2022 sebanyak 138.395 orang dengan partisipasi bersekolah pada Pendidikan Dasar sebesar 135.001 orang yang mengenyam Pendidikan Dasar.

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan dicapai melalui perhitungan dengan cara:

$$= \frac{\begin{matrix} Jumlah\ Anak\ Usia\ 7-18\ Tahun \\ yang\ belum\ menyelesaikan\ pendidikan\ dasar\ dan\ menengah \\ yang\ sudah\ tamat\ atau\ sedang\ belajar\ di\ pendidikan\ kesetaraan \end{matrix}}{\begin{matrix} Jumlah\ Anak\ Usia\ 7-18\ Tahun \\ yang\ belum\ menyelesaikan\ pendidikan\ dasar\ dan\ menengah \end{matrix}} \times 100$$

$$= \frac{1.421}{2.129} \times 100 = 66{,}74\%$$

Capaian Layanan Dasar Kesetaraan pada tahun 2022 sebesar 66,74%, dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2022 sebanyak 2.129 orang dengan partisipasi bersekolah pada Pendidikan Kesetaraan sebesar 1.421 orang yang mengenyam Pendidikan Kesetaraan.

b. Realisasi Mutu Layanan Dasar Bidang Pendidikan

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak. Adapun capaian Mutu Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan sebagai berikut:

1) Pendidikan Anak Usia Dini

Tabel 94. Realisasi Mutu Layanan Dasar Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
Pendidikan Anak Usia Dini	1. Buku Gambar	18.927	16.278	2.649	86,00%
	2. Alat Mewarnai	18.927	16.278	2.649	86,00%
	3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	18.927	16.278	2.649	86,00%
	4. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	571	414	157	72,50%
	5. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	2.055	1.342	713	65,30%
Pencapaian Mutu Layanan Dasar					**79,16%**

Sumber: e-SPM Kemendagri: 2022

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 5 aspek pencapaian mutu layanan dasar dinilai dengan menggunakan nilai capaian mutu yang membandingkan jumlah yang dibutuhkan dengan jumlah yang tersedia.

Pada pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terdapat 5 aspek standar mutu layanan, melihat jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Usia 5-6 Tahun

pada tahun 2022 sebanyak 138.395 Jiwa, dengan capaian pemenuhan 8 aspek pencapaian mutu sebesar 79,16%.

2) Pendidikan Dasar

Tabel 95. Realisasi Mutu Layanan Dasar Pelayanan Pendidikan Dasar

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
Pendidikan Dasar	1. Buku Teks Pelajaran	135.001	100.228	34.773	74,24%
	2. Perlengkapan Belajar	135.001	100.228	34.773	74,24%
	3. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	628	611	17	97,29%
	4. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat	669	393	276	58,74%
	5. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	6.272	6.272	0	100,00%
	6. Penyediaan biaya personil peserta didik	135.001	100.228	34.773	74,24%
	7. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	7.485	7.478	7	99,91%
	8. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	622	612	10	98,39%
Pencapaian Mutu Layanan Dasar					**84,63%**

Sumber: e-SPM Kemendagri: 2022

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 8 aspek pencapaian mutu layanan dasar dinilai dengan menggunakan nilai capaian mutu yang membandingkan jumlah yang dibutuhkan dengan jumlah yang tersedia.

Pada Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTS) terdapat 8 aspek standar mutu layanan, melihat jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Usia 7-18 Tahun pada tahun 2022 sebanyak 29.356 Jiwa, dengan capaian pemenuhan 8 aspek pencapaian mutu sebesar 84,63%.

3) Pendidikan Kesetaraan

Tabel 96. Realisasi Mutu Layanan Dasar Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
	1. Modul Belajar	1.421	780	641	54,89%

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
Pendidikan Kesetaraan	2. jumlah rombongan belajar di PKBM	155	155	0	100,00%
	3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	1.421	780	641	54,89%
	4. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	228	164	64	71,93%
	5. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	24	22	2	91,67%
	6. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	22	19	3	86,36%
	7. Perlengkapan Belajar	1421	780	641	54,89%
	8. PKBM Terakreditasi minimal C	24	12	12	50,00%
Pencapaian Mutu Layanan Dasar					**70,58%**

Sumber: e-SPM Kemendagri: 2022

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 8 aspek pencapaian mutu layanan dasar dinilai dengan menggunakan nilai capaian mutu yang membandingkan jumlah yang dibutuhkan dengan jumlah yang tersedia.

Pada Pendidikan Kesetaraan terdapat 8 aspek standar mutu layanan, melihat Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2022 sebanyak 2.129 Jiwa, dengan capaian pemenuhan 8 aspek pencapaian mutu sebesar 70,58%.

c. Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Pendidikan

Tabel 97. Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Penerima Pelayanan Dasar	Capaian Mutu Layanan Dasar	Indeks Pencapaian SPM	Kategori
1	Pendidikan Anak Usia Dini	78,72%	79,16%	78,81%	Tuntas Pratama
2	Pendidikan Dasar	97,55%	84,63%	94,96%	Tuntas Utama
3	Pendidikan Kesetaraan	66,74%	70,58%	67,51%	Tuntas Muda
IPSM Urusan Pendidikan				**80,43%**	**Tuntas Madya**

Sumber: e-SPM Kemendagri: 2022

Pengukuran Penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan menggunakan Indeks Pencapaian SPM (IPSM) yang diperoleh berdasarkan perhitungan Capaian Mutu Layanan Dasar dengan Capaian Penerima Pelayanan Dasar.

Capaian Mutu Layanan Dasar merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata–rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis, sedangankan Capaian Penerima Pelayanan Dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja.

$$\boldsymbol{IPSM} = (\%\ \boldsymbol{capaian\ penerima\ layanan\ dasar} \times \mathbf{80}\%) + (\%\ \boldsymbol{capaian\ mutu\ layanan\ dasar} \times \mathbf{20}\%)$$

Pada Bidang Pendidikan penerapan SPM di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2022 Indeks Pencapaian SPM sebesar 80,43% dengan kategori predikat **Tuntas Madya.**

4.1.4. Alokasi Anggaran

Dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menganggarkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 98. Alokasi dan Realisasi Anggaran Penunjang SPM Bidang Pendidikan

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realiasasi	%
Pendidikan Anak Usia Dini	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**24.868.070.000**	**30.429.140.000**	**25.032.219.678**	**82,26%**
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	705.000.000	800.775.000	782.342.500	97,70%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.113.920.000	2.502.750.000	2.463.454.900	98,43%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang	100.000.000	100.000.000	99.628.000	99,63%

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realiasasi	%
	Kelas/Ruang Guru PAUD				
	Pengadaan Mebel PAUD	100.000.000	100.000.000	89.607.000	89,61%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	495.000.000	5.557.765.000	5.402.638.900	97,21%
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	200.000.000	200.000.000	179.450.000	89,73%
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	420.000.000	720.000.000	681.350.000	94,63%
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	20.734.150.000	20.447.850.000	15.333.748.378	74,99%
Pendidikan Dasar	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**148.889.472.000**	**182.205.678.944**	**175.332.926.822**	**96,23%**
	Penambahan Ruang Kelas Baru	0	1.500.000.000	0	0,00%
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	200.000.000	200.000.000	185.030.000	92,52%
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	520.114.536	580.959.536	572.245.450	98,50%
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	765.975.024	812.490.024	779.162.424	95,90%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.005.676.096	6.566.493.240	6.412.707.850	97,66%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	250.000.000	750.000.000	741.731.150	98,90%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	250.000.000	246.699.100	98,68%
	Pengadaan Mebel Sekolah	3.456.886.344	24.825.860.144	24.520.899.950	98,77%
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	900.000.000	1.300.000.000	663.000.000	51,00%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5.745.000.000	16.176.416.000	16.097.530.200	99,51%
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	300.000.000	300.000.000	299.889.500	99,96%
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	695.000.000	695.000.000	642.408.000	92,43%
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	131.050.820.000	128.248.460.000	124.171.623.198	96,82%
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama	**104.202.520.000**	**106.644.798.000**	**94.745.194.230**	**88,84%**
	Penambahan Ruang Kelas Baru	116.919.000	151.901.000	149.799.500	98,62%
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	327.891.000	369.273.000	334.423.000	90,56%
	Pembangunan Laboratorium	9.729.137.150	10.234.197.150	9.483.788.200	92,67%

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realiasasi	%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.161.798.000	2.548.210.000	2.342.356.650	91,92%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	8.871.384.700	9.206.716.700	8.551.979.900	92,89%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.093.858.250	1.205.964.250	1.134.974.800	94,11%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	2.586.826.300	2.790.114.300	2.623.746.480	94,04%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	476.618.500	540.372.500	456.343.430	84,45%
	Pengadaan Mebel Sekolah	4.503.857.100	4.655.559.100	4.487.640.000	96,39%
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	280.000.000	317.358.000	317.051.600	99,90%
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	975.000.000	1.430.000.000	1.123.850.000	78,59%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	6.615.860.000	6.731.762.000	6.637.358.000	98,60%
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.045.000.000	1.045.000.000	743.882.000	71,18%
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	65.418.370.000	65.418.370.000	56.358.000.670	86,15%
Pendidikan Kesetaraan	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**3.332.442.000**	**4.485.072.000**	**3.210.313.100**	**71,58%**
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	1.532.110.010	1.624.950.010	1.514.479.100	93,20%
	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150.331.990	180.226.990	178.170.000	98,86%
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0,00%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	300.000.000	329.895.000	223.563.000	67,77%
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	350.000.000	1.350.000.000	1.294.101.000	95,86%
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan		**281.292.504.000**	**323.764.688.944**	**298.320.653.830**	**92,14%**

Sumber: Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022

4.1.5. Dukungan Personil

Dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara didukung dengan sumber daya manusia dengan rincian sebagai berikut:

- Pejabat Esselon 2 = 1 Orang
- Pejabat Esselon 3 = 5 Orang
- Pejabat Esselon 4 = 26 Orang
- Pegawai PNS = 560 Orang
- THL = 457 Orang
- THS = 4 393 Orang
- P3K = 607 Orang
- Guru ASN = 4.708 Orang
- Pengawas = 174 Orang
- Penilik = 11 Orang

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a. Pelayanan Pendidikan Dasar

- Luasnya jangkauan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga untuk tempat-tempat tertentu sulit dijangkau satuan pendidikan.
- Persebaran penduduk yang tidak merata dengan tingkat kepadatan kurang lebih 28 jiwa per kilometer persegi menuntut untuk memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal.
- Kebutuhan sarana dan prasarana sekolah yang cukup besar untuk memenuhi layanan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kekurangan tenaga pendidikan yang berstatus ASN.
- Masih rendahnya mutu dan kopetensi guru.

b. Pelayanan Pendidikan Kesetaraan

- Kurangnya jumlah Pendidik (pamong belajar)
- Minimnya informasi tentang pendidikan kesetaraan
- Rendahnya minat warga putus sekolah untuk melanjutkan pendidikannya.
- Lokasi warga putus sekolah terpencar-pencar dan terpisah jarak yang cukup jauh.
- Kurangnya jumlah lembaga pendidikan kesetaraan.

c. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD))

- Minat orang tua menyekolahkan anak di PAUD masih rendah terutama untuk jenjang usia kelompok bermain.
- Belum tersosialisasinya program wajib PAUD secara maksimal kepada masyarakat.
- Rendahnya kopetensi pendidik PAUD
- Banyaknya pendidik PAUD yang belum berijasah S1
- Kepala sekolah PAUD sebagian belum berijasah S1.

2) Solusi

- Pelayanan Pendidikan Dasar
- Memaksimalkan Anggaran APBD, DAK dan Bankeu dengan melakukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana
- Pengangkatan guru honor sekolah yang digaji melalui dana BOS dan BOSKab
- Pelatihan, bimtek dan in house trining bagi guru dengan memanfaatkan anggaran APBD dan dana sekolah

- Memaksimalkan peran komunitas belajar bagi guru dalam upaya meningkatkan kopetensi guru.

a. Pelayanan Pendidikan Kesetaraan

- Memanfaatkan pendidik pada satuan pendidikan formal untuk menjadi pamong belajar pada satuan pendidikan kesetaraan dan mengangkat penduduk setempat yang berijasah S1 untuk menjadi pamong belajar
- Melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat akan keberadaan pendidikan kesetaraan melalui tatap muka, media sosial dan website
- Membentuk kelompok belajar sesuai tempat lokasi terdekat dengan warga belajar
- Mengutamakan sistem pembelajaran denmgan setara daring dan modul.
- Kolaborasi semua stake holder dalam melakukan pengentasan putus sekolah mulai desa, kecamatan, perusahaan dan dinas pendidikan
- Melakukan pembinaan pamong belajar melalui bimbingan teknis dalam penerapan proses pembelajaran.

b. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD))

- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akanpentingnya PAUD desa/kelurahan dan kecamatan bagi anak-anak mereka
- Memaksimalkan peran bunda PAUD dalam mengedukasi masyarakat akan pentingnya PAUD sebagai pondasi pendidikan
- Pelatihan berjenjang bagi guru-guru PAUD dengan berkoordinasi dengan OPD dan lembaga terkait

- Pemenuhan sarana dan prasarana PAUD dalam upaya peningkatan mutu layanan PAUD.

4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan, bahwa SPM Bidang Kesehatan meliputi:

1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4) Pelayanan Kesehatan Balita
5) Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar
6) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8) Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi
9) Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus
10) Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
11) Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis
12) Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemah Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)

4.2.2. Target Pencapaian SPM

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan,

target capaian Pemerintah Daerah dalam pemenuhan SPM setiap jenis pelayanan dasar pada bidang Kesehatan adalah 100% tiap tahunnya.

4.2.3. Realisasi

a. Realisasi Capaian Layanan Dasar

Tabel 99. Realisasi Capaian Layanan Dasar Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian 2022
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	100%	13.723	12.619	91,96%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase jumlah ibu bersalin yang mendapatkan Pelayanan Persalinan	100%	13.101	12.385	94,53%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	12.477	12.133	97,24%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100%	60.339	50.923	84,39%
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	139.267	139.267	100,00%
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Persentase orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	488.840	449.456	91,94%
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas medapatkan skrining kesehetan sesuai standar	100%	48.399	43.843	90,59%
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	54.636	54.636	100,00%
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	15.682	15.682	100,00%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Jumlah orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100%	829	829	100,00%
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis	Persentase Jumlah orang orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan standar kesehatan	100%	5.811	5.811	100,00%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemah daya tahan tubuh manusia (HIV)	Persentase Jumlah orang orang dengan risiko terinfeksi virus yang Melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	16.254	16.254	100,00%

Sumber : e-SPM Kemendagri, Tahun 2022

1. Pencapaian pemenuhan SPM Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dicapai melalui perhitungan dengan cara:

$$= \frac{\begin{array}{c}Jumlah\ Ibu\ Hamil\ yang\ mendapatkan\ pelayanan\ antenatal \\ sesuai\ standar\ di\ wilayah\ kerja\ kabupaten\ / \\ kota\ dalam\ kurun\ waktu\ satu\ tahun\end{array}}{\begin{array}{c}Jumlah\ sasaran\ ibu\ hamil\ di\ wilayah\ kerja \\ Kabupaten\ /\ Kota\ \ dalam\ kurun\ waktu\ satu\ tahun\end{array}} \times 100$$

$$= \frac{12.619}{13.723} \times 100 = 91{,}96\%$$

Capaian Layanan Kesehatan Ibu Hamil pada Tahun 2022 sebesar 91,96 %, dengan jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar pada tahun 2022 sebanyak 12.619 Ibu Hamil, dengan jumlah sasaran ibu hamil di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 13.723 Ibu Hamil. Peningkatan ini disebabkan perbaikan pada sistem manajemen program dan pandemic COVID-19 yang sudah teratasi dengan cukup baik. Berikut adalah grafik capaian SPM ibu hamil dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

2. Pencapaian pemenuhan SPM Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dicapai melalui perhitungan dengan cara:

$$= \frac{\begin{array}{c}Jumlah\ ibu\ bersalin\ yang\ mendapatkan\ pelayanan\ persalinan\ sesuai\ standar \\ di\ fasilitas\ pelayanan\ kesehatan\ di\ wilayah\ kerja\ Kabupaten \\ /\ Kota\ dalam\ Kurun\ waktu\ satu\ tahun\end{array}}{\begin{array}{c}Jumlah\ Sasaran\ Ibu\ bersalin\ di\ wilayah\ kerja \\ Kabupaten\ /\ Kota\ dalam\ Kurun\ waktu\ satu\ tahun\end{array}} \times 100$$

$$= \frac{12.385}{13.101} \times 100$$

$$= 94{,}53\%$$

Capaian Layanan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2022 sebesar 94,53%, dengan jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan sesuai standar pada tahun 2022

sebanyak 12.385 Ibu bersalin, dengan jumlah sasaran ibu bersalin di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 13.101 Ibu Bersalin. Perbaikan pada fasilitas pelayanan baik pemenuhan sarana dan prasarana pertolongan persalinan, pelaksanaan P4K yang berjalan baik dan pemantaun PWS-KIA sangat memudahkan petugas dalam melakukan monitoring sasaran calon ibu bersalin agar bisa melahirkan di fasilitas kesehatan dan di tolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten.

3. Pencapaian pemenuhan SPM Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dicapai melalui perhitungan dengan cara:

$$= \frac{\begin{array}{c}jumlah\ bayi\ baru\ lahir\ \ umur\ 0\ -\ 28\ hari\ yang\ mendapatkan\ pelayanan \\ kesehatan\ Bayi\ Baru\ Lahir\ sesuai\ dengan\ standar \\ dalam\ kurun\ waktu\ satu\ tahun\end{array}}{\begin{array}{c}Jumlah\ Sasaran\ Bayi\ Baru\ Lahir\ \ di\ wilayah\ kerja\ Kabupaten/Kota \\ dalam\ Kurun\ waktu\ satu\ tahun\end{array}} \times 100$$

$$= \frac{12.133}{12.477} \times 100$$

$$= 97.24\%$$

Capaian Layanan Kesehatan Bayi Baru Lahir pada Tahun 2022 sebesar 97,24%, dengan jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 sebanyak 12.133 Bayi berumur 0 – 28 hari, dengan jumlah sasaran bayi baru berumur 0 - 28 hari di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 12.477 bayi. Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir adalah pelayanan yang diberikan pada bayi baru lahir sampai dengan masa neonatus dengan memenuhi standar kuantitas maupun standar kualitas pelayanan.

4. Pencapaian pemenuhan SPM Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Balita dicapai melalui perhitungan dengan cara:

$$= \frac{\begin{array}{c} Jmlh\ Balita\ U\ 12-23\ Bln\ mendapat\ pelayanan\ kesehatan\ sesuai\ standar\ + \\ Jmlh\ Balita\ U\ 24\ -\ 35\ Bln\ mendapatkan\ pelayanan\ kesehatan\ sesuai\ standar\ + \\ Balita\ U\ 36\ -\ 59\ Bln\ mendapat\ pelayanan\ kesehatan\ sesua\ standar \end{array}}{\begin{array}{c} Jumlah\ Balita\ U\ 12-59\ Bulan\ \ di\ wilayah\ kerja\ Kabupaten/Kota \\ dalam\ Kurun\ waktu\ satu\ tahun \end{array}} \times 100$$

$$= \frac{50.923}{60.793} \times 100$$

= 84,39%

Capaian Layanan Kesehatan Balita pada Tahun 2022 sebesar 84,39%, dengan jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 sebanyak 50.923 Balita, dengan jumlah sasaran bayi berumur 12 - 59 bulan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 60.793 bayi.

5. Pencapaian pemenuhan SPM Kesehatan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar dicapai melalui perhitungan dengan cara:

$$= \frac{\begin{array}{c} Jumlah\ anak\ usia\ pendidikan\ dasar\ yang\ mendapatkan\ pelayanan\ kesehatan \\ sesuai\ standar\ \ di\ wilayah\ kerja\ Kabupaten\ /\ Kota\ dalam\ Kurun\ waktu\ satu\ tahun \end{array}}{\begin{array}{c} Jumlah\ Semua\ Anak\ Usia\ Pendidikan\ Dasar\ yg\ ada\ \ di\ wilayah\ kerja\ Kabupaten/Kota \\ dalam\ Kurun\ waktu\ satu\ tahun \end{array}} \times 100$$

$$= \frac{139.267}{139.267} \times 100$$

= 100%

Capaian Layanan Kesehatan anak usia pendidikan dasar pada Tahun 2022 sebesar 100%, angka ini meliputi pelayanan yang dilakukan di dalam gedung dan luar gedung dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 sebanyak 139.267 Anak Usia Pendidikan Dasar, dengan jumlah sasaran Anak Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 139.267 anak.

6. Pencapaian pemenuhan SPM Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Usia Produktif dicapai melalui perhitungan dengan cara:

$$= \frac{\begin{array}{c} Jumlah\ Orang\ Usia\ 15\ -\ 59\ Tahun\ di\ Kab/Kota \\ yang\ mendapatkan\ pelayanan\ skrining\ kesehatan \\ sesuai\ \ standar\ dalam\ kurun\ waktu\ satu\ tahun \end{array}}{Jumlah\ Orang\ Usia\ 15\ -\ 59\ Tahun\ di\ Kab\ /\ Kota\ dalam\ kurun\ waktu\ satu\ tahun} \times 100$$

$$= \frac{449456}{488.840} \times 100$$

= 91,94%

Capaian Layanan Kesehatan pada usia produktif pada Tahun 2022 sebesar 91,94%, dengan jumlah warga negara pada usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 sebanyak 449.456 orang, dengan jumlah sasaran warga negara pada usia produktif di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 488.840 orang.

Tingginya sasaran (488.840 jiwa) yang tersebar di seluruh wilayah Kutai Kartanegara, masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan, penanggung jawab program rnerangkap tugas, serta belum optimalnya koordinasi lintas program dan lintas sektor sangat berpengaruh terhadap capaian SPM.

7. Pencapaian pemenuhan SPM Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut dicapai melalui perhitungan dengan cara:

$$\frac{\begin{array}{c}Jumlah\ warga\ negara\ usia\ 60\ tahun\ atau\ lebih \\ yang\ mendapatkan\ skrining\ kesehatan\ sesuai\ standar\ minimal\ 1\ kali \\ yang\ ada\ di\ kerja\ Kabupaten\ /\ Kota\ dalam\ Kurun\ waktu\ satu\ tahun\end{array}}{\begin{array}{c}Jumlah\ warga\ negara\ usia\ 60\ tahun\ atau\ lebih \\ yang\ ada\ di\ Kab\ /\ Kota\ dalam\ kurun\ waktu\ satu\ tahun\end{array}} \times 100$$

$$= \frac{43.843}{48.399} \times 100$$

= 90,59%

Capaian Layanan Kesehatan pada usia usia lanjut pada Tahun 2022 sebesar 90,59%, dengan jumlah warga negara pada usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 sebanyak 43.843 orang, dengan jumlah sasaran warga negara pada usia lanjut di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 48.399 orang. Seperti capaian pelayanan kesehatan yang

lain, pada usia lanjut terjadi perbaikan manajemen program dan integrasi poyandu lansia dan posbindu.

8. Pencapaian pemenuhan SPM Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dicapai melalui perhitungan dengan cara:

$$= \frac{\substack{Jumlah\ penderita\ hipertensi\ usia\ lebih\ atau\ sama\ dengan\ 15\ tahun \\ di\ wilayah\ kerja\ Kabupaten\ /\ Kota\ dalam\ Kurun\ waktu\ satu\ tahun}}{\substack{Jumlah\ Estimasi\ penderita\ hipertensi\ usia\ \ lebih\ atau\ sama\ dengan\ 15\ tahun \\ di\ wilayah\ kerja\ Kab./Kota\ berdasarkan\ angka\ prevalensi \\ dalam\ kurun\ waktu\ satu\ tahun}} \times 100$$

$$= \frac{54.636}{54.636} \times 100$$

$$= 100\%$$

Capaian Layanan Kesehatan pada warga negara penderita hipertensi pada Tahun 2022 sebesar 100%, dengan jumlah warga negara pada penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 sebanyak 54.636 orang, dengan jumlah estimasi warga negara penderita hipertensi di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 54.636 orang.

Hipertensi masih dianggap hal yang biasa oleh sebagian besar masyarakat sehingga banyak orang dengan hipertensi tidak melakukan pengobatan secara rutin. Walaupun capaian SPM sudah 100 % tetapi edukasi kepada masyarakat harus selalu ditingkatkan agar masyarakat lebih peduli terhadap masalah kesehatannya.

9. Pencapaian pemenuhan SPM Kesehatan pada Pelayanan Penderita Diabetes Melitus dicapai melalui perhitungan dengan cara:

$$= \frac{\substack{Jumlah\ penderita\ diabetes\ melitus\ usia\ \ lebih\ atau\ sama\ dengan\ 15\ thn \\ diwikayah\ kerja\ kab./kota\ yang\ mendapatkan\ pelayanan\ kesehatan \\ sesuai\ stadar\ dalam\ kurun\ watu\ satu\ tahun}}{\substack{Jumlah\ Estimasi\ penderita\ diabetes\ melitus\ usia\ \ lebih\ atau\ sama\ dengan\ 15\ tahun \\ di\ wilayah\ kerja\ Kab/Kota\ berdasarkan\ angka\ prevalensi \\ dlm\ kurun\ waktu\ satu\ tahun}} \times 100$$

$$= \frac{15.682}{15.682} \times 100$$

$$= 100\%$$

Capaian Layanan Kesehatan pada warga negara penderita *diabetes melitus* pada Tahun 2022 sebesar 100%, dengan jumlah warga negara pada penderita *diabetes melitus* yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 sebanyak 15.682 orang, dengan jumlah estimasi warga negara penderita *diabetes melitus* di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 15.682 orang.

Diabetes Melitus masih dianggap hal yang biasa oleh sebagian besar masyarakat sehingga banyak orang dengan Diabetes Melitus tidak melakukan pengobatan secara rutin. Walaupun capaian SPM sudah 100 % tetapi edukasi kepada masyarakat harus selalu ditingkatkan agar masyarakat lebih peduli terhadap masalah kesehatannya.

10. Pencapaian pemenuhan SPM Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat dicapai melalui perhitungan dengan cara:

$$= \frac{\begin{array}{c}Jumlah\ ODGJ\ Berat\ di\ wikayah\ kerja\ kabupaten/kota \\ yang\ mendapatkan\ pelayanan\ kesehatan\ sesuai\ stadar \\ dalam\ kurun\ watu\ satu\ tahun\end{array}}{\begin{array}{c}Jumlah\ ODGJ\ Berat\ berdasarkan\ proyeksi\ diwilayah\ kerja \\ Kabupaten\ /\ Kota\ dalam\ kurun\ waktu\ satu\ tahun\ yang\ sama\end{array}} \times 100$$

$$= \frac{829}{829} \times 100$$

$$= 100\%$$

Capaian Layanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat pada Tahun 2022 sebesar 100%, dengan jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 sebanyak 829 orang, dengan jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 829 orang.

Capaian tersebut tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan dalam penanganan terhadap penderita ODGJ dengan membangun kerjasama lintas

program dan lintas sektor antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja, BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Rujukan (RSUD Atma Husada).

11. Pencapaian pemenuhan SPM Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dicapai melalui perhitungan dengan cara:

$$= \frac{\substack{Jumlah\ orang\ terduga\ \ Tuberkulosis\ (TBC) \\ yang\ dilakukan\ pemeriksaan\ penunjang\ dalam\ kuru\ waktu\ satu\ tahun}}{\substack{Jumlah\ Orang\ terduga\ \ Tuberkulosis\ (TBC)\ diwilayah\ kerja\ Kab/Kota \\ dalam\ kurun\ waktu\ satu\ tahun\ yang\ sama}} \times 100$$

$$= \frac{5.811}{5.811} \times 100$$

$$= 100\%$$

Capaian Layanan Kesehatan pada Orang terduga *tuberkulosis* pada Tahun 2022 sebesar 100%, dengan jumlah Orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 sebanyak 5.811 orang, dengan jumlah Orang terduga tuberkulosis di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 5.811 orang. Dari hasil skrining menggunakan Tes Cepat Molekuler (TCM) ditemukan 935 orang dinyatakan positif atau 11.63%. Jumlah penderita TBC yang ditemukan pada tahun 2021 sebanyak 713. Adanya kenaikan jumlah penderita TBC yang ditemukan menunjukkan bahwa penyakit TBC masih perlu mendapatkan perhatian yang serius agar dapat mencapai eliminasi TBC pada tahun 2030.

12. Pencapaian pemenuhan SPM Kesehatan pada Pelayanan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemah daya tahan tubuh manusia (HIV) dicapai melalui perhitungan dengan cara:

$$= \frac{\substack{Jumlah\ Orang\ dengan\ resiko\ Terinfeksi\ HIV \\ yang\ mendapatkan\ pelayanan\ sesuai\ standar\ dalam\ kurun\ waktu\ satu\ tahun}}{\substack{Jumlah\ orang\ dengan\ resiko\ terinfeksi\ HIV \\ di\ Kab\ /\ Kota\ dalam\ kurun\ waktu\ satu\ tahun\ yang\ sama}} \times 100$$

$= \frac{16.254}{16.254} \times 100 = 100\%$

Capaian Layanan Kesehatan pada Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV pada Tahun 2022 100%, dengan jumlah Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 sebanyak 16.254 orang, dengan jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang terhimpun di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari wanita pekerja seksual (WPS), lelaki seks lelaki (LSL), Waria, pengguna jarum suntik, pasien Infeksi Menular Seks, pasien TB, ibu hamil dan warga binaan pemasyarakatan. Dari 16.254 orang yang berisiko terinfeksi HIV di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022.

Dari hasil skrining menggunakan tersebut ditemukan 158 orang dinyatakan positif atau 0.89%. Jumlah penderita HIV yang ditemukan pada tahun 2021 sebanyak 114. Adanya kenaikan jumlah penderita HIV yang ditemukan menunjukkan bahwa penyakit HIV masih perlu mendapatkan perhatian yang serius agar dapat mencapai Three Zero pada tahun 2030.

b. Realisasi Capaian Mutu Layanan Dasar

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak. Adapun capaian Mutu Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Tabel 100. Realisasi Capaian Mutu Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	1.887	1.887	0	100,00%
	2. Tablet Tambah Darah	1.202.940	1.202.940	0	100,00%

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	68.615	68.615	0	100,00%
	4. Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	13.723	13.723	0	100,00%
	5. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	13.723	13.723	0	100,00%
	6. Dokter/dokter spesialis kebidanan	52	52	0	100,00%
	7. Bidan	179	179	0	100,00%
	8. Perawat	211	211	0	100,00%
Pencapaian Mutu Layanan Dasar					**100%**

Sumber : e-SPM Kemendagri : 2022

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 8 aspek pencapaian mutu layanan dasar dinilai dengan menggunakan nilai capaian mutu yang membandingkan jumlah yang dibutuhkan dengan jumlah yang tersedia.

Pada Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil terdapat 8 aspek standar mutu layanan, melihat jumlah sasaran ibu hamil di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 13.723 Ibu Hamil, dengan capaian pemenuhan 8 aspek pencapaian mutu sebesar 100%.

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Tabel 101. Realisasi Pencapaian Mutu Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. Formulir Partograf	13.101	13.101	0	100,00%
	2. Kartu ibu (rekam medis)	13.101	13.101	0	100,00%
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	13.101	13.101	0	100,00%
	4. Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	52	52	0	100,00%
	5. Bidan	179	179	0	100,00%
	6. Perawat	211	211	0	100,00%
Pencapaian Mutu Layanan Dasar					**100%**

Sumber : e-SPM Kemendagri : 2022

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 6 aspek pencapaian mutu layanan dasar dinilai dengan menggunakan nilai capaian mutu yang membandingkan jumlah yang dibutuhkan dengan jumlah yang tersedia.

Pada Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin terdapat 6 aspek standar mutu layanan, melihat jumlah sasaran ibu bersalin di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 13.101 Ibu Bersalin, dengan capaian pemenuhan 6 aspek pencapaian mutu sebesar 100%.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Tabel 102. Realisasi Pencapaian Mutu Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1. Vaksin Hepatitis BO	12.477	12.133	344	97,24%
	2. Vitamin K1 Injeksi	12.477	12.133	344	97,24%
	3. Salep/Tetes Mata Antibiotik	12.477	12.133	344	97,24%
	4. Formulir Bayi Baru Lahir	12.477	12.133	344	97,24%
	5. Formulir MTBM	12.477	12.133	344	97,24%
	6. Buku KIA	12.477	12.133	344	97,24%
	7. Dokter/dokter spesialis Anak	52	52	0	100,00%
	8. Bidan	179	179	0	100,00%
	9. Perawat	211	211	0	100,00%
Pencapaian Mutu Layanan Dasar					**98,16%**

Sumber : e-SPM Kemendagri : 2022

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 9 aspek pencapaian mutu layanan dasar dinilai dengan menggunakan nilai capaian mutu yang membandingkan jumlah yang dibutuhkan dengan jumlah yang tersedia.

Pada Pelayanan Kesehatan Kesehatan Bayi Baru Lahir terdapat 9 aspek standar mutu layanan, melihat jumlah sasaran bayi baru berumur 0 - 28 hari di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 12.477 bayi, dengan capaian pemenuhan 9 aspek pencapaian mutu sebesar 98,16%.

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Tabel 103. Realisasi Pencapaian Mutu Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Balita

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
Pelayanan Kesehatan Balita	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	120.678	101.846	18.832	84,39%
	2. Formulir DDTK	120.678	101.846	18.832	84,39%
	3. Buku KIA	60.339	50.923	9.416	84,39%
	4. Vitamin A Biru	13.612	11.488	2.124	84,40%
	5. Vitamin A Merah	95.722	80.784	14.938	84,39%
	6. Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT -HB -Hib * Campak Rubella	4.865	4.106	759	84,40%
	7. Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	38.315	32.336	5.979	84,40%
	8. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	54.068	45.631	8.437	84,40%
	9. Peralatan Anafilaktik	948	800	148	84,39%
	10. Bidan	179	179	0	100,00%
	11. Dokter	45	45	0	100,00%
	12. Perawat	211	211	0	100,00%
	13. Ahli Gizi	49	49	0	100,00%
Pencapaian Mutu Layanan Dasar					**90,61%**

Sumber : e-SPM Kemendagri : 2022

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 13 aspek pencapaian mutu layanan dasar dinilai dengan menggunakan nilai capaian mutu yang membandingkan jumlah yang dibutuhkan dengan jumlah yang tersedia.

Pada Pelayanan Kesehatan Balita terdapat 13 aspek standar mutu layanan, melihat jumlah sasaran bayi berumur 12 - 59 bulan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 60.793 bayi, dengan capaian pemenuhan 13 aspek pencapaian mutu sebesar 90,61%.

5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar

Tabel 104. Realisasi Pencapaian Mutu Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
	1. Buku Raport Kesehatanku	139.267	139.267	0	100,00%

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	2. Buku Pemantauan Kesehatan	139.267	139.267	0	100,00%
	3. Kuesioner Skrining Kesehatan	139.267	139.267	0	100,00%
	4. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	50	50	0	100,00%
	5. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	855	855	0	100,00%
	6. Dokter/Dokter Gigi	77	77	0	100,00%
	7. Bidan	179	179	0	100,00%
	8. Perawat	211	211	0	100,00%
	9. Ahli Gizi	49	49	0	100,00%
	10. Tenaga Kesehatan Masyarakat	38	38	0	100,00%
	11. Guru	618	618	0	100,00%
	12. Kader Kesehatan	12.712	1.073	11.639	8,44%
Pencapaian Mutu Layanan Dasar					**92,37%**

Sumber : e-SPM Kemendagri : 2022

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 12 aspek pencapaian mutu layanan dasar dinilai dengan menggunakan nilai capaian mutu yang membandingkan jumlah yang dibutuhkan dengan jumlah yang tersedia.

Pada Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar terdapat 12 aspek standar mutu layanan, melihat jumlah sasaran Anak Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 139.267 anak, dengan capaian pemenuhan 12 aspek pencapaian mutu sebesar 92,37%.

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Tabel 105. Realisasi Pencapaian Mutu Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan pada usia produktif

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	1. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	1	1	0	100,00%
	2. Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	1.520.200	1.397.723	122.477	91,94%

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
	3. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	1	1	0	100,00%
	4. Dokter	45	45	0	100,00%
	5. Bidan	179	179	0	100,00%
	6. Perawat	211	211	0	100,00%
	7. Ahli Gizi	49	49	0	100,00%
	8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	38	38	0	100,00%
	9. Tenaga Non Kesehatan Terlatih	705	705	0	100,00%
Pencapaian Mutu Layanan Dasar					**99,10%**

Sumber : e-SPM Kemendagri : 2022

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 9 aspek pencapaian mutu layanan dasar dinilai dengan menggunakan nilai capaian mutu yang membandingkan jumlah yang dibutuhkan dengan jumlah yang tersedia.

Pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif terdapat 9 aspek standar mutu layanan, melihat jumlah sasaran warga negara pada usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 sebanyak 449.456 orang, dengan capaian pemenuhan 9 aspek pencapaian mutu sebesar 99,10%.

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Tabel 106. Realisasi Pencapaian Mutu Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	1. Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol	48.399	43.843	4.556	90,59%
	2. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	48.399	43.843	4.556	90,59%
	3. Buku kesehatan lansia	48.399	43.843	4.556	90,59%
	4. Dokter	45	45	0	100,00%
	5. Bidan	179	179	0	100,00%
	6. Perawat	211	211	0	100,00%

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
	7. Ahli Gizi	49	49	0	100,00%
	8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	38	38	0	100,00%
	9. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	1.850	1850	0	100,00%
Pencapaian Mutu Layanan Dasar					**99,10%**

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 9 aspek pencapaian mutu layanan dasar dinilai dengan menggunakan nilai capaian mutu yang membandingkan jumlah yang dibutuhkan dengan jumlah yang tersedia.

Pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut terdapat 9 aspek standar mutu layanan, melihat jumlah estimasi warga negara penderita hipertensi di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 54.636 orang, dengan capaian pemenuhan 9 aspek pencapaian mutu sebesar 99,10%.

8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi

Tabel 107. Realisasi Pencapaian Mutu Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	1. Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE	32	32	0	100,00%
	2. Tensimeter	32	32	0	100,00%
	3. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	1	1	0	100,00%
	4. Dokter	45	45	0	100,00%
	5. Bidan	179	179	0	100,00%
	6. Perawat	211	211	0	100,00%
	7. Tenaga Kesehatan Masyarakat	38	38	0	100,00%
Pencapaian Mutu Layanan Dasar					**100%**

Sumber : e-SPM Kemendagri : 2022

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 7 aspek pencapaian mutu layanan dasar dinilai dengan menggunakan nilai capaian mutu yang membandingkan jumlah yang dibutuhkan dengan jumlah yang tersedia.

Pada Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi terdapat 7 aspek standar mutu layanan, melihat jumlah estimasi warga negara penderita hipertensi di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 54.636 orang, dengan capaian pemenuhan 7 aspek pencapaian mutu sebesar 100%.

9. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus

Tabel 108. Realisasi Pencapaian Mutu Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	1. * Glukometer * Strip Tes Gula Darah * Kapas Alkohol * Lancet	47.296	47.296	0	100,00%
	2. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM	1	1	0	100,00%
	3. Pedoman dan Media KIE	32	32	0	100,00%
	4. Dokter	45	45	0	100,00%
	5. Bidan	179	179	0	100,00%
	6. Perawat	211	211	0	100,00%
	7. Ahli Gizi	49	49	0	100,00%
	8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	38	38	0	100,00%
Pencapaian Mutu Layanan Dasar					**100%**

Sumber : e-SPM Kemendagri : 2022

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 8 aspek pencapaian mutu layanan dasar dinilai dengan menggunakan nilai capaian mutu yang membandingkan jumlah yang dibutuhkan dengan jumlah yang tersedia.

Pada Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus terdapat 8 aspek standar mutu layanan, melihat jumlah estimasi warga negara penderita diabetes melitus di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 15.682 orang, dengan capaian pemenuhan 8 aspek pencapaian mutu sebesar 100%.

10. Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Tabel 109. Realiasi Pencapaian Mutu Layanan Dasar Pelayanan ODGJ

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Ganggungan Jiwa Berat	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	32	32	0	100,00%
	2. Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	32	32	0	100,00%
	3. Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	1	1	0	100,00%
	4. Media KIE	32	32	0	100,00%
	5. Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	256	256	0	100,00%
Pencapaian Mutu Layanan Dasar					**100%**

Sumber : e-SPM Kemendagri : 2022

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 5 aspek pencapaian mutu layanan dasar dinilai dengan menggunakan nilai capaian mutu yang membandingkan jumlah yang dibutuhkan dengan jumlah yang tersedia.

Pada Pelayanan Kesehatan Orang dengan Ganggungan Jiwa Berat terdapat 5 aspek standar mutu layanan, melihat jumlah estimasi warga negara Orang dengan Ganggungan Jiwa Berat di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 829 orang, dengan capaian pemenuhan 5 aspek pencapaian mutu sebesar 100%.

11. Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis

Tabel 110. Realiasi Pencapaian Mutu Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis	1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	820	820	0	100,00%
	2. Reagen Zn TB	36	36	0	100,00%
	3. Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	4.000	4.000	0	100,00%
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	18.000	18.000	0	100,00%
	5. Catridge tes cepat molekuler	5.820	5.820	0	100,00%

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	1	1	0	100,00%
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	3	3	0	100,00%
	8. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	58	58	0	100,00%
	9. Perawat	211	211	0	100,00%
	10. Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	32	32	0	100,00%
	11. Penata Rontgen	3	3	0	100,00%
	12. Tenaga kesehatan masyarakat	38	38	0	100,00%
	13. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	32	32	0	100,00%
Pencapaian Mutu Layanan Dasar					**100%**

Sumber : e-SPM Kemendagri : 2022

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 13 aspek pencapaian mutu layanan dasar dinilai dengan menggunakan nilai capaian mutu yang membandingkan jumlah yang dibutuhkan dengan jumlah yang tersedia.

Pada Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis terdapat 13 aspek standar mutu layanan, melihat jumlah estimasi warga negara Orang terduga tuberkulosis di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 5.811 orang, dengan capaian pemenuhan 13 aspek pencapaian mutu sebesar 100%.

12. Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemah Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)

Tabel 111. Realisasi Pencapaian Mutu Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemah daya tahan tubuh manusia (HIV)

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemah daya tahan tubuh manusia (HIV)	1. Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner	1.120	1.120	0	100,00%
	2. Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	16.254	16.254	0	100,00%
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril,	113.600	113.600	0	100,00%

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
	Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai				
	4. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	800	800	0	100,00%
	5. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	59	59	0	100,00%
	6. Perawat	211	211	0	100,00%
	7. Bidan	179	179	0	100,00%
	8. Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	32	32	0	100,00%
	9. Tenaga kesehatan masyarakat	38	38	0	100,00%
	10. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	32	32	0	100,00%
Pencapaian Mutu Layanan Dasar					**100%**

Sumber : e-SPM Kemendagri : 2022

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 10 aspek pencapaian mutu layanan dasar dinilai dengan menggunakan nilai capaian mutu yang membandingkan jumlah yang dibutuhkan dengan jumlah yang tersedia.

Pada Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemah daya tahan tubuh manusia (HIV) terdapat 10 aspek standar mutu layanan, melihat jumlah estimasi warga negara Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemah daya tahan tubuh manusia (HIV) di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 16.254 orang, dengan capaian pemenuhan 10 aspek pencapaian mutu sebesar 100%.

c. Indeks Pencapaian SPM

Indeks Pencapaian SPM (IPSM) diperoleh berdasarkan perhitungan Capaian Mutu Layanan Dasar dengan Capaian Penerima Pelayanan Dasar

Tabel 112. Indeks Pencapaian Mutu Layanan Dasar Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Penerima Pelayanan Dasar	Capaian Mutu Layanan Dasar	Indeks Pencapaian SPM	Kategori
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	91,96%	100,00%	93,56%	Tuntas Utama
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	94,53%	100,00%	95,63%	Tuntas Utama
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	97,24%	98,16%	97,43%	Tuntas Utama
4	Pelayanan Kesehatan Balita	84,39%	90,61%	85,64%	Tuntas Madya
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	100,00%	92,37%	98,47%	Tuntas Utama
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	91,94%	99,10%	93,38%	Tuntas Utama
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	90,59%	96,86%	91,84%	Tuntas Utama
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	100,00%	100,00%	100,00%	Tuntas Paripurna
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	100,00%	100,00%	100,00%	Tuntas Paripurna
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00%	100,00%	100,00%	Tuntas Paripurna
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis	100,00%	100,00%	100,00%	Tuntas Paripurna
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemah daya tahan tubuh manusia (HIV)	100,00%	100,00%	100,00%	Tuntas Paripurna
IPSM Urusan Kesehatan				**96,33%**	**Tuntas Utama**

Sumber : e-SPM Kemendagri : 2022

Pengukuran Penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan menggunakan Indeks Pencapaian SPM (IPSM) yang diperoleh berdasarkan perhitungan Capaian Mutu Layanan Dasar dengan Capaian Penerima Pelayanan Dasar.

Capaian Mutu Layanan Dasar merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata–rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis, sedangankan

Capaian Penerima Pelayanan Dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja.

$$IPSM = (\%\ capaian\ penerima\ layanan\ dasar \times 80\%) + (\%\ capaian\ mutu\ layanan\ dasar \times 20\%)$$

Pada Bidang Kesehatan penerapan SPM di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2022 Indeks Pencapaian SPM sebesar 96,33% dengan kategori predikat **Tuntas Utama.**

4.2.4. Alokasi Anggaran

Dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menganggarkan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 113. Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Kesehatan pada APBD Tahun 2022

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realiasasi	%
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	5.280.000.000	4.191.861.680	3.077.144.996	73,41%
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.504.429.000	915.767.300	386.452.861	42,20%
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Barn Lahir	250.000.000	250.000.000	176.895.000	70,76%
Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	200.000.000	200.000.000	79.380.000	39,69%
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	400.000.000	206.000.000	133.039.000	64,58%
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	600.000.000	851.360.000	810.303.989	95,18%
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	500.000.000	500.000.000	348.284.951	69,66%
Pelayanan Kesehatan penderita Hypertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	500.000.000	400.000.000	383.080.000	95,77%
Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes Militus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	500.000.000	500.000.000	498.416.822	99,68%

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realiasasi	%
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	600.000.000	367.040.000	248.987.199	67,84%
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	600.000.000	1.349.360.000	1.335.719.010	98,99%
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000.000	550.000.000	530.785.780	96,51%
Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan		**11.534.429.000**	**10.281.388.980**	**8.008.489.608**	**77,89%**

Sumber: Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022

4.2.5. Dukungan Personil

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 890 orang PNS, dilihat dari pengelompokan berdasarkan golongan, dapat diketahui bahwa kelompok terbesar ada pada pegawai dengan Golongan III. Kondisi ini merupakan potensi yang perlu dikelola dengan baik, sehingga regenerasi manajemen dapat berjalan dengan baik. Sedangkan pegawai dengan tingkat golongan I dan II tersedia dengan jumlah yang cukup memadai sebagai fungsi penunjang.

Tabel 114. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan

Golongan Ruang	Esselon			Non Esselon		Jumlah
	II	III	IV	JFT	JFU	
Golongan IV/e						0
Golongan IV/d						0
Golongan IV/c	1			8		9
Golongan IV/b			2	14	1	17
Golongan IV/a		5	7	22	4	38
Golongan III/d			31	163	26	220
Golongan III/c			14	94	13	121
Golongan III/b			9	148	33	190
Golongan III/a			4	79	6	89
Golongan II/d			58	47	105	105
Golongan II/c			41	25	66	66

Golongan Ruang	Esselon			Non Esselon		Jumlah
	II	III	IV	JFT	JFU	
Golongan II/b			9	13	22	22
Golongan II/a				8	8	8
Golongan I/d				3	3	3
Golongan I/c				1	1	1
Golongan I/b				1	1	1
Golongan I/a						
Jumlah Golongan IV	**1**	**5**	**9**	**44**	**5**	**64**
Jumlah Golongan III	**1**	**5**	**67**	**528**	**83**	**620**
Jumlah Golongan II	**1**	**5**	**67**	**636**	**176**	**201**
Jumlah Golongan I					**5**	**5**
Jumlah Total	**4**	**20**	**210**	**1844**	**445**	**890**

Tabel 115. Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Kesehatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah			
		PNS	THL	BLUD	BOK
1	Dokter Umum	49	13	8	
2	Dokter Gigi	26	2		
3	Apoteker	18	22	2	3
4	S1 Farmasi		4		
5	S1 Kesehatan Masyarakat / Promosi Kesehatan		21		12
6	S1 Kesehatan Masyarakat / Kesehatan Lingkungan		7		
7	S1 Kesehatan Masyarakat / Administrasi Kesehatan	8	11		5
8	S1 Kesehatan Masyarakat / Epidemiologi	9	11		5
9	S1 Kesehatan Masyarakat / Gizi		11		
10	S1 Kesehatan Masyarakat / Kesjaor		1		
11	S1 Kesehatan Masyarakat / Penyuluh Kesehatan	6	8		
12	S1 Kesehatan Masyarakat / Surveilens		3		
13	S1 Kesehatan Masyarakat	34	13		4
14	Pengelola Keuangan				
15	S1 Keperawatan + NERS	20	4		
16	D IV keperawatan + NERS	15			
17	D IV Kebidanan	30	2	1	
18	S1/D IV Gizi				17
19	S1 Kesehatan Lingkungan	7	13		2
20	D III Keperawatan	235	208	10	
21	D III Kebidanan	186	268	15	
22	D III Keperawatan Gigi	14	2	1	
23	D III Elektromedik				
24	D III Analis Teknologi Laboratorium Medik	10	33	2	14
25	D III Farmasi	9	33	4	
26	D III Kesehatan Lingkungan	7			11
27	D III Gizi	4	3		7
28	Perekam Medik dan Informasi Kesehatan				
29	D III Akupuntur		1		
30	Pekarya	3			
31	SMK Farmasi	1	5		
32	SPK	8	1		
33	SPRG	1			
34	MAGISTER (S2)	52			
35	S1 Komputer		5		
36	D I Kebidanan	1			

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah			
		PNS	THL	BLUD	BOK
37	S1 Informatika		1		
38	S1 Non Kesehatan	42	13	1	27
39	D IV Akuntansi		1		1
40	D III Akuntansi	3	1		2
41	D III Manajemen Informatika				
42	D III Bahasa Inggris		1		
43	SMK Farmasi		29		
44	SMU	76	105		
45	MAN	1	8		
46	SMP	15	1		
47	SD				
Jumlah		**890**	**865**	**44**	**110**

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Permasalahan

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil tahun 2022 sebesar 91,96%, yang berarti belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan karena:

- Tidak semua jejaring Puskesmas seperti Klinik dan PMB merujuk pasien ke Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan Laboratorium (pada kasus jejaring tidak memiliki fasilitas laboratorium)
- Ibu hamil melakukan *"shooping provider"* dan tidak tercatat.
- Sistem pencatatan jejaring yang belum maksimal (data tidak terlapor)
- Pencatatan dan pemantauan kohort.
- ANC pada umur kehamilan di atas 12 minggu
- Peran serta masyarakat dalam melaporkan data ibu hamil ke tenaga
- kesehatan masih belum maksimal.

Solusi

- Optimalisasi pencatatan dan pelaporan secara digital (Kohort Manual dan Aplikasi e- kohort).

- Koordinasi dengan fasilitas kesehatan disekitarnya dalam melakukan pelayanan kesehatan ibu hamil serta mengoptimalkan pencatatan dan pelaporan ibu hamil.
- Pembinaan Jejaring dalam meningkatkan peran aktif dan dukungan dari Praktik Bidan Mandiri dan klinik dalam pelayanan KIA.
- Kerjasama lintas sector dalam strategi konvergensi penurunan AKI dan AKB.
- Kader melakukan pendataan ibu hamil di wilayah masing-masing sesuai dengan sasaran ibu hamil di wilayahnya.

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Permasalahan

Capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2022 sebesar 94,53%. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun realisasi tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 100%. Hal ini disebabkan oleh:

- Masih ada persalinan oleh dukun
- Masih ada persalinan oleh tenaga kesehatan di bukan fasilitas kesehatan
- P4K belum berjalan optimal di masyarakat.
- Distribusi petugas yang belum merata di semua faskes
- Masalah geografis (banjir, jalanan putus, dan lain-lain)

Solusi

- Optimalisasi pencatatan dan pelaporan secara digital (Kohor Manual dan Aplikasi e- kohort)
- Kemitraan Bidan-Dukun
- Menggerakkan masyarakat melalui lintas sector untuk melahirkan di fasilitas kesehatan.

- Koordinasi dengan faskes disekitarnya dalam melakukan pelayanan kesehatan ibu bersalin serta mengoptimalkan pencatatan dan pelaporan ibu bersalin
- Meningkatkan peran aktif dan dukungan dari Praktik Bidan Mandiri/ faskes lainnya dalam pelayanan KIA.
- Kader melakukan pendataan ibu bersalin di wilayah masing-masing sesuai dengan sasaran ibu hamil di wilayahnya

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Permasalahan

Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2022 tercapai 97,24%. Tidak tercapainya target disebabkan oleh:

- Persalinan Dukun
- Tidak semua komponen pelayanan bayi baru lahir terpenuhi.
- Bayi risiko tinggi tidak mendapat komponen IMD dan HB0

Solusi

- Meningkatkan persalinan nakes di faskes
- Pembinaan jejaring untuk memberikan asuhan persalinan dan perawatan bayi baru lahir sesuai standar
- Home visit petugas untuk memenuhi komponen neo esensial yang belum terpenuhi.

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Permasalahan

Cakupan pelayanan kesehatan balita tahun 2022 sebesar 84,39%. Hal ini disebabkan karena:

- Banyaknya indikator capaian dalam setiap 1 tahun umur terutama pemantauan pertumbuhan 8 kali setahun.
- Kesadaran orangtua untuk membawa bayi balitanya ke posyandu masih kurang.

- Peran UKBM di masyarakat belum optimal (tidak menarik, jadwal berubah, dll)

Solusi

- Integrasi program GIZI-KIA dalam pemantauan tumbuh kembang.
- Optimalisasi Pencatatan di Kohort Manual dan Aplikasi e-Kohort.
- Support kader melalui lintas sector dalam meningkatkan pelayanan UKBM.
- Home visit balita untuk mengejar capaian SPM.

5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar

Capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar tahun 2022 sebesar 100%, angka ini sama dengan capaian SPM tahun 2021 yang juga sebesar 100%. Maintenance program perlu dilakukan untuk mempertahankan capaian tetap berada di angka 100%.

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Permasalahan

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif tahun 2022 sebesar 91.94%. Capaian ini masih dibawah dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena:

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan, sehingga pada saat kegiatan skrining kesehatan sebagian masyarakat masih kurang berminat diperiksa kesehatannya.
- Adanya rangkap tugas pada Pengelola Program
- Masih belum optimalnya koordinasi dan kerjasama lintas program terutama Program Promosi Kesehatan dan lintas sektor.

Solusi

- Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor (PKK, Dharma Wanita Persatuan, OPD, Kecamatan, Desa).

- Meningkatkan kegiatan promosi kesehatan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin.
- Menambah sumber daya manusia/ pengelola program.
- Melakukan *skrining* mobile di setiap kelurahan, instansi pemerintah, tempat ibadah dan tempat umum

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Permasalahan

Capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut tahun 2022 sebesar 90.59%. Hal ini disebabkan karena:

- Masih ada sasaran lansia yang belum pernah kontak petugas.
- Dukungan keluarga kurang dalam memfasilitasi lansia untuk mendapatkan pelayanan.

Solusi

- Mapping lansia oleh petugas bersama-sama dengan desa/kelurahan.
- Melakukan pelayanan skrining lansia perdesa/kelurahan
- Integrasi Posyandu Lansia-Posbindu
- Home Visit lansia yang belum mendapatkan pelayanan atau kontak dengan petugas.

8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi

Permasalahan

Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi tahun 2022 adalah sebesar 100%. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar lebih mudah dicapai. Hal tersebut antara lain :

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat penderita hipertensi untuk aktif melakukan pengobatan secara rutin.
- Masih kurangnya koordinasi dan kerja sama lintas program (Promosi Kesehatan).

Solusi

- Meningkatkan kegiatan lintas program dengan mengoptimalkan kegiatan promosi kesehatan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan dan pengobatan secara rutin bagi penderita hipertensi.
- Meningkatkan kerjasama lintas sektor: PKK, DWP, Camat, Kades).

9. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus

Permasalahan

Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus tahun 2022 adalah sebesar 100%. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar lebih mudah dicapai. Hal tersebut antara lain :

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat penderita Diabetes Melitus untuk aktif melakukan pengobatan secara rutin.
- Masih kurangnya koordinasi dan kerja sama lintas program (Promosi Kesehatan).

Solusi

- Meningkatkan kegiatan lintas program dengan mengoptimalkan kegiatan promosi kesehatan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan dan pengobatan secara rutin bagi penderita Diabetes Melitus.
- Meningkatkan kerjasama lintas sektor : PKK, DWP, Camat, Kades).

10. Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Permasalahan

Capaian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat tahun 2022 sebesar 100%. Namun ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi penderita Gangguan Jiwa Berat antara lain:

- Belum adanya tenaga khusus yang sudah dilatih sebagai Pengelola Program Kesehatan Jiwa (masih rangkap tugas).

- Masih kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap penderita ODGJ Berat pasca perawatan.
- Belum adanya tenaga psikolog di puskesmas yang bertugas
- memberikan pendampingan bagi petugas, keluarga, kader dalam penanganan ODGJ.
- Belum terbentuknya Call Center penanganan ODGJ.

Solusi

- Meningkatkan kapasitas Pengelola Program Kesehatan Jiwa
- Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam penanganan ODGJ pasca perawatan
- Menambah tenaga psikolog .
- Membentuk Call Center Penanganan ODGJ.

11. Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis

Permasalahan

Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulasis (TB) tahun 2022 sebesar 100%. Namun untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis terutama bagi kontak erat dengan penderita Tuberkulosis, ada beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian :

- Masih kurangnya kesadaran dari kontak erat penderita Tuberkulosis untuk secara aktif memeriksakan diri atau diperiksa oleh Tenaga Kesehatan.
- Masih kurangnya kemampuan sebagian tenaga kesehatan Pengelola Program TB.
- Masih kurangnya kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam upaya penemuan orang terduga Tuberkulosis.
- Masih kurangnya alat Tes Cepat Molekuler (TCM) di Fasilitas Kesehatan.

Solusi

- Meningkatkan kegiatan promosi kesehatan melalui kerjasama lintas program dan sektor.
- Meningkatkan kapasitas Pengelola Program TB
- Meningkatkan kegiatan Invetigasi Kontak (IK) yang dilakukan oleh Kader Kesehatan.
- Menambah jumlah alat Tes Cepat Molekuler (TCM) di Fasilitas Kesehatan.

12. Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemah Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)

Permasalahan

Cakupan pelayanan kesehatan orang beresiko terinfeksi HIV tahun 2022 sebesar 100%. Namun untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV, ada beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian :

- Masih kurangnya kesadaran dari kelompok yang berisiko terinfeksi HIV untuk secara aktif memeriksakan diri atau diperiksa oleh Tenaga Kesehatan.
- Masih kurangnya kemampuan sebagian tenaga kesehatan Pengelola Program HIV.
- Masih kurangnya kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam upaya penemuan orang berisiko terinfeksi HIV.

Solusi

- Meningkatkan kegiatan promosi kesehatan melalui kerjasama lintas program dan lintas sektor.
- Meningkatkan kapasitas Pengelola Program HIV
- Meningkatkan kegiatan skrining/ Mobile VCT pada kelompok berisiko

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis SPM PU dan PR, bahwa SPM Bidang Pekerjaan Umum meliputi:

1) Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
2) Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

4.3.2. Target Pencapaian SPM

Sesuai dengan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis SPM PU dan PR, target capaian Pemerintah Daerah dalam pemenuhan SPM setiap jenis pelayanan dasar pada bidang Pekerjaan Umum adalah 100% tiap tahunnya.

4.3.3. Realisasi

a. Realisasi Capaian Layanan Dasar

Tabel 116. Realisasi Capaian Layanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian 2022
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persentase (%) Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab.	100%	172.099	131.960	76,68%
2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase (%) Rumah Tangga yang mendapatkan layanan pengelolaan air limbah dimestik	100%	172.099	4.794	2,79%

Sumber : e-SPM Kemendagri : 2022

1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Pencapaian pemenuhan SPM Pekerjaan Umum pada Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari dicapai melalui perhitungan dengan cara:

$$= \frac{Jumlah\ Rumah\ Tangga\ Terlayani}{Jumlah\ Rumah\ Tangga\ di\ Kabupaten\ /\ Kota} \times 100$$

$$= \frac{131.960}{172.099} \times 100 = 76{,}68\%$$

Tabel 117. Rekapitulasi Penerima Layanan Pemenuhan Air Minum

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Layanan PDAM	Perpipaan Perdesaan	Non Perpipaan	RT Dapat Akses
Tenggarong	109,466	26,699	27,177	68	33	27,278
Tenggarong Seberang	69,581	15,996	12,783	1,129	149	14,061
Loa Kulu	54,124	12,442	4,177	1,899	1,108	7,184
Loa Janan	70,544	16,217	14,783	575	606	15,964
Sebulu	41,048	9,436	4,498	539	566	4,603
Anggana	35,813	8,233	3,737	1,660	1,250	6,647
Muara Badak	47,373	10,890	2,798	1,722	3,715	8,235
Muara Jawa	42,224	9,707	5,759	248	771	6,778
Samboja	68,016	15,636	5,111	842	627	6,580
Sanga-Sanga	20,178	4,639	3,046	155	118	3,319
Kota Bangun	36,301	8,345	2,945	2,257	1,499	6,701
Muara Wis	9,287	2,135	534	480	12	1,026
Marang Kayu	27,205	6,254	2,138	848	848	3,834
Muara Kaman	42,698	9,816	3,957	1,996	2,218	8,171
Muara Muntai	20,308	4,669	2,784	296	730	3,245
Kenohan	11,701	2,690	568	1,102	467	2,100
Kembang Janggut	23,972	5,511	2,340	2,074	116	3,880
Tabang	12,111	2,784	634	337	131	847
Total	**741,950**	**172,099**	**98,769**	**18,227**	**14,964**	**131,960**

Sumber : Dinas Perumahan dan Pemukiman, 2022

2. Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pencapaian pemenuhan SPM Pekerjaan Umum pada Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik dicapai melalui perhitungan dengan cara:

$$= \frac{Jumlah\ Rumah\ Tangga\ Terlayani}{Jumlah\ Rumah\ Tangga\ di\ Kabupaten\ /\ Kota} \times 100$$

$$= \frac{4.794}{172.099} \times 100 \quad = 2{,}79\%$$

Tabel 118. Rekapitulasi Penerima Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	RT Akses SPALD-S & SPALD-T	RT diolah IPLT	RT Pengolahan (Cubluk + diolah IPLT)
Tenggarong	109,466	26,699	222	150	372
Tenggarong Seberang	69,581	15,996	373	5	378
Loa Kulu	54,124	12,442	278	3	281
Loa Janan	70,544	16,217	173	1	174
Sebulu	41,048	9,436	580	67	647
Anggana	35,813	8,233	100		100
Muara Badak	47,373	10,89	335		335
Muara Jawa	42,224	9,707			
Samboja	68,016	15,636	302		302
Sanga-Sanga	20,178	4,639	54		54
Kota Bangun	36,301	8,345	645	2	647
Muara Wis	9,287	2,135	116		116
Marang Kayu	27.205	6,254	172		172
Muara Kaman	42,698	9,816	370		370
Muara Muntai	20,308	4,669	352		352
Kenohan	11,701	2,69	259		259
Kembang Janggut	23,972	5,511	144		144
Tabang	12,111	2,784	91		1,957
Total	**741,95**	**172,099**	**4,566**	**228**	**4,794**

Sumber : Dinas Perumahan dan Pemukiman, 2022

b. Realisasi Capaian Mutu Layanan Dasar

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak. Adapun capaian Mutu Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum sebagai berikut:

1) Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Tabel 119. Realisasi Capaian Mutu Layanan Dasar Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	1. Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	816	816	0	100,00%
	2. Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	2.000	2.000	0	100,00%
	3. Jaringan perpipaan	1.219	1.219	0	100,00%
	4. Jaringan bukan perpipaan	1.873	1.873	0	100,00%
Pencapaian Mutu Layanan Dasar					**100%**

Sumber : e-SPM Kemendagri : 2022

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 4 aspek pencapaian mutu layanan dasar dinilai dengan menggunakan nilai capaian mutu yang membandingkan jumlah yang dibutuhkan dengan jumlah yang tersedia.

Pada Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari terdapat 4 aspek standar mutu layanan, melihat sasaran pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari berjumlah 172.099 Rumah Tangga, dengan capaian pemenuhan 4 aspek pencapaian mutu sebesar 100%.

2) Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Tabel 120. Realisasi Capaian Mutu Layanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	1. Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	172.099	228	171871	0,13%
	2. Kualitas pelayanan air limbah domestik	4.566	228	4338	4,99%
	3. Sub-Sistem pengolahan setempat	172.099	4.566	167533	2,65%
	4. Sub-sistem pengangkutan	14	2	12	14,29%
	5. Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	7	1	6	14,29%
	6. Pengolahan lumpur tinja (IPAL)				0,00%
Pencapaian Mutu Layanan Dasar					**6,06%**

Sumber : e-SPM Kemendagri : 2022

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 6 aspek pencapaian mutu layanan dasar dinilai dengan menggunakan nilai capaian mutu yang membandingkan jumlah yang dibutuhkan dengan jumlah yang tersedia.

Pada Pemenuhan Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik terdapat 6 aspek standar mutu layanan, melihat sasaran pemenuhan Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik berjumlah 172.099 Rumah Tangga, dengan capaian pemenuhan 6 aspek pencapaian mutu sebesar 100%.

c. Indeks Pencapaian SPM

Indeks Pencapaian SPM (IPSM) diperoleh berdasarkan perhitungan Capaian Mutu Layanan Dasar dengan Capaian Penerima Pelayanan Dasar:

Tabel 121. Indeks Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Penerima Pelayanan Dasar	Capaian Mutu Layanan Dasar	Indeks Pencapaian SPM	Kategori
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	76,68%	100,00%	81,34%	Tuntas Madya
2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	2,79%	6,06%	3,44%	Belum Tuntas
IPSM Urusan Pekerjaan Umum				**42,39%**	**Belum Tuntas**

Sumber : e-SPM Kemendagri : 2022

Pengukuran Penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan menggunakan Indeks Pencapaian SPM (IPSM) yang diperoleh berdasarkan perhitungan Capaian Mutu Layanan Dasar dengan Capaian Penerima Pelayanan Dasar.

Capaian Mutu Layanan Dasar merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata–rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis, sedangankan

Capaian Penerima Pelayanan Dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja.

$$IPSM = (\%\ capaian\ penerima\ layanan\ dasar \times 80\%) + (\%\ capaian\ mutu\ layanan\ dasar \times 20\%)$$

Pada Bidang Pekerjaan Umum penerapan SPM di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2022 Indeks Pencapaian SPM sebesar 42,39% dengan kategori predikat **Belum Tuntas.**

4.3.4. Alokasi Anggaran

Dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menganggarkan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 122. Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum pada APBD Tahun 2022

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realiasasi	%
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	71.120.806.784	136.009.657.007	131.142.425.403	96,42%
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	0	2.160.000.000	2.082.762.118	96,42%
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	8.500.000.000	16.287.828.700	15.831.735.230	97,20%
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	30.600.000.000	31.190.230.488	30.577.397.812	98,04%
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	13.660.000.000	7.351.059.422	7.219.283.633	98,21%
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	2.500.000.000	41.720.032.912	40.046.942.275	95,99%
	Pembangunan Barn SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	11.750.614.784	15.085.779.656	13.949.435.720	92,47%
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.110.192.000	22.214.725.829	21.434.868.615	96,49%

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realiasasi	%
Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**10.575.086.000**	**20.661.235.777**	**20.148.405.068**	**97,52%**
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	4.500.000.000	18.422.988.277	18.121.898.764	98,37%
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	300.000.000	300.000.000	151.451.564	50,48%
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	0	641.817.500	632.765.500	98,59%
	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	5.775.086.000	196.430.000	196.430.000	100,00%
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	1.100.000.000	1.045.859.240	95,08%
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum		**81.695.892.784**	**156.670.892.784**	**151.290.830.471**	**96,57%**

Sumber: Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022

4.3.5. Dukungan Personil

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 206 orang PNS serta sebanyak 151 orang Non ASN, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 123. . Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Pemukiman Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS	THL
1	Magister	19	3
2	Sarjana	67	67
3	Diploma	6	9
4	SLTA/SMK/STM	110	71
5	SLTP	4	
6	SD		1
Jumlah		**206**	**151**

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Tabel 124. Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum

Permasalahan		Solusi	Rencana Tindak Lanjut
Pemenuhan Kebutuahan air Minum Sehari-hari	1. Terdapat Daerah yang tidak tersedia air baku permukaan untuk Sumber Air Minum Aman	- Saling Mendukung antara wilayah dalam memanfaatkan pemenuhan air baku - Perlunya kajian teknis dala menangani air baku dalam teknologi penjernihan	Melakukan kerjasama dengan PDAM terdekat dalam pemenuhan air curah untuk daerah-daerah yang tidak memiliki sumber air minum yang aman khususnya di wilayah Delta Mahakam Kab. Kutai Kartanegara
	2. Akses wilayah daerah yang berjauhan	Perlunya pengolahan air minum yang tepat baik segi kontruksi dan biaya	Melakukan kajian terhadap ketersediaan air baku yang dirubah menjadi air minum aman
	3. Jumlah Kapasitas Pengolahan Domestik yang belum maksimal 4. Daerah atau Desa memiliki eksisting rawa atau genangan air	Perlunya terhadap kajian teknis dalam menangani air limbah.	Melakukan penambahan unit armada pelayanan serta unit pengolahan
Pemenuhan Kebutuhan Air Limbah Domestik	1. Minimnya perencanaan karena kurang validnya data terkait penerapan SPM.	Perlu sistem pendataan dan inventarisasi data terkait penyusunan dan penerapan SPM	Melakukan pembuatan system pendataan dan inventarisasi data.
	2. Minimnya koordinasi antar OPD pengampuh SPM terkait kebutuhan data penyusunan SPM	Perlu ada Tim SPM Tingkat kabupaten yang mengkoordinir tiap OPD pengampu SPM.	Tim yang telah dibentuk, perlu mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam penerapan SPM
	3. Tidak ada database yang valid yang dapat menjadi standar acuan dalam penyusunan SPM	Perlu ada sebuah tim yang bertanggungjawab sebagai sumber database yang valid.	Membentuk Tim yang bertanggungjawab sebagai sumber database.
	4. Kurangnya anggaran terkait penerapan SPM	Adanya alokasi anggaran memadai terkait kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian SPM	Pengajuan anggaran terkait kegiatan yang mendukung penerapan SPM

4.4. Urusan Perumahan dan Pemukiman

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis

SPM PU dan PR, bahwa SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman meliputi:

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana
2. Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

4.4.2. Target Pencapaian SPM

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis SPM PU dan PR, target capaian Pemerintah Daerah dalam pemenuhan SPM setiap jenis pelayanan dasar pada bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah 100% tiap tahunnya.

4.4.3. Realisasi

a. Realisasi Capaian Layanan Dasar

Tabel 125. Realisasi Capaian Layanan Dasar Bidang Perumahan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian 2022
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Persentase Tersedia Rumah Layak Huni dan direhabilitasi bagi Korban Bencana	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	100%
2	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	Persentase Tersedia Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	100%	30	30	100,00%

Sumber : e-SPM Kemendagri : 2022

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana

Pencapaian pemenuhan SPM Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Pada Tahun 2022 tidak ada atau nihil, dikarenakan tidak adanya terjadi bencana yang perlu

ditetapkan dengan Keputusan Bupati tetang Penetapan Status Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

Pencapaian pemenuhan SPM Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah dicapai melalui perhitungan dengan cara:

$$= \frac{\begin{array}{c}Rumah\ Tangga\ Penerima\ Fasilitas\ Penggantian \\ Hak\ Atas\ Penguasaan\ Tanah\ dan\ atau\ Bangunan\ + \\ Rumah\ Tangga\ Penerima\ Subsidi\ Uang\ Sewa\ + \\ Rumah\ Tangga\ Penerima\ Penyediaan\ Rumah\ Layak\ Huni\end{array}}{\begin{array}{c}Jumlah\ Total\ Rumah\ Tangga\ Terkena\ Relokasi\ Program\ Pemerintah\ Daerah \\ yang\ memenuhi\ Kriteria\ Penerima\ Pelayanan\end{array}} \times 100$$

$$= \frac{30}{30} \times 100 = 100\%$$

b. Realisasi Capain Mutu Layanan Dasar

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak. Adapun capaian Mutu Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum sebagai berikut:

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana

Tabel 126. Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	1. Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	100,00%
	2. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	100,00%
	3. Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	100,00%

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
	4. Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	100,00%
Pencapaian Mutu Layanan Dasar					**100%**

Sumber : e-SPM Kemendagri : 2022

2. Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

Tabel 127. Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	1. Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	100,00%
	2. Subsidi Uang Sewa	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	100,00%
	3. Penyediaan Rumah Layak Huni	30	30	0	100,00%
Pencapaian Mutu Layanan Dasar					**100%**

Sumber : e-SPM Kemendagri : 2022

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 3 aspek pencapaian mutu layanan dasar dinilai dengan menggunakan nilai capaian mutu yang membandingkan jumlah yang dibutuhkan dengan jumlah yang tersedia.

Pada Pemenuhan Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik terdapat 3 aspek standar mutu layanan, melihat sasaran pemenuhan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah sebanyak 30 Unit Rumah, dengan capaian pemenuhan 3 aspek pencapaian mutu sebesar 100%.

c. Indeks Pencapaian SPM (IP SPM)

Tabel 128. Indeks Pencapaian SPM Bidang Perumahan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Penerima	Capaian Mutu	Indeks Pencapaian SPM	Kategori

		Pelayanan Dasar	Layanan Dasar		
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	100,00%	100,00%	100,00%	Tuntas Paripurna
2	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	Tuntas Paripurna
IPSM Urusan Perumahan				**42,39%**	**Tuntas Paripurna**

Sumber : e-SPM Kemendagri : 2022

Pengukuran Penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan menggunakan Indeks Pencapaian SPM (IPSM) yang diperoleh berdasarkan perhitungan Capaian Mutu Layanan Dasar dengan Capaian Penerima Pelayanan Dasar.

Capaian Mutu Layanan Dasar merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata–rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis, sedangankan Capaian Penerima Pelayanan Dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja.

$$\boldsymbol{IPSM} = (\%\ \boldsymbol{capaian\ penerima\ layanan\ dasar} \times \mathbf{80}\%) + (\%\ \boldsymbol{capaian\ mutu\ layanan\ dasar} \times \mathbf{20}\%)$$

Pada Bidang Perumahan penerapan SPM di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2022 Indeks Pencapaian SPM sebesar 100% dengan kategori predikat **Tuntas Paripurna.**

4.4.4. Alokasi Anggaran

Dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan dan Pemukiman, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menganggarkan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 129. Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Perumahan pada APBD Tahun 2022

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realiasasi	%
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**1.050.000.000**	**900.000.000**	**583.213.929,00**	**64,80%**
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	400.000.000	400.000.000	326.073.199	81,52%
	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	100.000.000	100.000.000	93.334.730	93,33%
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	250.000.000	150.000.000	76.410.000	50,94%
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	150.000.000	100.000.000	32.316.000	32,32%
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	150.000.000	150.000.000	55.080.000	36,72%
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**6.536.384.560**	**6.586.384.560**	**6.409.247.161,00**	**97,31%**
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	200.000.000	200.000.000	152.821.000,00	76,41%
	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.000.000.000	1.000.000.000	933.760.161,00	93,38%
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.000.000.000	5.250.000.000	5.190.727.000,00	98,87%
	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	336.384.560	136.384.560	131.939.000,00	96,74%
Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan		**7.586.384.560**	**7.486.384.560**	**6.992.461.090**	**93,40%**

Sumber: Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022

4.4.5. Dukungan Personil

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara didukung

dengan sumber daya manusia sejumlah 206 orang PNS serta sebanyak 151 orang Non ASN, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 130. Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Pemukiman Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS	THL
1	Magister	19	3
2	Sarjana	67	67
3	Diploma	6	9
4	SLTA/SMK/STM	110	71
5	SLTP	4	
6	SD		1
Jumlah		**206**	**151**

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Tabel 131. Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan SPM Urusan Perumahan

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1	Jenis/status/kategori bencana yang terjadi belum ditetapkan melalui Keputusan Bupati	Mendorong penyusunan payung hukum terkait penetapan jenis/status/kategori bencana daerah	Koordinasi dengan OPD terkait dan Bagian Hukum Setda terkait penyusunan payung hukum dimaksud
2	Belum ada surat penetapan melalui Keputusan Bupati terkait kawasan yang tidak layak untuk perumahan sebagai dasar melakukan relokasi	Mendorong terbitnya Keputusan Bupati terkait kawasan yang tidak layak untuk perumahan sebagai dasar melakukan relokasi	Koordinasi dengan OPD terkait dan Bagian Hukum Setda terkait penyusunan payung hukum dimaksud
3	Data dasar SPM rawan bencana memerlukan daftar dan pemetaan kawasan rawan bencana yang dikerjakan oleh BPBD. Kajian Rawan Bencana dikerjakan pada APBDP 2020, dokumen dapat diakses pada maret 2020, dalam periode yang sama Perkim mendapat amanat untuk mensegera dan mempercepat proses pendataan KK Prioritas penerima pelayanan SPM di 18 Kecamatan dan dapat terlaksana 1 kecamatan.	Berdasarkan hasil bimbingan dari Perkim Provinsi maka perkim Kukar tetap dapat melakukan pendataan SPM dengan menggunakan data dasar rawan bencana dari BPBD Provinsi kaltim dengan pilot project 1 kecamatan. Pendataan KK Prioritas penerima pelayanan SPM Bencana yang sudah selesai dikerjakan oleh perkim pada APBDP 2020 untuk kecamatan Loa Kulu perlu untuk dilakukan penyesuaian/paduserasi dengan kajian prioritas penanganan kawasan rawan bencana BPBD Kab. Kutai Kartanegara, dimana pelaksanaan kajiannya sedang berlangsung sejak 20 September 2021.	Mendorong segera diselesaikannya kajian prioritas penanganan kawasan rawan bencana oleh BPBD Kab. Kutai Kartanegara dan mendorong proses paduserasi dengan kajian rawan bencana dari Perkim Kutai Kartanegara hingga diterbitnya Keputusan Bupati terkait kawasan prioritas penanganan rawan bencana sebagai dasar melakukan pendataan KK Prioritas penerima pelayanan SPM rawan bencana.
4	Minimnya penguasaan SDM terhadap teknik observasi data dasar penunjang SPM rawan bencana dan relokasi	Perlu ada Tim SPM Tingkat kabupaten yang mengkoordinir tiap OPD pengampu SPM.	Mendorong segera dibentuk Tim Penerapan SPM di OPD DPKP/Perkim

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
	program pemerintah (Kawasan Rawan bencana berbasis mitigasi bencana, prioritas penanganan bencana berbasis mitigasi bencana), pemetaan kawasan berpotensi relokasi, sehingga berdampak pada minimnya keterlibatan ASN dalam melaksanakan SPM di Perkim dan OPD terkait.	Perlu Pelatihan terhadap Tim pelaksana SPM di Dinas dan OPD terkait seperti BPBD. Perlu sistem pendataan dan inventarisasi data terkait penyusunan dan penerapan SPM.	Mendorong diadakannya Pelatihan terhadap Tim pelaksana SPM di Dinas dan OPD terkait seperti BPBD jika diperlukan. Mendorong pengoptimalan peran dan fungsinya anggota-anggota tim dalam menjalankan tugas berkaitan dengan penerapan SPM di OPD.
5	Kurang optimalnya koordinasi dan perencanaan terkait penerapan SPM di daerah menjadikan rendahnya dukungan anggaran terkait pendataan, serta penerapan pelayanan SPM Dinas Perkim.	Perlu ada Tim SPM Tingkat kabupaten yang mengkoordinir tiap OPD pengampu SPM dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Perlu adanya system dan pendampingan yang memudahkan pelaksanan teknis mengerjakan tugas terkait urusan wajib SPM yang dimaksud.	Mendorong pengaktifan Tim SPM daerah yang mengkoordinir dan melakukan pendampingan terhadap Tim SPM di OPD DPKP/Perkim

4.5. Urusan Trantibum

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dibagai ke dalam 3 (tiga) Sub Bidang Urusan yang diatur lebih lanjut melalui;

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kab. / Kota, bahwa SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi:

   - Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten / Kota, bahwa SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Bencana Daerah meliputi:

   - Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
   - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; dan
   - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota, bahwa SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Kebakaran meliputi:

   - Pelayanan Penyelematan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

4.5.2. Target Pencapaian SPM

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kab. / Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten / Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota, target capaian SPM di masing sub urusan pelayanan dasar adalah 100% tiap tahunnya.

4.5.3. Realisasi

a. Realisasi Capaian Layanan Dasar

i. Sub Urusan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi

Tabel 132. Realisasi Capaian Layanan Dasar Sub Urusan Pelayanan Trantibum terhadap penegakan Perda sesuai Mutu Pelayanan Ganti Rugi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian 2022
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	100 %

Sumber : e-SPM Kemendagri : 2022

Pencapaian pemenuhan SPM Bidang Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Pemelihara Ketentraman & Ketertiban Umum terhadap Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada pada Tahun 2021 tidak ada atau nihil, dikarenakan tidak ada warga yang terkena dampak akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada baik kerugian materiil maupun kerugian fisik.

ii. Sub Urusan Pelayanan Bencana Daerah

Tabel 133. Realisasi Capaian Layanan Dasar Bidang Trantibum Sub Urusan Bencana Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian 2022
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100%	734609	27145	3,70%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	27145	27145	100,00%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	57539	57539	100,00%

Sumber : e-SPM Kemendagri : 2022

Pencapaian pemenuhan SPM Trantibumlinmas pada Pelayanan Informasi Rawan Bencana dicapai melalui perhitungan dengan cara:

$$= \frac{Jumlah\ Warga\ Negara\ yang\ memperoleh\ Informasi\ Rawan\ Bencana}{Jumlah\ Warga\ Negara\ di\ Kawasan\ Bencana} \times 100$$

$$= \frac{27.145}{734.609} \times 100$$

$$= 3{,}70\%$$

Pencapaian pemenuhan SPM Trantibumlinmas pada Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dicapai melalui perhitungan dengan cara:

$$= \frac{Jumlah\ Warga\ Negara\ yang\ memperoleh\ Layanannan\ Pencegahan\ dan\ Kesiapsiagaan\ Terhadap\ Becana}{Jumlah\ Warga\ Negara\ di\ Kawasan\ Bencana} \times 100$$

$$= \frac{27.145}{27.145} \times 100 = 100\%.$$

Pencapaian pemenuhan SPM Trantibumlinmas pada Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dicapai melalui perhitungan dengan cara:

$$= \frac{Jumlah\ Warga\ Negara\ yang\ memperoleh\ Layanannan\ Penyelamatan\ dan\ Evakuasi\ Korban\ Bencana}{Jumlah\ Warga\ Negara\ Korban\ Bencana} \times 100$$

$$= \frac{57.539}{57.539} \times 100$$

$$= 100\%$$

iii. Sub Urusan Kebakaran Daerah

Tabel 134. Realisasi Capaian Layanan Dasar Bidang Trantibum Sub Urusan Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian 2022
1	Pelayanan Penyelematan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pelayanan Penyelematan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	567	463	81,66%

Sumber : e-SPM Kemendagri : 2022

Pencapaian pemenuhan SPM Trantibumlinmas pada Pelayanan Penyelematan dan Evakuasi Korban Kebakaran dicapai melalui perhitungan dengan cara:

$$= \frac{Jumlah\ Warga\ Negara\ yang\ memperoleh\ Layanannan\ Penyelamatan\ dan\ Evakuasi\ Korban\ Kebakaran}{Jumlah\ Warga\ Negara\ Korban\ Kebakaran} \times 100$$

$$= \frac{6463}{567} \times 100$$

$$= 81{,}66\%$$

b. Realisasi Capaian Mutu Layanan Dasar

i. Sub Urusan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi

Tabel 135. Realisasi Capaian Mutu Layanan Dasar Bidang Trantibum Daerah

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rug	1. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	100%
	2. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	100,00%
	3. Standar operasional prosedur Satpol PP	26	26	0	100,00%
	4. Standar sarana prasarana Satpol PP	1	1	0	100,00%
	5. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	1	1	0	100,00%

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	1	1	0	100,00%
Pencapaian Mutu Layanan Dasar					**100%**

ii. Sub Urusan Pelayanan Bencana Daerah

Tabel 136. Realisasi Capaian Mutu Layanan Dasar Bidang Bencana Daerah

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	0	100,00%
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	160	160	0	100,00%
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	19.267	3.650	15617	18,94%
	4. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	1.350	495	855	36,67%
	5. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	38	7	31	18,42%
Pencapaian Mutu Layanan Dasar					**54,81%**
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana	87.877	4.970	82907	5,66%
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	15	7	8	46,67%
Pencapaian Mutu Layanan Dasar					**26,16 %**
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1	1	0	100,00%
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	17.231	17.231	0	100,00%
	3. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	1	1	0	100,00%
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	Tidak Ada	Tidak Ada	0	100,00%
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencan	158	158	0	100,00%

Sumber : e-SPM Kemendagri : 2022

iii. Sub Urusan Kebakaran Daerah

Tabel 137. Realisasi Capaian Mutu Layanan Dasar Bidan Trantibum Sub Urusan Kebakaran

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
Pelayanan Penyelematan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	60	47	13	78,33%
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	3	3	0	100,00%
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuas	24	8	16	33,33%
	4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	337	217	120	64,39%
Pencapaian Mutu Layanan Dasar					**69,01%**

Sumber : e-SPM Kemendagri : 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 4 aspek pencapaian mutu layanan dasar dinilai dengan menggunakan nilai capaian mutu yang membandingkan jumlah yang dibutuhkan dengan jumlah yang tersedia.

Pada Pelayanan Penyelematan dan Evakuasi Korban Kebakaran terdapat 4 aspek standar mutu layanan, melihat jumlah kejadian Bencana Kebakaran di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 60 kejadian bencana kebakaran, dengan capaian pemenuhan 4 aspek pencapaian mutu sebesar 69,01%.

c. Indeks Pencapaian SPM

i. Sub Urusan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi

Pencapaian pemenuhan SPM Bidang Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Pemelihara Ketentraman & Ketertiban Umum terhadap Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada pada Tahun 2021 tidak ada atau nihil, dikarenakan tidak

ada warga yang terkena dampak akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada baik kerugian materiil maupun kerugian fisik.

Pada Bidang Trantibum Sub Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi penerapan SPM di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2022 Indeks Pencapaian SPM sebesar 100% dengan kategori predikat **Tuntas Paripurna.**

ii. Sub Urusan Pelayanan Bencana Daerah

Tabel 138. Indeks Pencapaian SPM Bidang Bencana Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Penerima Pelayanan Dasar	Capaian Mutu Layanan Dasar	Indeks Pencapaian SPM	Kategori
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	3,70%	54,81%	13,92%	Belum Tuntas
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100,00%	26,16%	85,23%	Tuntas Madya
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100,00%	100,00%	100,00%	Tuntas Paripurna
IPSM Sub Urusan Bencana				**66,38%**	**Tuntas Muda**

Sumber : e-SPM Kemendagri : 2022

Pengukuran Penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan menggunakan Indeks Pencapaian SPM (IPSM) yang diperoleh berdasarkan perhitungan Capaian Mutu Layanan Dasar dengan Capaian Penerima Pelayanan Dasar.

Capaian Mutu Layanan Dasar merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata–rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis, sedangankan Capaian Penerima Pelayanan Dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja.

$$\boldsymbol{IPSM} = (\%\ \boldsymbol{capaian\ penerima\ layanan\ dasar} \times \mathbf{80}\%) + (\%\ \boldsymbol{capaian\ mutu\ layanan\ dasar} \times \mathbf{20}\%)$$

Pada Bidang Trantibum Sub Urusan Bencana penerapan SPM di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2022 Indeks Pencapaian SPM sebesar 66,38%% dengan kategori predikat **Tuntas Muda.**

iii. Sub Urusan Pelayanan Kebakaran Daerah

Tabel 139. Indeks Pencapaian SPM Bidang Kebakaran Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Penerima Pelayanan Dasar	Capaian Mutu Layanan Dasar	Indeks Pencapaian SPM	Kategori
1	Pelayanan Penyelematan dan Evakuasi Korban Kebakaran	81,66%	69,01%	79,13%	Tuntas Pratama
IPSM Sub Urusan Kebakaran				**79,13%**	**Tuntas Pratama**

Sumber : e-SPM Kemendagri : 2022

Pengukuran Penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan menggunakan Indeks Pencapaian SPM (IPSM) yang diperoleh berdasarkan perhitungan Capaian Mutu Layanan Dasar dengan Capaian Penerima Pelayanan Dasar.

Capaian Mutu Layanan Dasar merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata–rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis, sedangankan Capaian Penerima Pelayanan Dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja.

$$\boldsymbol{IPSM} = (\%\ \boldsymbol{capaian\ penerima\ layanan\ dasar} \times \mathbf{80}\%) + (\%\ \boldsymbol{capaian\ mutu\ layanan\ dasar} \times \mathbf{20}\%)$$

Pada Bidang Trantibum Sub Urusan Bencana penerapan SPM di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2022 Indeks Pencapaian SPM sebesar 79,13% dengan kategori predikat **Tuntas Pratama.**

4.5.4. Alokasi Anggaran

Dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Trantibum Sub Urusan Trantibum, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah

menganggarkan melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara sedangkan upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Trantibum Sub Urusan Bencana dan dan Sub Urusan Kebakaran melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 140. Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Trantibum Pada APBD Tahun 2022

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realiasasi	%
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**817.568.500**	**920.734.594**	**896.505.130**	**97,37%**
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	325.698.000	301.500.000	298.880.000	99,13%
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	33.259.500	33.259.500	31.440.500	94,53%
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	40.364.500	40.364.500	40.334.200	99,92%
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	75.527.500	75.527.500	74.668.800	98,86%
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	100.000.000	100.000.000	91.741.000	91,74%
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	222.719.000	357.248.912	351.910.630	98,51%

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realiasasi	%
	Ketentraman dan Ketertiban Umum				
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	10.000.000	10.000.000	7.530.000	75,30%
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	10.000.000	2.834.182	0	0,00%
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	**59.478.000**	**59.478.000**	**32.754.900**	**55,07%**
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	59.478.000	59.478.000	32.754.900	55,07%
Total Sub Urusan Trantibum		**877.046.500**	**980.212.594**	**929.260.030**	**94,80%**
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana**	**150.000.000**	**700.546.000**	**87.634.000**	**12,51%**
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	150.000.000	700.546.000	87.634.000	12,51%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**775.000.000**	**754.454.000**	**575.713.900**	**76,31%**
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000	254.216.000	252.784.000	99,44%
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000	25.238.000	25.174.480	99,75%
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	175.000.000	175.000.000	60.917.140	34,81%
	Penyusunan Rencana Kontijensi	300.000.000	300.000.000	236.838.280	78,95%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**1.350.000.000**	**1.350.000.000**	**1.214.741.750**	**89,98%**
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	150.000.000	50.000.000	0	0,00%
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	148.673.020	99,12%
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	450.000.000	450.000.000	373.055.840	82,90%
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	500.000.000	600.000.000	595.019.840	99,17%

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realiasasi	%
	Bencana Kabupaten/ Kota				
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	100.000.000	100.000.000	97.993.050	97,99%
Total Sub Urusan Bencana		**2.275.000.000**	**2.805.000.000**	**1.878.089.650**	**66,96%**
Pelayanan Penyelematan dan Evakuasi Korban Kebakaran	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.840.039.638**	**1.840.039.638**	**1.763.048.716**	**95,82%**
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	825.000.000	825.000.000	794.592.440	96,31%
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	200.000.000	200.000.000	175.640.000	87,82%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	690.039.638	690.039.638	669.650.060	97,05%
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	125.000.000	125.000.000	123.166.216	98,53%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.345.000.000	1.345.000.000	1.100.640.370	81,83%
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	200.000.000	200.000.000	177.420.000	88,71%
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	1.145.000.000	1.145.000.000	923.220.370	80,63%
Total Sub Urusan Kebakaran		**3.185.039.638**	**3.185.039.638**	**2.863.689.086**	**89,91%**
Alokasi Anggaran SPM Bidang Trantibum		**6.337.086.138**	**6.970.252.232**	**5.671.038.766**	**81,36%**

Sumber: Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022

4.5.5. Dukungan Personil

i. Sub Urusan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi

Dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten

Kutai Kartanegara didukung dengan sumber daya manusia dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 141. Dukungan Pesonil SPM Bidang Trantibum Sub Urusan Trantibum

Uraian	Jumlah
ASN	142
Banpol PP	270
Jumlah	412

ii. Sub Urusan Pelayanan Bencana dan Kebakaran Daerah

Dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana Daerah dan Sub Urusan Kebakaran di laksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan didukung sumber daya manusia rincian sebagai berikut:

Tabel 142. Jumlah ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana (S3)	-	-	-
2.	Pasca Sarjana (S2)	2	2	4
3.	Sarjana (S1)	15	3	18
4.	Sarjana Muda	1	-	1
5.	SLTA/SMU	68	14	82
6.	SLTP	2	-	2
7.	Sekolah Dasar	-	-	-
Jumlah		**88**	**19**	**107**

Selain itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah didukung oleh Tenaga Harian Lepas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 143. Jumlah Tenaga Honorer / THL menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana (S3)	-	-	-
2.	Pasca Sarjana (S2)	-	-	-
3.	Sarjana (S1)	37	-	37

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
4.	Sarjana Muda	3	-	3
5.	SLTA/SMU	142	11	153
6.	SLTP	7	2	9
7.	Sekolah Dasar	1	13	14
Jumlah		**190**	**26**	**216**

Tabel 144. Jumlah Petugas Operasional telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Pemadam Kebakaran dan Bencana

No.	Nama Diklat	Jumlah (orang)	Ket.
1.	SAR MFR Dan Water Rescue	25	
2.	Jungle Rescue	25	
3.	HART Dan MFR	20	
4.	Scuba Diving and Sea Survival	20	
5.	Water Rescue Lanjutan	20	
6.	Personil DAMKAR Tingkat Dasar	33	
7.	Personil DAMKAR Tingkat Lanjutan	12	
8.	Basic Water Rescue	25	
Jumlah		**180**	

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Beberapa isu dan permasalahan / hambatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegaradalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimla Tahun 2023, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 145. Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran Daerah

No	Jenis Pelayanan	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana belum lengkap. 2. Belum ada data Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana 3. Terbatasnya sumberdaya petugas sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana 4. Terbatasnya sumberdaya petugas Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana 5. Belum terdatanya Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	1. Meningkatkan mutu dan standar Dokumen Kajian Risiko Bencana. 2. Melakukan pendataan Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana 3. Diklat, Bimtek bagi petugas sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana 4. Menyusun Standarisasi Penyebaran Informasi Bencana

No	Jenis Pelayanan	Permasalahan	Solusi
2	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana bagi warga di kawasan rawan bencana. 2. Terbatasnya kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) petugas dan warga Negara dikawasan rawan bencana	1. Meningkatkan Kuantitas Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB 2. Menyelenggarakan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan 3. Menyediakan Sapras PUSDALOPS Penanggulangan Bencana yang memadai 4. Melaksanakan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan 5. Menyediakan sarana prasarana sistem Peringatan Dini (EWS) Bencana 6. Meningkatkan jumlah Desa/Kel Tangguh Bencana 7. Membentuk dan mengoptimalkan peran Forum Pengurangan Risiko Bencana 8. Menyusun Dokumen Rencana Kontijensi sesuai kajian risiko bencana
3	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	1. Belum Optimalnya Pelaksanaan dalam penentuan status Tanggap Darurat 2. Belum Optimalnya Penerapan sistem komando operasi darurat 3. Masih rendahnya kapasitas petugas Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana secara cepat dan tepat 4. Belum Adanya Rencana Kontijensi Yang Dapat Dijadikan Rencana Operasi Penanggulangan Bencana; 5. Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana Yang Belum Mencukupi Mengingat Luasnya Wilayah; 6. Terhambatnya Peningkatan Kapasitas Personil/Sumber Daya Manusia Yang disebabkan oleh sebagian besar personil pencarian, pertolongan, dan evakuasi berstatus sebagai tenaga THL sehingga kesulitan untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan; 7. Keterbatasan Anggaran Untuk Peningkatan Kapasitas Personil/Sumber Daya Manusia; 8. Luasnya Wilayah dan Masih Ada Wilayah Yang Mengalami Blank Spot Sehingga Arus Informasi Ketika Terjadinya Bencana Tidak Diterima Dengan Cepat; dan 9. Masih Kurangnya Partisifasi Serta Kesadaran Baik Dari Tingkat RT, Desa/Keluarahan, Bahkan Kecamatan Memberikan Laporan Kejadian Bencana.	1. Mengoptimalkan Pelaksanaan dalam tahapan penentuan status Tanggap Darurat 2. Mengoptimalkan Penerapan sistem komando operasi darurat 3. Meningkatnya kapasitas Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana secara cepat dan tepat 4. Meningkatkan ketersediaan peralatan dan logistik kebencanaan 5. Menerapkan sistem Penyimpanan yang terpadu pada pergudangan Logistik PB.

No	Jenis Pelayanan	Permasalahan	Solusi
4	Pelayanan Penyelematan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	1. Masih terdapat 8 kecamatan yang belum memiliki Pos Pemadam Kebakaran dan pos yang ada di kecamatan kondisinya mulai banyak terlihat kerusakan pada bangunannya, termasuk sarana komputerisasi administrasi, ruang tunggu dan ruang informasi sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat. 2. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas 27.630 Km2, dan terdiri dari 20 Kecamatan tetapi hanya memiliki 1 unit mobil rescue yang terletak di Tenggarong sehingga pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang jika terjadi di kecamatan tidak bisa ditangani secara maksimal seperti penyelamatan Kecelakaan transportasi, animal rescue, penyelamatan pada ketinggian, Penyelamatan bangunan runtuh, penanganan pohon tumbang, penanganan percobaan bunuh diri dan lain-lain. 3. Masih kurangnya petugas pemadam kebakaran di kecamatan serta masih kurangnya kualifikasi petugas pemadam kebakaran. 4. Masih rendahnya gaji petugas pemadam kebakaran dan belum adanya honorarium piket jaga, honorarium per kejadian kebakaran dan honorarium per kegiatan penyelamatan bagi petugas pemadam kebakaran mengingat petugas pemadam kebakaran memiliki beban kerja resiko tinggi. 5. Masih kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang dimiliki oleh sub urusan kebakaran. 6. Masih kurangnya relawan pemadam kebakaran yang ada di kecamatan, kelurahan dan desa serta peralatannya. 7. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran 8. Pemadam Kebakaran Belum memiliki Sumber Air/Reservoir secara mandiri	1. Penambahan Pos Pemadam Kebakaran bagi kecamatan yang belum memiliki pos pemadam kebakaran. 2. Perlunya penambahan unit mobil rescue untuk penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 3. Perlunya penambahan jumlah petugas pemadam kebakaran di kecamatan dan mengadakan diklat bagi petugas pemadam kebakaran. 4. Perlu diberikan pendapatan yang memadai dan tunjangan resiko tinggi bagi petugas pemadam kebakaran 5. Perlunya penambahan anggaran untuk membeli sarana & prasarana 6. Perlu dibentuk kelompok relawan pemadam kebakaran di kecamatan, kelurahan dan desa serta bantuan peralatannya. 7. Perlu diperbanyak edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran. 8. Perlu dibangun sumber air/reservoir mandiri untuk pengisian mobil pemadam kebakaran sehingga tidak akan terganggu terutama pada musim kemarau

4.6. Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang

Sosial Di Daerah Provinsi dan Daerah Kab. / Kota, bahwa SPM Bidang Sosial meliputi:

1. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial;
2. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial;
3. PelayananRehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial;
4. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial; dan
5. Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota.

4.6.2. Target Pencapaian SPM

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial, target capaian Pemerintah Daerah dalam pemenuhan SPM setiap jenis pelayanan dasar pada bidang Sosial adalah 100% tiap tahunnya.

4.6.3. Realisasi

a. Realisasi Capaian Layanan Dasar

Tabel 146. Realisasi Capaian Layanan Dasar Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian 2022
1	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	1120	1120	100%
2	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	183	183	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian 2022
	Terlantar di luar Panti Sosial					
3	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	1673	854	51%
4	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	84	84	100%
5	Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota	Persentase (%) Korban Bencana alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten	100%	Tidak Ada Bencana	Tidak Ada Bencana	100%

Sumber : e-SPM Kemendagri : 2022

1. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial;

Pencapaian pemenuhan SPM Sosial pada Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial dicapai melalui perhitungan dengan cara:

$$= \frac{\begin{array}{c}Jumlah\ Penyandang\ Disabilitas\ Terlantar \\ yang\ terpenuhi\ kebutuhan\ dasarnya\ di\ luar\ panti\end{array}}{\begin{array}{c}Populasi\ Penyandang\ Disabilitas\ Terlantar \\ di\ Kab.\ yang\ membutuhkan\ Rehabilitasi\ Sosial\ Dasar\ di\ Luar\ Panti\end{array}} \times 100$$

$$= \frac{1.120}{1.120} \times 100$$

$$= 100\%$$

2. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial;

Pencapaian pemenuhan SPM Sosial pada Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial dicapai melalui perhitungan dengan cara:

$$= \frac{Jumlah\ Anak\ Terlantar\ yang\ terpenuhi\ kebutuhan\ dasarnya\ di\ luar\ panti}{Populasi\ Anak\ Terlantar\ di\ Kab.\ yang\ membutuhkan\ Rehabilitasi\ Sosial\ Dasar\ di\ Luar\ Panti} \times 100$$

$$= \frac{183}{183} \times 100$$

$$= 100\%$$

3. PelayananRehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial;

Pencapaian pemenuhan SPM Sosial pada Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial dicapai melalui perhitungan dengan cara:

$$= \frac{Jumlah\ Lanjut\ Usia\ Terlantar\ yang\ terpenuhi\ kebutuhan\ dasarnya\ di\ luar\ panti}{Populasi\ Lanjut\ Usia\ Terlantar\ di\ Kab.\ yang\ membutuhkan\ Rehabilitasi\ Sosial\ Dasar\ di\ Luar\ Panti} \times 100$$

$$= \frac{854}{1.673} \times 100$$

$$= 51\%$$

4. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial;

Pencapaian pemenuhan SPM Sosial pada Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial dicapai melalui perhitungan dengan cara:

$$= \frac{Jumlah\ Gelandangan\ dan\ Pengemis\ yang\ terpenuhi\ kebutuhan\ dasarnya\ di\ luar\ panti}{Populasi\ Gelandangan\ dan\ Pengemis\ di\ Kab.\ yang\ membutuhkan\ Rehabilitasi\ Sosial\ Dasar\ di\ Luar\ Panti} \times 100$$

$$= \frac{84}{84} \times 100$$

$$= 100\%$$

5. Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota.

Pencapaian pemenuhan SPM Sosial pada Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota pada Tahun 2022 tidak ada dikarenakan tidak terjadi bencana daerah

b. Realisasi Capain Mutu Layanan Dasar

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak. Adapun capaian Mutu Pelayanan Dasar Urusan Sosial sebagai berikut:

Tabel 147. Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Bidang Sosial

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial	1. Layanan Data dan Pengaduan	1	1	0	100%
	2. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	2	2	0	100%
	3. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	100%
	4. Penyediaan Permakanan	1.120	1.120	0	100%
	5. Penyediaan Sandang	1.120	1.120	0	100%
	6. Penyediaan Alat bantu	799	37	762	5%
	7. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	1	1	0	100%
	8. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	1.120	176	944	16%
	9. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	1.120	176	944	16%

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
	10. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	8	8	0	100%
	11. Akses ke Layanan Pendidikan	162	40	122	25%
	12. Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	42	42	0	100%
	13. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	34	34	0	100%
	14. Layanan Rujukan	42	42	0	100%
	15. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	100%
	Pencapaian Mutu Layanan Dasar				**73,38%**
Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial	1. Layanan Data dan Pengaduan	1	1	0	100%
	2. Penyediaan Permakanan	183	16	167	9%
	3. Penyediaan Sandang	183	16	167	9%
	4. Penyediaan Alat bantu				0%
	5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	100%
	6. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	183	71	112	39%
	7. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	183	4	179	2%
	8. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1	1	0	100%
	9. Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	183	183	0	100%
	10. Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	39	39	0	100%
	11. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	30	30	0	100%
	12. 1Layanan Rujukan	20	20	0	100%
	13. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Tidak Ada	Tidak Ada	0	100%
	14. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	0	100%

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
	Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru				
	15. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	1	1	0	100%
	Pencapaian Mutu Layanan Dasar				**70,56%**
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial	1. Layanan Data dan Pengaduan	1	1	0	100%
	2. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	1	1	0	100%
	3. Penyediaan Permakanan	1.673	854	819	51%
	4. Penyediaan Sandang	1.673	854	819	51%
	5. Penyediaan Alat bantu	101	16	85	16%
	6. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Tidak Ada	Tidak Ada	0	100%
	7. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	1.673	6	1667	0%
	8. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	1.673	0	1673	0%
	9. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Tidak Ada	Tidak Ada	0	100%
	10. Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	1.673	1.673	0	100%
	11. Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	12	12	0	100%
	12. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	7	7	0	100%
	13. Layanan Rujukan	3	3	0	100%
	14. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	1	1	0	100%
	15. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	0	100%

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
	Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru				
	Pencapaian Mutu Layanan Dasar				**74,55%**
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Layanan Data dan Pengaduan	Tidak Ada	Tidak Ada	0	100%
	2. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Tidak Ada	Tidak Ada	0	100%
	3. Penyediaan Permakanan	79	79	0	100%
	4. Penyediaan Sandang	79	79	0	100%
	5. Penyediaan Alat bantu	Tidak Ada	Tidak Ada	0	100%
	6. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Tidak Ada	Tidak Ada	0	100%
	7. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	79	79	0	100%
	8. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	79	79	0	100%
	9. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Tidak Ada	Tidak Ada	0	100%
	10. Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Tidak Ada	Tidak Ada	0	100%
	11. Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	84	84	0	100%
	12. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	84	84	0	100%
	13. Layanan Rujukan	Tidak Ada	Tidak Ada	0	100%
	14. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	Tidak Ada	Tidak Ada	0	100%
	15. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	Tidak Ada	Tidak Ada	0	100%
	Pencapaian Mutu Layanan Dasar				**100%**
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap	1. Penyediaan Permakanan	Tidak Ada Bencana	Tidak Ada Bencana	Tidak Ada Bencana	100%
	2. Penyediaan Sandang	Tidak Ada Bencana	Tidak Ada Bencana	Tidak Ada Bencana	100%

Jenis Pelayanan	Jenis Mutu Barang / Jasa	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu
Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota	3. Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tidak Ada Bencana	Tidak Ada Bencana	Tidak Ada Bencana	100%
	4. Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Tidak Ada Bencana	Tidak Ada Bencana	Tidak Ada Bencana	100%
	5. Pelayanan Dukungan Psikososial	Tidak Ada Bencana	Tidak Ada Bencana	Tidak Ada Bencana	100%
	Pencapaian Mutu Layanan Dasar				**100%**

Sumber : e-SPM Kemendagri : 2022

c. Indeks Pencapaian SPM

Tabel 148. Indeks Pencapaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Penerima Pelayanan Dasar	Capaian Mutu Layanan Dasar	Indeks Pencapaian SPM	Kategori
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial	100%	77,38%	95,48%	Tuntas Utama
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial	100%	70,56%	94,11%	Tuntas Utama
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial	51%	74,55%	55,75%	Belum Tuntas
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	100%	100%	Tuntas Paripurna
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	100%	Tuntas Paripurna
IPSM Sub Urusan Sosial				**89,07%**	**Tuntas Madya**

Pengukuran Penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan menggunakan Indeks Pencapaian SPM (IPSM) yang diperoleh berdasarkan perhitungan Capaian Mutu Layanan Dasar dengan Capaian Penerima Pelayanan Dasar.

Capaian Mutu Layanan Dasar merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata–rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis, sedangankan

Capaian Penerima Pelayanan Dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja.

$$IPSM = (\%\ capaian\ penerima\ layanan\ dasar \times 80\%) + (\%\ capaian\ mutu\ layanan\ dasar \times 20\%)$$

Pada Bidang Sosial penerapan SPM di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2022 Indeks Pencapaian SPM sebesar 89,07% dengan kategori predikat **Tuntas Madya.**

4.6.4. Alokasi Anggaran

Tabel 149. Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Sosial pada APBD Tahun 2022

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realiasasi	%
Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**1.127.400.000**	**1.567.210.000**	**1.414.630.147**	**90,26%**
	Penyediaan Permakanan	400.000.000	600.000.000	572.073.510	95,35%
	Penyediaan Sandang	150.000.000	150.000.000	123.700.304	82,47%
	Penyediaan Alat Bantu	200.000.000	190.000.000	184.380.794	97,04%
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	125.000.000	374.810.000	323.752.704	86,38%
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	152.400.000	152.400.000	150.282.000	98,61%
	Pemberian Layanan Rujukan	100.000.000	100.000.000	60.440.835	60,44%
	Pemeliharaan Anak Terlantar	**300.000.000**	**280.000.000**	**128.033.100**	**45,73%**
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	300.000.000	280.000.000	128.033.100	45,73%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**7.215.089.000**	**7.573.933.500**	**4.728.054.710**	**62,43%**
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	7215089000	7.573.933.500	4.728.054.710	62,43%

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realiasasi	%
Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**425.000.000**	**815.500.000**	**801.256.923**	**98,25%**
	Penyediaan Makanan	300.000.000	590.500.000	583.646.070	98,84%
	Penyediaan Sandang	125.000.000	225.000.000	217.610.853	96,72%
Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial		**9.067.489.000**	**10.236.643.500**	**7.071.974.880**	**69,08%**

Sumber: Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022

4.6.5. Dukungan Personil

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 76 orang PNS. Dari jumlah tersebut 56 orang PNS berjenis kelamin pria dan 20 orang wanita. Berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikannya, pegawai Dinas Sosial dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 150. Jumlah ASN Dinas Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
Wanita	0	6	12	2	20
Pria	1	15	34	6	56
Jumlah	1	21	46	8	76

Dilihat dari pengelompokan berdasarkan golongan, dapat diketahui bahwa kelompok terbesar ada pada pegawai dengan Golongan III. Kondisi ini merupakan potensi yang perlu dikelola dengan baik, sehingga regenerasi manajemen dapat berjalan dengan baik. Sedangkan pegawai dengan tingkat golongan I dan II tersedia dengan jumlah yang cukup memadai sebagai fungsi penunjang.

Tabel 151. Jumlah ASN Dinas Sosial Berdasakan Tingkat Pendidikan

Jenis Kelamin	SLTP	SLTA	D3	s1	S2	Jumlah
Wanita	1	6	1	9	3	20
Pria	1	24	0	23	8	56
Jumlah	2	30	1	32	11	76

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian terbesar pegawai Dinas Sosial yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat berpendidikan Pascasarjana-S2 (14,47%), Sarjana-S1 (42,1%), Diploma-D3 (1.32%) selanjutnya berpendidikan SLTA (39,47%) dan SLTP (2,63%). Jenjang pendidikan pegawai ini merupakan potensi dan kekuatan tersendiri mengingat pendidikan yang baik cenderung berpengaruh terhadap kemampuan daya analisis dan kedewasaan intelektual seseorang. Sehingga dengan demikian pelayanan yang diberikan akan dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Meskipun demikian perlu juga mendapatkan perhatian yang cukup tentang kesesuaian antara latar belakang akademis dengan bidang tugas yang ditekuninya.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau yang dulu dikenal dengan istilah pembangunan kesejahteraan sosial, merupakan bidang tugas dari profesi Pekerjaan Sosial. Profesi ini meskipun sudah berkembang cukup pesat di negara-negara Amerika, Eropa dan Skandinavia, namun di Indonesia belum banyak dikenal karena perkembangan profesi ini yang lambat. Idealnya pelaksanaan urusan wajib dibidang sosial merupakan ranah tugas profesi Pekerjaan Sosial, dengan demikian semestinya Dinas Sosial didukung oleh pegawai yang berlatar belakang pendidikan profesi Pekerjaan Sosial. Namun kenyataannya distribusi pegawai yang ada di Dinas Sosial hanya sedikit yang berlatar belakang pendidikan profesi Pekerjaan Sosial. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi top manajemen Dinas Sosial

dalam mengelola sumber daya manusia yang tersedia dalam mencapai tujuan organisasi.

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara seperti halnya dengan Kabupaten/Kota lainnya dilaksanakan dengan mengacu pada pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Dalam manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial setidaknya terdapat 3 (tiga) hal penting yang mempengaruhi kinerja pencapaian target SPM yang meliputi : sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan metode pelaksanaannya.

Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu Kabupaten dengan APBD yang sangat besar sehingga hampir tidak ada kendala dalam hal penganggaran. Artinya untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara selama ditunjang dengan data dan informasi yang baik, akan disediakan anggaran yang cukup oleh Pemerintah Daerah. Meskipun dari sisi presentasi anggaran belanja langsung Dinas Sosial terhadap APBD masih sangat kecil, namun anggaran tersebut sudah dapat dioptimalkan untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya mencapai target SPM Bidang Sosial justru berasal dari ketersediaan sumber daya manusia aparatur. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target pelayanan minimal bidang sosial idealnya ditunjang dengan ketersediaan SDM dengan latar belakang pendidikan Ilmu Kesejahteraan Sosial atau Pekerjaan Sosial secara memadai. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam melakukan analisa secara holistik dan komprehensif terhadap

permasalah sosial yang berkembang, sehingga dapat melaksanakan proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan baik.

Kondisi SDM yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara sangat sedikit yang berlatar belakang pendidikan Ilmu Kesejahteraan Sosial atau Profesi Pekerjaan Sosial, bila dibandingkan dengan disiplin ilmu Administrasi Negara. Situasi ini jelas berpengaruh dalam pelaksanaan tugas karena persepsi atau pemahaman dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial lebih didasarkan pada pelayanan publik dalam kerangka administrasi negara. Penanganan masalah sosial bila dilaksanakan hanya dengan menitik beratkan pada aspek pelayanan publik, maka masalah sosial tersebut tidak akan tuntas.

Metode yang digunakan dalam penanganan masalah sosial menitik beratkan pada adanya interaksi antara individu dalam satu lingkungan sosial dan atau interaksi antar individu dari berbagai lingkungan sosial. Disinilah letak keunikan penanganan masalah sosial oleh profesi Pekerjaan Sosial bila dibandingkan dengan profesi lain. Ketersediaan SDM berlatar belakang profesi Pekerjaan Sosial yang sangat terbatas di Dinas Sosial merupakan permasalahan yang berdampak juga pada adanya masalah dalam pemilihan metode pelayanan kesejahteraan sosial. Antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memberikan pelatihan kepada SDM dalam bidang teknis penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terutama bagi SDM yang bukan berlatar belakang pendidikan profesi Pekerjaan Sosial.

Masalah lain yang dirasakan adalah kurangnya partisipasi masyarakat terutama dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha.

Upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara melalui Forum CSR (Corporate Social Responsibility) belum menunjukkan hasil signifikan. Kurang tersedianya informasi dan data yang memadai untuk serta kejelasan pola pelaksanaan partisipasi tersebut masih merupakan kendala yang perlu diatasi bersama. Bila melihat pada bnyaknya perusahaan menengah dan besar yang boperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara terutama disektor pengelolaan sumber daya alam, maka potensi partisipasi CSR dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat besar.

Kondisi geografis wilayah dan ketersediaan Sumber Daya Manusia bidang urusan Sosial menjadi kendala dalam pelayanan jika tidak didukung dengan pendanaan yang cukup dan akibatnya pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan tidak dapat terlaksana secara maksimal.

4.7.Program dan Kegiatan

4.7.1. Bidang Pendidikan

Pada Tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara selaku pelaksana Penerapan SPM Bidang Pendidikan melaksanakan satu program Pengelolaan Pendidikan yang berkaitan dalam pencapaian SPM, terdiri 1 (satu) program , 4 (empat) Kegiatan dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan diantaranya:

1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, adapun Sub Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian SPM Bidang Pendidikan diantaranya:
   - Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
   - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
   - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
   - Pengadaan Mebel PAUD

- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
- Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
- Pengelolaan Dana BOP PAUD

2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, adapun sub kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian SPM Bidang Pendidikan diantaranya:
   - Penambahan Ruang Kelas Baru
   - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
   - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
   - Pembangunan Perpustakaan Sekolah
   - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
   - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
   - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
   - Pengadaan Mebel Sekolah
   - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
   - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
   - Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
   - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
   - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menegah Sekolah Menengah Pertama, adapun sub kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian SPM Bidang Pendidikan diantaranya:
   - Penambahan Ruang Kelas Baru
   - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

- Pembangunan Laboratorium
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Pengadaan Mebel Sekolah
- Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, adapun sub kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian SPM Bidang Pendidikan diantaranya:
   - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan
   - Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
   - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
   - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan
   - Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan

4.7.2. Bidang Kesehatan

Pada Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara selaku pelaksana Penerapan SPM Bidang Kesehatan melaksanakan Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota yang berkaitan dalam pencapaian SPM, terdiri 1 (satu) program , 1 (satu) Kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan diantaranya:

- Pengelolaan Kesehatan Ibu Hamil;
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Barn Lahir;
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita;
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; dan
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV.

4.7.3. Bidang Pekerjaan Umum

Pada Tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kutai Kartanegara selaku pelaksana Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum melaksanakan beberapa program yang berkaitan dalam pencapaian SPM, terdiri 2 (dua) program , 2 (dua) Kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan diantaranya:

1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), adapun Sub Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum diantaranya:
   - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
   - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
   - Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan PerdesaaN

2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten / Kota, adapun Sub Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum diantaranya:
   - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
   - Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
   - Penyediaan Saranan Penangkutan Lumpur Tinja
   - Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT

4.7.4. Bidang Perumahan dan Pemukiman

Pada Tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kutai Kartanegara selaku pelaksana Penerapan SPM Bidang Perumahan dan Pemukiman melaksanakan beberapa program yang berkaitan dalam pencapaian SPM, terdiri 1 (satu) program , 2 (dua) Kegiatan dan 9 (sembilan) Sub Kegiatan diantaranya:

1) Program Pembangunan Perumahan dengan kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, adapun Sub Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian SPM Bidang Perumahan dan Pemukiman diantaranya
   - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

- Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
- Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
- Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota
- Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus

2) Program Pembangunan Perumahan dengan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, adapun Sub Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian SPM Bidang Perumahan dan Pemukiman diantaranya

- Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
- Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota

4.7.5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, perangkat daerah pelaksana SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu:

a) Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah pelaksana Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai perangkat daerah pelaksana Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran.

Pada Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara selaku pelaksana Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum melaksanakan beberapa program yang berkaitan dalam pencapaian SPM, terdiri 1 (satu) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 9 (sembilan) Sub Kegiatan diantaranya:

- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
- Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Pada Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku pelaksana Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran dan Ketertiban Umum melaksanakan beberapa program yang berkaitan dalam pencapaian SPM, terdiri 2 (dua) program , 5 (kegiatan) Kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan diantaranya:

- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- Penyusunan Rencana Kontijensi
- Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota
- Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota
- Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana

4.7.6. Bidang Sosial

Pada Tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara selaku pelaksana Penerapan SPM Bidang Sosial melaksanakan beberapa program yang berkaitan dalam pencapaian SPM, terdiri 3 (tiga) program , 4 (empat) Kegiatan dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan diantaranya:

- Penyediaan Permakanan
- Penyediaan Sandang
- Penyediaan Alat Bantu
- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- Pemberian Layanan Rujukan
- Penyediaan Makanan bagi korban Bencana Alam dan Sosial
- Penyediaan Sandang bagi korban Bencana Alam dan Sosial
- Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

BAB V
Penutup

Sesuai ketentuan dalam Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, maka Pemerintah Daerah setiap tahun menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 sudah menggunakan sistem yang terintegrasi secara online melalui sistem informasi elektronik SILPPD Kemendagri. Terkait dengan implementasi kebijakan tersebut, masih ditemukan ketimpangan data atau ketidaktersediaan data pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) (baik IKK outcome maupun IKK output) dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

LPPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 memuat Capaian Kinerja pada Urusan Wajib, Urusan Pilihan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan tugas pembantuan. Selain hal tersebut juga dilaporkan Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022 dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022.

Jika dilihat dari hasil yang dicapai, dapat dikatakan secara umum bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 mencapai kinerja sangat baik, namun demikian disadari bahwa dalam pelaksanaanya masih terdapat berbagai

kendala dan hambatan yang menyebabkan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum optimal. Penetapan arah kebijakan bukan lagi mengejar peringkat akan tetapi lebih fokus kepada proses, pelaksanaan dan hasil dari setiap urusan pemerintah sehingga dapat diambil langkah menetapkan kebijakan urusan pemerintah yang dianggap kurang baik dapat ditingkatkan serta yang sudah berjalan dengan baik agar tetap dipertahankan.

Pemerintah Kabupaten telah mencoba memenuhi komitmen bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang kokoh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa akan datang dalam mewujudkan Kutai Kartanegara IDAMAN 2021-2026.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak, segenap Pimpinan dan Anggota DPRD dan Jajaran Perangkat Daerah serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dengan semangat *Betulungan Etam Bisa* telah memberikan dukungan dan berkerja keras bahu membahu melaksanakan urusan pemerintahan pembangunan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas program dan kegiatan yang telah dilakukan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah